



SISTEM KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN SULAWESI SELATAN



Direktorat
Budayaan

47

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan

SISTEM KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN SULAWESI SELATAN

303.40047

1416

5

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI
KEBUDAYAAN DAERAH

1983 / 1984



TIM PENELITI / PENULIS :

- **Drs. MUH. YAMIN DATA , KETUA .**
- **Drs. MAKMUN BADARUDDIN .**
- **MUH. MAWI P.**
- **M. ALI MALIK .**
- **OSMAN HAMJAH .**
- **M. SYARIF .**

EDITOR : Dra. SRI SAODAH HERUTOMO .



KATA PENGANTAR .

Dalam tahun anggaran 1983/1984 Proyek IDKD Sulawesi Selatan menginventarisir lima aspek Kebudayaan Daerah. Salah satu diantaranya ialah : ASPEK KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN .

Dalam melaksanakan tugas ini banyak kesulitan yang dihadapi oleh tim peneliti seperti : banyak dokumen-dokumen Desa yang sukar didapati akibat kekacauan yang pernah melanda daerah Sulawesi Selatan ini selama lebih kurang 15 tahun . Pemuka-pemuka masyarakat yang tahu tentang sejarah pemerintahan Desa sudah tidak ada ditempat. Dan pada saat tim ada dilapangan bertepatan masa persiapan pemilihan Kepala Desa untuk seluruh wilayah Dati II Sidenreng Rappang. Hal ini menyebabkan banyak informasi yang sukar diperoleh. Tetapi berkat bantuan dan kerja sama dengan pemerintah Daerah dan Kasi/Penilik Kebudayaan setempat kesulitan-kesulitan tersebut dapat teratasi .

Dengan terselesaikannya tugas penelitian dan tersusunnya laporan ini maka tim merasa perlu menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan .
2. Bapak Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Bapak Ka. Kandep. Dikbud Kabupaten Sidenreng Rappang bersama Kasi dan Penilik Kebudayaannya .
4. Bapak Kepala Pemerintahan wilayah Kecamatan Dua Pitue bersama seluruh stafnya .
5. Bapak Ka. Kandep Dikbud Kecamatan Dua Pitue .
6. Bapak Kepala Desa batu dan Lancirang .
7. Seluruh pihak baik instansi maupun perorangan yang telah memberikan bantuannya kepada kami .

Mudah-mudahan segala bantuan yang telah diberikan itu mendapat ganjaran yang berlipat ganda adanya dari Tuhan Yang Maha Esa .

K e t u a
Aspek Kepemimpinan Dalam Masyarakat
Pedesaan Sulawesi Selatan

DRS. MUHAMMAD YAMIN DATA



KATA PENGANTAR .

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Sulawesi Selatan tahun anggaran 1986/1987 mendapat kepercayaan dari Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan , Departemen Pendidikan dan kebudayaan untuk mencetak 5 (lima) judul buku yakni :

1. Ungkapan Tradisional Sebagai Sumber Informasi Budaya Daerah Sulawesi Selatan Tahun 1982/1983 .
2. Upacara Tradisional (Upacara Kematian) Daerah Sulawesi Selatan Tahun 1982/1983 .
3. Sistem Ekonomi Tradisional Daerah Sulawesi Selatan Tahun 1982/1983 .
4. Dampak Modernisasi Terhadap Hubungan Kekerabatan Daerah Sulawesi Selatan Tahun 1983/1984 .
5. Sistem Kepemimpinan Dalam Masyarakat Pedesaan Sulawesi Selatan 1983/1984 .

Buku-buku yang dicetak tersebut merupakan hasil penelitian Tim Daerah yang disempurnakan oleh Tim Pusat dengan pegangan kerja yang telah ditentukan oleh Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Jakarta. Namun demikian tidak berarti bahwa hasil penelitiannya telah ,mencapai kesempurnaan .

Pada kesempatan ini Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Tim Penulis Daerah Sulawesi Selatan, Kanwil Depdikbud Prop. Sulawesi Selatan, Pemerintah Daerah Tk I. Sulawesi Selatan, yang telah memberikan bantuan sehingga penulisan/pencetakan Naskah ini dapat terselenggara.

Mudah-mudahan Naskah ini bermanfaat adanya .

Ujung Pandang, Agustus 1986 .
Pemimpin Proyek Inventarisasi dan
Dokumentasi kebudayaan daerah
Sulawesi Selatan

ttd

Drs. H. MAKMUN BADARUDDIN .
NIP. 130369287 .



P E N G A N T A R

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah menghasilkan beberapa macam Naskah Kebudayaan Daerah di antaranya ialah naskah : Sistem Kepemimpinan dalam Masyarakat Pedesaan Sulawesi Selatan Tahun 1983/1984 .

Kami menyadari bahwa naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penerbitan yang mendalam, tetapi baru pada tahap pencatatan yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu selanjutnya .

Berhasilnya usaha ini berkat kerja sama yang baik antara Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dengan Pimpinan dan Staf Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah , Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Leknäs/LIPI dan tenaga ahli perorangan di daerah .

Oleh karena itu dengan selesainya naskah ini, maka kepada semua pihak yang tersebut diatas menyampaikan penghargaan dan terima kasih .

Demikian pula kepada team penulis naskah ini di daerah yang terdiri dari : Drs. Muh. Yamin Data, Drs. Makmun Badaruddin, Muh. Mawi P , M. Ali Malik , Osman Hamjah , M. Syarif. dan team penyempurnaan naskah di pusat yang terdiri dari : Dra. Sri Saodah Herutomo .

Harapan kami, terbitan ini ada manfaatnya .

Jakarta , Agustus 1986 .

Pimpinan Proyek ,

ttd

Drs. H. Ahmad Yunus .

NIP. 130146112 .



S A M B U T A N

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Sulawesi Selatan dilaksanakan dalam rangka pengembangan Kebudayaan Nasional, disamping itu, tujuan lain yang ingin dicapai ialah penyediaan data dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk dipelajari dan dinikmati. Adapun Naskah yang di cetak tahun anggaran 1986/1987 ialah :

" **SISTEM KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN SULAWESI SELATAN TAHUN 1983/1984** ".

Dengan selesainya naskah ini dicetak dan disebar luaskan kepada masyarakat akan menjadi bahan apresiasi dan pengenalan - kebudayaan yang memperkokoh jiwa persatuan dan kesatuan bangsa .

Kehadiran naskah ini, telah melibatkan banyak yang berpartisipasi baik dari Team Daerah, Team Pusat, maupun Pemerintah Daerah. Dengan demikian selayaknya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kerja sama yang baik itu .

Diharapkan pada waktu-waktu yang akan datang naskah yang selesai dievaluasi, dapat diterbitkan pula dalam rangka menambah bahan-bahan bacaan untuk masyarakat khususnya tentang Kebudayaan Daerah Sulawesi Selatan .

Semoga kehadiran naskah ini dapat memenuhi fungsinya dan bermanfaat bagi kita semua .

Ujung Pandang, Agustus 1986 .

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud .
Prop. Sulawesi Selatan .

t t d

Drs. ATHAILLAH .
NIP. 130433286 .



D A F T A R I S I

	Hal .
- KATA PENGANTAR	i
- KATA PENGANTAR	ii
- KATA PENGANTAR	iii
- KATA SAMBUTAN	iv
- D A F T A R I S I	v,vi
BAB. I. PENDAHULUAN	
1. Masalah	1
2. Tujuan Penelitian	1
3. Ruang Lingkup	
4. Pertanggungjawaban Jawab Ilmiah	6
BAB. II. I D E N T I F I K A S I	10
1. Lokasi	10
2. Penduduk	13
3. Sejarah Pemerintahan Desa	16
4. Latar Belakang Sosial Budaya	23
BAB.III. GAMBARAN UMUM KEPEMIMPINAN DALAM - MASYARAKAT PEDESAAN	38
1. Organisasi Pemerintahan Desa	38
2. Sistem Kepemimpinan	42
- Kepemimpinan Formal	42
- Kepemimpinan Formal Tradisional	50
- Kepemimpinan Informal	52
BAB. IV. POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN DIBIDASNG SOSIAL	55
BAB. V. POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN DIBIDANG EKONOMI	63
BAB.VII. POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN DIBIDANG PENDIDIKAN	77

BAB.VIII. BEBERAPA ANALISA	84
1. Pengaruh Kebudayaan terhadap Sistem Kepemimpinan di Pedesaan	84
2. Sistem Kepemimpinan Pedesaan sehubungan dengan Sistem Administrasi Politik Nasional	93
3. Sistem Kepemimpinan Pedesaan dalam Pembangunan Nasional	102
BAB. IX. P E N U T U P	108
- DAFTAR KEPUSTAKAAN .	
- I N D E K S .	
--LAMPIRAN - LAMPIRAN BERUPA PETA .	

BAB I P E N D A H U L U A N

1. MASALAH PENELITIAN .

1.1 MASALAH UMUM .

Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional belum dapat melayani data yang terjalin dalam bahan keseja-
rahan, nilai Budaya, sistem Budaya baik untuk kepen-
tingan pelaksanaan kebijaksanaan kebudayaan, pendidi-
kan dan kepentingan masyarakat .

1.2 MASALAH KHUSUS .

Yang menjadi masalah dalam penelitian ini ialah Sistem kepemimpinan di pedesaan Sulawesi Selatan .
Desa sebagai suatu satuan sosial dan satuan kebudaya-
an dengan corak tersendiri merupakan salah satu unsur
dari sistem jaringan administrasi, ekonomi, politik dan
sosial yang pusatnya terdekat adalah kota Kecamatan .
Melalui sistem-sistem jaringan tersebut akan di lihat -
pengaruh sistem-sistem Nasional yang meliputi : Kebu-
dayaan, politik, ekonomi dan sosial terhadap kebudaya-
an yang berlaku di masyarakat Desa .
Melalui pembauran antara sistem politik Nasional deng-
an sistem politik yang berlaku di masyarakat Desa Loka-
si penelitian akan dilihat tentang bentuk dan corak -
sistem politik bagaimanakah yang akan terwujud .
Untuk maksud tersebut dipilih Desa Batu dan Desa Lan-
cirang (keduanya terletak di kecamatan Dua Pitue Ka-
bupaten Sidenreng Rappang) sebagai sample penelitian.
Desa Batu mewakili Desa terpencil dalam arti komuni-
kasi nya dengan kota dan daerah-daerah sekitarnya be-
lum lancar. Sedangkan Desa Lancirang mewakili desa
yang komunikasinya dengan kota dan daerah-daerah se-
kitarnya sudah lancar .

2. TUJUAN PENELITIAN .

2.1 . TUJUAN UMUM .

Agar Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional
mampu menyediakan data dan informasi kebudayaan
untuk keperluan pelaksanaan kebijaksanaan kebudaya-
an, pendidikan dan masyarakat .

2.2. TUJUAN KHUSUS .

2.2. TUJUAN KHUSUS .

- 2.2.1. Mengumpulkan data informasi tentang sistem kepemimpinan dalam masyarakat Pedesaan Sulawesi Selatan yang diharapkan dapat mengungkapkan masalah kepemimpinan itu sendiri dihubungkan dengan politik, ekonomi, sosial dan budaya .
- 2.2.2 Tersusunnya sebuah Naskah tentang Sistem Kepemimpinan di Pedesaan Sulawesi Selatan yang merupakan Dokumentasi/Inventarisasi Sistem Budaya dan sumbu berinformasi Budaya dalam rangka menunjang pembangunan Nasional khususnya dibidang Kebudayaan.
- 2.2.3 .Dengan data dan informasi yang berhasil dikumpulkan itu akan dicoba mengungkapkan pembauran Sistem politik tradisional dengan sistem politik Nasional, untuk melihat sistem politik bagaimanakah yang terwujud sebagai hasil pembauran tersebut .

3. RUANG LINGKUP .

3.1 RUANG LINGKUP MATERI .

Beberapa pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli ilmu sosial tentang masalah kepemimpinan ini antara lain sebagai berikut : Henry Pratt Fairchild dkk dalam " Dictionary of Sociology and Related sciences (1962 , 174) dalam Thamrin Hamdan mengemukakan sebagai berikut :

- a. Dalam arti luas " Pemimpin " adalah seseorang yang memimpin , yang mengambil inisiatif bagi tingkah laku sosial , mengontrol semua usaha orang lain berdasarkan prestise (martabat) kekuatan atau kedudukan . Dengan kata lain Pemimpin adalah orang yang memberiransangan (Stimulus) tertentu secara efektif bagi tingkah laku sosial .
- b. Dalam arti sempit " Pemimpin " adalah seseorang yang memimpin dengan menanamkan keyakinan dan penerima secara suka rela dari para pengikutnya .

Sedangkan mengenai " Kepemimpinan Fairchild " (dkk) mendefinisikan sebagai berikut :

- a. Kepemimpinan adalah suatu proses keadaan dimana seseorang (orang-orang) karena kemampuannya untuk menanggulangi masalah-masalah dalam lingkup kepentingan kelompoknya , diikuti oleh orang-orang lain didalam

kelompok tersebut,sertamempengaruhi tingkah laku mereka.

Kepemimpinan dapat didasarkan atas pengaruh pribadi secara spontan (fisik, keberanian , kesesuaian) atau atas dasar suatu prestise (martabat) yang didapat dari keahlian , pengetahuan dari berbagai faktor diatas .

- b. Kepemimpinan adalah tindakan mengorganisir dan mengarahkan berbagai aktifitas dan kepentingan kelompok maupun perseorangan dalam ikatan proyek atau perusahaan tertentu oleh seseorang yang membangun suatu kerja sama melalui pengamanan dan pemeliharaan bersama tujuan yang hendak dicapai .

Selanjutnya Koentjaraningrat (1977 : 181) dalam Thamrin Hamdan mengemukakan pengertian sebagai berikut :

- a. Kedudukan sosial, dalam artian ini kepemimpinan adalah suatu komplek dari hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seseorang (pemimpin, ketua, panglima, raja, dan lain-lain) atau oleh sesuatu badan (pemerintah) pengurus dan lain - lain .
- b. Proses sosial, dalam artian ini " Kepemimpinan " meliputi segala aspek terjang yang dilakukan oleh orang-orang atau badan-badan itu untuk menyebabkan gerak dari orang atau masyarakat dalam peristiwa-peristiwa kemasyarakatan. Segala aspek terjang itu berjalan sebagai suatu proses dari memutuskan, merencanakan keputusan, menjalankan keputusan, sampai mengurus akibat-akibat keputusan .

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dikemukakan diatas Thamrin Hamdan mengemukakan rumusan sehubungan dengan tujuan penelitian ini sebagai berikut :

" Pemimpin adalah seseorang atau beberapa orang yang berada dalam kedudukan sosial tertentu yang dianggap mempunyai kemampuan, kekuasaan, dan wewenang yang sah, dan diakui oleh sejumlah orang lain dalam konteks ,ruangdan waktu, serta lingkungan masyarakat dan kebudayaan tertentu . Sedangkan " Kepemimpinan " adalah suatu proses penerapan dan penggunaan dari kemampuan, kekuasaan, dan wewenang seseorang atau beberapa orang pimpinan dalam usahanya :

1. Untuk mengorganisir, mempengaruhi, mengajak dan mengarahkan tingkah laku dan perbuatan dari orang-orang yang mengakuinya sebagai pemimpin .
2. Mengambil keputusan-keputusan yang bersifat mengikat bagi perorangan yang mengakuinya sebagai pemimpin, serta dalam usahanya untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul dalam ruang lingkup kelompok yang dipimpinya, .

baik masalah itu menyangkut kepentingan perseorangan maupun untuk kepentingan kelompok. Dari pengertian-pengertian seperti yang telah dikemukakan diatas akan dicoba mengungkapkan sistem-sistem kepemimpinan yang berlaku di pedesaan Sulawesi Selatan. Demikian pula bentuk-bentuk kepemimpinan baru yang muncul setelah ada pembaruan antara sistem kepemimpinan tradisional (lokal) dengan Nasional.

3.2 RUANG LINGKUP OPERASIONAL .

Pengertian Desa dapat ditinjau dari beberapa segi antara lain :

- Segi Geografi .
- Desa adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok-manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu ujud atau kenampakan dimuka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur Fisiografi, Sosial, Ekonomi, Politik dan Kultural yang saling berinter aksi antara unsur-unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain . (Bintarto , 1983) .
- Segi Demografi .
- Desa adalah salah satu tempat untuk menampung penduduk (W.S. THOMPSON , 1953) .
- Segi Sosiologi .
- Desa ialah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri (Sutarjo Kartohadikusumo, dikutip oleh Bintarto dalam bukunya Geografi Desa) .
- Segi Administrasi Nasional Indonesia .
Desa adalah suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia .
(UU. No. 5/1979 Bab.I Pasal 1) .

Dari batasan pengertian Desa seperti yang telah dikemukakan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ada tiga unsur - yang harus dipenuhi oleh suatu kesatuan hidup untuk dikatakan Desa

Unsur - unsur tersebut ialah :

- a. Daerah
- b. Penduduk .
- c. Tata kehidupan .

Ketiga unsur diatas bersatu membentuk satu kesatuan hidup yang tidak tersahkan .

Dari unsur penduduk (masyarakat) dan tata kehidupan seperti tersebut diatas menunjukkan keharusan adanya pimpinan - yang mengatur ketertiban masyarakat berdasarkan nilai-nilai dan tata kehidupan yang telah disepakati bersama .

Dalam penelitian ini Desa dilihat sebagai suatu satuan sosial yang merupakan satu kebudayaan dengan coraknya tersendiri dan merupakan salah satu unsur dari sistem jaringan administrasi, ekonomi, politik dan sosial yang pusatnya terdekat adalah kota kecamatan. Sedangkan sistem kepemimpinan akan dilihat sebagai suatu perwujudan dari pelaksanaan sistem politik yang berlaku dalam masyarakat Desa tersebut. Sistem politik akan dilihat sebagai hasil perwujudan atau perangkat-perangkat, model-model pengetahuan yang digunakan untuk menanggapi berbagai masalah dan gejala-gejala yang berkaitan dengan peraturan tata kehidupan manusia dari kebudayaan masyarakat setempat .

Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan meliputi 23 buah daerah tingkat II yang terdiri dari 2 buah Kotamadya dan 21 buah kabupaten, 169 buah kecamatan dan 1.169 buah Desa .

Luas wilayah tersebut dibanding dengan fasilitas, waktu tenaga dan dana yang tersedia maka tidak mungkin dapat terjangkau seluruhnya .

Oleh karena itu untuk memantapkan pencapaian tujuan penelitian ini dan sesuai pula dengan petunjuk dalam Tor maka hanya dipilih dua buah desa diantara 1169 buah desa yang ada diwilayah Sulawesi Selatan untuk menjadi lokasi penelitian . Kedua desa yang dipilih tersebut terletak diKecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu :

- Desa Lancirang , merupakan Desa yang komunikasinya dengan daerah dan kota-kota disekitarnya sudah lancar, bahkan pernah menjuarai lomba desa se Sulawesi Selatan yaitu juara I tahun 1968 , juara III tahun 1977 .
- Desa batu , merupakan desa yang masih terpencil jauh dari jaringan komunikasi dengan kota-kota dan daerah-daerah yang ada disekitarnya .

Pemilihan kedua Desa tersebut diatas didasari oleh pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Ibokota Kecamatan Dua Pitue , Tanru Tedong dilalui jalan raya poros Pare-Pare - Sengkang - Bone dan Palopo . Dengan demikian lebih mudah terjangkau dengan kendaraan umum .

2. Jarak antara kedua Desa itu hanya kira-kira 25 Km, jadi mudah ditempuh dengan kendaraan-kendaraan Desa .
3. Dengan penglihatan sepintas di Desa Batu masih nyata kelihatan pengaruh-pengaruh tradisi lama dalam kehidupan masyarakatnya . Sedangkan di Lancirang kelihatan je las pengaruh kota lebih menonjol .
4. Pada jaman sebelum merdeka kedua Desa ini terletak di wilyah Distrik yang berbeda yaitu Lancirang diwilayah Pitu Riawa sedangkan Desa Batu diwilayah Pitu Riase . Dengan demikian akan mudah terlihat perbedaan-perbedaan perkembangannya demikian pula pengaruh administrasi politik Nasional .

4. PERTANGGUNGAN JAWAB ILMIAH .

4.1 . TAHAP PERSIAPAN .

Dalam tahap persiapan telah diadakan penyusunan organisasi Team Peneliti yang terdiri dari :

- Muh. Yamin Data , Ketua .
- Makmun Badaruddin , anggota .
- M uh. M a w i . P , anggota .
- Muh. Ali Malik , anggota .
- Muh. Syarif , anggota .

Kepada semua anggota tim tersebut diatas telah diberikan penjelasan dan petunjuk-petunjuk tentang tugas dan kewajiban masing-masing .

4.2. TAHAP PENGUMPULAN DATA .

Sebelum pengumpulan data dimulai, terlebih dahulu diadakan penentuan metode yang akan dipergunakan . Metode-metode tersebut adalah sebagai berikut :

- Study dokument yaitu mempelajari berbagai dokumen surat-surat Keputusan, surat-surat perintah, lontara, surat kabar dan lain-lain .
- Metode pengamatan yaitu mengamati langsung masyarakat pedesaan lokasi penelitian . Dengan metode ini akan diusahakan juga melakukan pengamatan terlibat untuk mendapatkan keterangan - keterangan yang lebih mendalam lagi .
- Metode wawancara, baik wawancara bebas maupun wawasan berstruktur . Untuk penggunaan metode ini - juga akan digunakan pedoman wawancara .

Lokasi pengumpulan data telah dipilih dua desa diWilayah

Kecamatan Dua Pitue yaitu Desa Batu dan Desa Lancirang (lihat uraian 3.2) .

Desa Batu merupakan desa yang masih kurang lancar komunikasinya dengan kota-kota dan daerah-daerah sekitarnya, tetapi masih mudah dijangkau dengan menggunakan kendaraan desa karena jaraknya hanya 17 Km - dari Ibukota Kecamatan Dua Pitue Tanru Tedong .

Dengan situasi keterpencilannya ini diperkirakan bahwa di Desa tersebut masih dapat dilihat jelas batas-batas antara tradisi lama dan tradisi-tradisi baru yang datang dari kota .

Desa Lancirang merupakan desa yang sudah lancar komunikasinya dengan kota-kota dan daerah sekitarnya-sangat mudah dijangkau dengan kendaraan roda dua atau roda empat bahkan dengan bendipun .

Jadi karena jaraknya dengan ibukota Kecamatan hanya 8 Km . Secara sepintas nyata kelihatan pengaruh tradisi kota yang bersifat baru sudah nampak dikalangan masyarakatnya .

Ada beberapa hambatan yang ditemui dalam pengumpulan data ini antara lain karena orang-orang banyak tahu tentang sejarah kedua desa ini sudah tidak ada di tempat demikian juga dokumen-dokumen tertulis banyak yang sukar ditemui, karena Desa ini beberapa kali mengalami kekacauan yang berlangsung cukup lama kurang lebih 15 tahun .

Tetapi berkat bantuan dan kerja sama dari semua pejabat kecamatan dan Desa, dan tokoh-tokoh masyarakat dari ke dua Desa tersebut maka hambatan hambatan tersebut dapat diatasi .

4.3. PENGOLAHAN DATA .

Setelah semua data dan informasi terkumpul maka diadakanlah seleksi dan klasifikasi untuk mendapatkan data yang benar sesuai dengan maksud dan tujuan dari pada penelitian ini .

Kemudian disusun laporan tahap permulaan . Hasil laporan tahap permulaan ini dinilai dan dikoreksi bersama oleh semua anggota Tim .

Setelah mendapatkan penyempurnaan, barulah disusun laporan terakhir dengan sistematika sebagai berikut :

- Pengantar .
- Daftar Isi .

BAB I . PENDAHULUAN .

BAB II . IDENTIFIKASI .

**BAB III . GAMBARAN UMUM KEPEMIMPINAN DA
LAM MASYARAKAT PEDESAAN .**

1. Kepemimpinan Formal .
2. Kepemimpinan Formal Tradisional .
3. Kepemimpinan Informal .

**BAB IV . POLA KEPEMIMPINAN MASYARAKAT PE
DESAAN DALAM BIDANG BIDANG KEHI
DUPAN TERTENTU .**

1. Bidang Sosial .
2. Bidang Ekonomi .
3. Bidang Agama .
4. Bidang Pendidikan .

BAB V . BEBERAPA ANALISA .

1. Pengaruh Kebudayaan terhadap sistem Ke
pemimpinan di Pedesaan .
2. Sistem Kepemimpinan Pedesaan sehubung-
an dengan sistem administrasi Politik Na
sional .

- Bibliografi
- Lampiran-lampiran .
- Daftar Informan .
- Peta-Peta .
- Indeks .

Pada bab I Pendahuluan diuraikan tentang masalah pe
nelitian, tujuan penelitian, organisasi Tim Peneliti, me
tode-metode yang digunakan dan Desa Lokasi penelitian
dalam rangka pengumpulan data .

Pada bab II , diuraikan identifikasi Desa, Sample-
penelitian yang meliputi, lokasinya, penduduknya, seja
rah pemerintahan Desa dan latar belakang sosial budaya
nya .

Pada bab III, diuraikan tentang gambaran umum
kepemimpinan dipedesaan yang meliputi :

- Kepemimpinan Formal .
- Kepemimpinan Formal Tradisional .
- Kepemimpinan Informal .

Pada bab IV. Diuraikan tentang pola-pola kepemim
pinan dibidang sosial,ekonomi,agama dan pendidikan .

Pada bab V . Dikemukakan beberapa analisa yang me liputi : Pengaruh Kebudayaan terhadap Sistem Kepempin pinan di Pedesaan , hubungan sistem kepemimpinan di Ped esaan dengan sistem administrasi Politik Nasional , dan Sistem Kepemimpinan Pedesaan dalam pembangunan Na sional .

BAB. II

IDENTIFIKASI

I. LOKASI

1.1. Letak Geografis.

Dua Desa yang menjadi sample dalam penelitian ini ialah : Desa Batu dan Desa Lancirang.

Desa Batu terletak di wilayah paling utara dari Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), merupakan Desa yang paling luas wilayahnya di Kecamatan Dua Pitue. Desa ini berbatas sebelah utaranya dengan wilayah Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Luwu, Sebelah timurnya dengan Kabupaten Luwu dan Desa Belawae Sidrap. Sebelah selatannya dengan desa Bila dan sebelah baratnya dengan desa Betao dan Kabupaten Enrekang (Lihat peta terlampir).

Desa Lancirang terletak di wilayah bagian selatan Kecamatan Dua Pitue. Desa ini dilalui oleh jalanan poros Pare-Pare Sengkang. Desa ini berbatas pada sebelah utaranya dengan Desa Otting, sebelah timurnya dengan Desa Tanru Tedong (Ibukota Kecamatan Dua Pitue). Sebelah selatannya dengan Kecamatan Belawa (Kabupaten Wajo), sebelah baratnya dengan kecamatan Maritengngae (Kabupaten Sidrap).

1.2. Keadaan Alamnya.

Wilayah Desa Batu luasnya 611 Km² yang terbagi atas tanah ladang dan hutan rimba serta sedikit sekali tanah persawahan. Morfologinya makin ke utara makin bergunung-gunung dan wilayahnya makin melebar. Di lereng-lereng pegunungan ini tumbuh hutan belukar asli yang lebat dan mengalir sungai-sungai yang cukup besar seperti sungai Barukku, sungai Wala, sungai Barangmamase dan sungai Karoddong.

Daerah persawahan hanya di dapati pada wilayah bagian selatan, sedangkan dibagian utara didapati tanah-tanah perladangan dan perkebunan yang sifatnya masih berpindah-pindah setelah dua/tiga kali panen. Nanti setelah menjadi hutan, baru diolah kembali untuk ditanami. Pertanian dengan teknis irigasi moderen dikenal di Desa ini. Iklimnya yang sama dengan iklim yang berlaku di seluruh Wilayah Kabupaten Sidrap yaitu iklim tropis.

Hujan turun pada musim barat yaitu kira-kira pada bulan Nopember s/d April setiap tahunnya sedangkan bulan-bulan lainnya merupakan musim kemarau.

Tumbuh-tumbuhan pekarangan yang banyak ditanam ialah : pisang, kelapa, mangga, nangka, jambu, pepaya, sedangkan tanaman perkebunan terdiri dari : pada ladang, jagung, cengkeh, kemiri dan coklat.

Adapun jenis binatang yang banyak hidup dan dipelihara ialah : ayam, kambing, sapi, kerbau dan kuda. Anjing banyak dipelihara untuk digunakan untuk sebagai pembantu diwaktu berburu dan teman pada waktu masuk hutan mencari kayu, rotan atau damar.

Desa Lancirang luasnya 46 Km², berbeda dengan keadaan alam Desa Batu, Desa Lancirang wilayah pada umumnya terdiri dari daratan rendah yang merupakan persawahan yang subur yang minimal panen dua kali setahun Wilayahnya mengalir sempit, di wilayah Desa mengalir sungai-sungai Lancirang, sungai Padang dan sungai Tangga.

Iklim di desa ini ialah iklim tropis, hujan turun pada musim barat yaitu bulan Nopember s/d April setiap tahun, sedangkan pada bulan-bulan lainnya merupakan musim kemarau.

Tanaman yang banyak dijumpai di Desa Lancirang ialah : padi, jagung, wijen, pisang, kelapa, kapuk, jeruk, nenas, ubi kayu dan ubi jalar.

Adapun hewan-hewan piaraan di desa ini ialah : ayam, itik, kambing, kuda, sapi, kerbau dan anjing. Anjing dipelihara untuk penjaga rumah dan kebun.

1.3. Pola Perkampungan.

Sebagaimana diuraikan diatas bahwa keadaan alam Desa Batu dan Lancirang sangat berbeda, desa bergunung-gunung sedangkan Desa Lancirang merupakan dataran rendah.

Berdasarkan faktor keadaan alam ini menyebabkan pola perkampungan di kedua desa tersebut diatas berbeda pula.

Perkampungan di desa Batu merupakan perkampungan menyebar di daerah-daerah aliran sungai yang tanahnya datar dan berdekatan dengan ladang-ladang mereka.

Hal ini menyebabkan jarak antara satu rumah dengan rumah yang lain tidak teratur dan hanya dihubungkan dengan jalan-jalan setapak yang sangat sukar dilalui, kecuali di ibukota Desa (Kampung Barukku) sudah ada

jaringan jalan desa yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor. Keadaan ini menyebabkan keadaan kehidupan penduduknya masih merupakan kehidupan yang berkelompok-kelompok yang hubungannya dengan kelompok lain jarang dilakukan.

Di Desa Lancirang pola perkampungan memusat. Rumah-rumah penduduk didirikan berbanjar disepanjang jalan raya.

Jarak antara satu rumah dengan rumah yang lain sudah teratur. Karena itu hubungan antara tetangga sangat mudah dilakukan.

Dipusat kegiatan ekonomi sehari-hari seperti dipersimpangan jalan menuju Kecamatan Belawa sudah ada deretan toko-toko dan warung-warung yang teratur baik.

Hal ini menyebabkan hubungan pergaulan penduduk sangat intim dan mudah. Demikian juga hubungan desa ini terletak di jalur jalanan yang menghubungkan pantai barat Sulawesi Selatan dengan pantai timur.

2. P E N D U D U K .

Menurut catatan yang kami peroleh dari Balai Desa Batu Nopember 1983, penduduk Desa Batu berjumlah 5.669 jiwa yang pada umumnya terdiri dari suku Camma dan suku Bugis.

Mereka tersebar dalam wilayah yang luasnya 611 Km² yang terbagi atas 22 Rukun Kampung (RK), 63 Rukun Te tangga (RT) atau 1091 Kepala Rumah Tangga (KRT).

Penyebaran mereka pada setiap Lingkungan yang ada dalam wilayah Desa Batu dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

T A B E L N O : I

PENYEBARAN PENDUDUK DESA BATU PADA SETIAP LINGKUNGAN

No.	NAMA LINGKUNGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH JIWA
		L	P	
1.	Barukku	1038	1285	2321
2.	Batu Larib	428	492	920
3.	Matajang	281	364	645
4.	Wala-Wala	418	501	919
5.	Compong	465	397	862
JUMLAH		2630	3039	5669

Sumber : Balai Desa Batu.

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa lingkungan yang paling banyak penduduknya ialah lingkungan Barukku, menyusul Batu Larin Wala-wala. Campong dan yang paling sedikit ialah lingkungan Matajang.

Jadi seolah-olah penduduknya terpusat pada lingkungan Barukku. Hal ini mungkin disebabkan karena faktor keadaan alam Barukku yang sebahagian besar merupakan daratan rendah dan juga merupakan bekas ibukota Distrik Pitu Riase. Dengan kata lain fasilitas yang dimiliki oleh lingkungan Barukku lebih memadai dibanding dengan lingkungan lain, seperti, jaringan jalan, komunikasi dengan ibukota kecamatan dan kabupaten dan sebagainya.

Dari tabel tersebut diatas juga dapat diketahui perbandingan jumlah penduduk menurut kelamin. Jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada penduduk laki-laki yaitu : Perempuan 3039 jiwa (54%) dan laki-laki 2630 jiwa (46%).

Prosentase pertambahan penduduk desa Batu diperkirakan kurang lebih 1 % pertahun. Hal ini bukanlah disebabkan karena keberhasilan Keluarga Berencana (KB), karena program KB didesa ini barulah dalam taraf pengenalan, tetapi hal ini mungkin disebabkan oleh karena banyaknya penduduk didesa ini terutama yang usia muda (laki-laki perempuan) yang pergi merantau ke daerah lain seperti : ke Pulau Kalimantan, Sumatera, Maluku, Irian Jaya, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara bahkan ada juga yang ke Malasiya. Yang menjadi pendorong mereka itu pergi merantau ialah faktor ekonomi dan keamanan.

Desa Lancirang penduduknya berjumlah kira-kira 10.163 jiwa sesuai dengan hasil pencatatan Nopember 1983 yang pada umumnya adalah suku bugis. Mereka tersebar di wilayah yang luasnya 46 Km² yang terbagi atas 19 Rukun Kampung (RK), 63 Rukun Tetangga (RT) atau 1964 Kepala Rumah Tangga (KRT). Penyebaran penduduk pada setiap lingkungan yang ada di wilayah Desa Lancirang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

T A B E L No. 2

TABEL PENYEBARAN PENDUDUK DESA LANCIRANG PADA SETIAP LINGKUNGAN

TABEL No. 2
TABEL PENYEBARAN PENDUDUK DESA LANCIRANG
PADA SETIAP LINGKUNGAN

No.	NAMA LINGKUNGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH JIWA
		L	P	
1.	Lancirang I	1573	1462	3035
2.	Padang Lawang	1517	1625	3142
3.	La Siwala	579	599	1178
4.	Lancirang II	1332	1476	2808
J U M L A H		5001	5162	10163

Sumber : Balai Desa Lancirang .

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa lingkungan yang paling banyak penduduknya ialah : Padang Lawang, menyusul Lancirang I, Lancirang II dan yang paling sedikit La Siwala .

Berbeda dengan penyebaran penduduk di Desa Batu yang seolah-olah terpusat di lingkungan Barukku saja. Di Desa Lancirang penyebaran penduduk lebih merata dalam wilayah semua lingkungan .

Hal ini disebabkan karena wilayah lingkungan di Desa Lancirang pada umumnya terdiri dari dataran rendah yang subur, juga jaringan -jaringan jalan dan alat pengangkutan keseluruhan wilayah lingkungan sudah cukup dan memadai .

Dari tabel tersebut diatas dapat pula diketahui bahwa jumlah penduduk perempuan di Desa Lancirang lebih banyak dari penduduk laki-laki yaitu : Perempuan 5162 jiwa (50,8 %) dan laki-laki 5001 jiwa (49,1 %) .

Perbedaan jumlah penduduk perempuan dan laki-laki ini mungkin disebabkan karena banyaknya penduduk terutama laki -laki usia muda yang pergi merantau ke daerah lain seperti : Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera, Ambon dan Irian Jaya untuk mencari nafkah .

Mereka yang merantau ini pulang ke Lancirang setelah satu atau dua tahun, bahkan sudah banyak mereka itu yang tinggal menetap di daerah perantauannya .

3. SEJARAH PEMERINTAHAN DESA BATU DAN LANCIRANG.

Zaman Belanda.

Batu berasal dari nama sebuah kerajaan kecil yang wilayahnya banyak dijumpai batu-batu besar. Wilayah kerajaan kecil ini terletak dilereng sebelah selatan pegunungan Latimojong. Sekarang wilayah ini termasuk wilayah desa Batu kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kepala Pemerintahan kerajaan kecil ini bergelar Arung Batu (Puang ta I Batu artinya yang menguasai kerajaan Batu).

Sesuai dengan informasi yang dapat dikumpulkan dari permukaan-pemuka masyarakat, baik yang pernah memegang kekuasaan didaerah Batu maupun yang tidak, baik yang berdomisili di Batu maupun di Tanru Tedong dan Lancirang dikatakan bahwa kerajaan Batu pada zaman Belanda pernah bergabung dengan kerajaan Rappang. Penggabungan ini tidak jelas apakah karena tunduk dibawah kekuasaan ataukah karena kebetulan Arung Rappang juga diangkat jadi Arung (raja) di Batu.

Karena perangkapan jabatan pada dua kerajaan sudah menjadi tradisi bagi kerajaan-kerajaan di wilayah Aja Tapparang sejak zaman dahulu. hal ini dapat dibuktikan pada kerajaan Rappang dan Sidenreng di zaman pemerintahan Arung La Sadapotto.

Pada kerajaan Rappang dan Sawitto pada zaman pemerintahan Arung I Tenri. Demikian juga Arung Otting yang bernama Andi Pabekka dengan gelar Petta Otting, pernah merangkap sebagai Arung Otting dan Arung di Batu.

Perangkapan jabatan pada dua kerajaan mudah terjadi karena pada umumnya Arung (raja) dari kerajaan-kerajaan kecil di wilayah ini masih mempunyai hubungan keluarga yang dekat. Menurut informasi dari Imam desa Batu diperkuat oleh Kepala Desa Lanciran dan Kepala lingkungan IV desa Bila bahwa Arung (raja) pertama yang pernah menguasai kerajaan Batu ialah : Andi Layyana dengan gelar Petta Labobo.

Setelah masa pemerintahan Petta Labobo berakhir maka kerajaan Batu bergabung dengan kerajaan Rappang dibawah pemerintahan Arung Rappang yang bernama Andi Bunga (Petta Bunga). Menurut informasi pada saat pemerintahan Andi Bunga maka kerajaan Batu setiap tahunnya menyeter Sima ke Rappang. Pada masa berakhirnya Andi Bunga maka beliau digantikan oleh Andi Bausat. Arung Andi Bausat masih tetap berkedudukan di Rappang. Oleh karena jarak Rappang dan Batu cukup jauh, menyukarkan Arung (raja) untuk mengadakan kontrol setiap waktu ke wilayah Batu.

Untuk mengatasi masalah ini maka oleh Arung Rappang Andi Bausat diangkat seorang pelaksana harian yang bernama Dg. Pasolong dengan gelar jabatan Sulle Watang .

Tidak lama kemudian Andi Bausat turun tahta pada saat itu lah kerajaan Batu menyatakan diri terpisah dari Rappang. Kemudian bergabung dengan enam kerajaan kecil lainnya yang wilayahnya berdekatan . Kerajaan-kerajaan kecil yang bergabung itu : Betao, sekarang menjadi Desa Betao, Kalempang, Paraja, Lamarrang, Barang Mamase, Batu dan Barukku .

Gabungan dari tujuh kerajaan ini diberi nama Distrik Pitu Riase. Pitu artinya tujuh, Riase artinya diatas maksudnya pegunungan. Jadi Pitu Riase maksudnya tujuh kerajaan kecil yang wilayahnya terletak dipegunungan. Yang menjadi Arung (raja) pertama setelah terjadinya penggabungan itu ialah : Andi Patimangi dengan gelar Kepala Distrik Pitu Riase berkedudukan di Tanru Tedong . Sejak saat itu kerajaan Batu setiap tahunnya menyettor Sima ke Tanru Tedong.

Menurut informasi Andi Patimangilah yang memerintah dimasa kekuasaan Jepang sampai tahun 1948.

Zaman Kemerdekaan .

Tiga tahun setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 Andi Patimangi memerintah sebagai kepala - Distrik Pitu Riase, beliau digantikan oleh Andi Nganro . Andi Nganro memerintah dari tahun 1948 s/d 1950 kemudian beliau digantikan oleh Andi Samamma . Pada masa pemerintahan Andi Samamma Distrik Pitu Riase bergabung dengan Distrik Pitu Riawa yang wilayahnya meliputi tujuh buah kerajaan kecil yang terletak dibagian selatan yaitu : Ottila, Ugi, Jepu, Botto, Bulucenrana, Bilulang dan Bila (Abd. Razak Dg. Patunru , - Bingkisan Budaya Sulselra).

Gabungan kedua buah Distrik Pitu ini diberi nama Distrik Desa Pitue dengan ibukotanya Tanru Tedong .

Setelah terbentuknya Distrik Pitue maka berturut-turut menjadi pejabat adalah : Andi Ceme, Andi Madda, Andi Panjiwi, Andi Takko dan Andi Pabbekka (Petta Otting) . Masa jabatan Kepala Distrik seperti telah disebutkan berturut-turut diatas tidak menentu karena pada masa itu bertepatan dengan berkec...

muknya kekacauan yang melanda seluruh wilayah Swapraja Sidenrang Rappang. Salah satu pusat kekuatan gerombolan pada waktu itu ialah Distrik Dua Pitue. Keadaan kacau seperti ini baru dapat pulih kembali pada tahun 1965.

Dalam keadaan kekacauan yang masih berkecamuk pada tahun 1951 diangkatlah Andi Ewang sebagai Kepala Distrik dan dibantu oleh Haji Andi Nurdin (Petta Kali) masa jabatannya berlangsung sampai pada tahun 1957. Beliau digantikan oleh Drs. Andi Kone (sekarang staf kantor Gubernur Prop. Sulawesi Selatan) sebagai kepala Distrik. Masa jabatan Drs. Andi Kone berlangsung sampai tahun 1962 Dengan berakhirnya masa jabatan Drs. Andi Kone sebagai Kepala Distrik maka berakhir pulalah kepemimpinan Distrik Dua Pitue yang berdasarkan keturunan. Dengan demikian terbukalah kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga masyarakat untuk menduduki jabatan sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Berakhirnya sistem kepemimpinan berdasarkan keturunan ini dapat ditandai dengan diangkatnya Haji Abidin Pido (Perwira ABRI) sebagai Kepala Distrik Dua Pitue menggantikan Drs. Andi Kone pada tahun 1962. Bertepatan dengan pengangkatan H. Abidin Pido sebagai Kepala Distrik diadakan pula perubahan . Nama Distrik Dua Pitue menjadi Kecamatan Dua Pitue yaitu salah satu diantara tujuh buah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sidenrang Rappang . Untuk jelasnya sejarah pembentukan Desa Batu dan Lancirang kita harus bertolak dari sejarah pembentukan Kabupaten Sidenrang Rappang. Kabupaten Sidenrang Rappang dibentuk berdasarkan peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1959. Wilayahnya meliputi bekas wilayah Swapraja Sidenrang Rappang . Yang menjadi Kepala Daerah Sidenrang Rappang yang pertama ialah : H. Andi Sapada Mappangile (Pensiunan ABRI .AD dan seorang pejuang Kemerdekaan Indonesia, asli dari Sidrap Daerah Tingkat II Sidenrang Rappang ini merupakan penukaran dari Kabupaten Pare-Pare lama .

Sebagai tindak lanjut dari pembentukan daerah Tingkat II Sidenrang Rappang menyusul pula pembentukan kecamatan-kecamatan .Sebelum pembentukan kecamatan maka terlebih dahulu Distrik-Distrik yang ada di wilayah bekas Swapraja Sidenrang dan Rappang yang jumlahnya 19 dibubarkan dengan Peraturan Bupati KDH No. 271/1961 tanggal 26-6-1961 ter

masuk Distrik Dua Pitue. Selanjutnya untuk pembentukan kecamatan-kecamatan di wilayah Sidrap ini didasarkan SK Gubernur No. 2067 A Tgl.19 - 12 - 1961. Berdasarkan SK tersebut diatas terbentuklah pertama kali empat buah kecamatan yang diwilayahnya meliputi bekas Distrik yang telah dibubarkan. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah ;

1. Kecamatan Rappang (Lalebbata)
2. Kecamatan Maritengngae / Watang Pulu .
3. Kecamatan Tellu LimpoE .
4. Kecamatan Dua Pitue .

Kemudian dari empat buah kecamatan seperti tersebut diatas ,kecamatan Rappang (Lalebbata) dimekarkan menjadi Kecamatan Baranti dan Panca Rijang .

Dengan demikian terbentuklah 5 buah kecamatan baru masing-masing :

- 1.Kecamatan Baranti .
- 2.Kecamatan Panca Rijang .
3. Kecamatan Watang Pulu / Maritengngae .
- 4.Kecamatan Tellu Limpoe .
- 5.Kecamatan Dua Pitue .

Dalam perkembangan selanjutnya dua kecamatan yang terletak diwilayah Swapraja Sidenreng dimekarkan lagi masing-masing menjadi dua yaitu : Watang Pulu / Maritengngae menjadi kecamatan Watang Pulu dan Maritengngae. Sedangkan kecamatan Tellu Limpoe dimekarkan menjadi kecamatan Tellu Limpoe dan kecamatan Panca Lautang.

Sehingga dengan demikian terbentuklah tujuh buah kecamatan masing-masing :

1. Kecamatan Maritengngae.
2. Kecamatan Panca Rijang.
3. Kecamatan Baranti.
4. Kecamatan Watang pulu.
5. Kecamatan Tellu Limpoe.
6. Kecamatan Panca Lautang.
7. Kecamatan Dua Pitue.

Untuk selanjutnya akan diuraikan tentang pembentukan desa khususnya yang ada diwilayah kecamatan Dua Pitue. Di kecamatan Dua Pitue seperti yang telah disinggung diatas yang menjadi camat pertama ialah H. Abidin (ABRI AD). Setelah beliau

meninggal pada tahun 1978 digantikan oleh Drs. Andi Ran -
reng sebagai pejabat sementara (tahun 1978 s/d 1979) .
Pada tahun 1979 diangkatlah H. Usmin Betta (ABRI. AD) se-
bagai camat Definitif. Beliau menjabat sebagai Camat Dua
Pitue dari tahun 1979 s/d 1983, beliau digantikan oleh Drs.
A. Samad (juga dari ABRI. AD) sebagai pejabat sementara .

Sebagai tindak lanjut pembentukan kecamatan menyul-
sul pula pembentukan desa-desa pada setiap kecamatan .
Pembentukan Desa ini didasarkan SK. Bupati KDH.Sidrap No
842/1961 tanggal 15 - 12 - 1961 .

Berdasarkan SK tersebut berhasil dibentuk 52 buah desa dise-
luruh wilayah Kabupaten Sidrap. Tujuh buah diantaranya ter-
letak di Kecamatan Dua Pitue yaitu : Desa Tanru Tedong, Lan-
cirang, Otting, Bila, Batu, Betao dan Belawae. Ketujuh buah -
desa ini merupakan pengelompokan beberapa buah kampung-
lama yang letaknya berdekatan dan punya kaitan sejarah di
masa lalu. Namanya masih berbeda-beda begitu pula struk-
tur kepemimpinannya, belum seragam.

Setelah bentuk Desa seperti tersebut diatas berjalan ki-
ra-kira 4 tahun yaitu dari tahun 1961 s/d 1965 diadakan lagi
pembentukan Desa gaya baru berdasarkan SK. Gubernur Sula-
wesi Selatan No. 450/XXII/1965 tentang pembentukan Desa
gaya baru. Hal ini untuk lebih menertibkan desa-desa yang
telah ada baik nama maupun struktur kepemimpinannya .
Desa gaya baru ini masih ada diantaranya yang diperbolehkan
memakai nama-nama yang sudah lazim didaerah itu. Dengan
demikian pada saat itu dijumpai ada desa yang menggunakan
nama Wanua. Kepala penmerintahannya pun masih mengguna-
kan gelar Kepala Wanua .

Dengan SK. Gubernur tersebut diatas wilayah Dati II
Sidrap berhasil dibentuk 32 buah Desa gaya baru . Tujuh buah
diantaranya berada di wilayah kecamatan Dua Pitue. Pada
saat desa-desa itu sudah berstatus Desa gaya baru masih
menggunakan Nama Wanua . Jadi dengan demikian ada Wa-
nua Batu dan ada pula Wanua Lancirang .

Wanua Batu letaknya di wilayah utara kecamatan Dua
Pitue. Wilayah Wanua ini meliputi kampung : Barukku, Mataja-
jang, Batu, Wala-Wala dan Campong, yang menjadi Ibukota ialah
Barukku

Yang menjadi kepala Wanua Batu pertama ialah : Puang Manta, kemudian digantikan oleh Puang Lewa yang menjabat sampai pada tahun 1967. Kedua kepala Wanua tersebut diatas pengangkatannya melalui penunjukan dari atas. Keduanya juga masih ada hubungan famili dengan pejabat-pejabat di kecamatan.

Pada bulan Juni 1967 barulah untuk pertama kalinya diadakan pemilihan kepala Wanua. Pada waktu itu ada dua calon yang diajukan yaitu masing-masing : Wa Duha dan Edy Manasa.

Dalam pemilihan ini yang terpilih ialah : Wa Duha. Beliau adalah seorang penduduk asli Wanua Batu dan anggota POLRI.

Cara pemilihannya ialah : Foto kedua calon yang akan dipilih itu ditempelkan pada kotak suara yang telah disediakan. Para wajib pilih menulis nama calon yang dipilih pada kertas kemudian dimasukkan kedalam kotak dimana foto calon itu tertempel. Setelah selesai semua wajib pilih melakukan pilihannya maka diadakanlah perhitungan suara yang disaksikan oleh peserta pemilihan dan Tripida Kecamatan.

Pada saat itu setelah diadakan perhitungan ternyata suara terbanyak jatuh pada Wa Duha. Pelantikan Wa Duha sebagai kepala Wanua yang ke III dilakukan oleh Bupati KDHSidrap H. Arifin Nukmang. Pada upacara pelantikan dan penyempahan itu diserahkan SK Pengangkatannya sebagai Kepala Wanua dan disematkan bintang tanda jabatan pada saku baju sebelah kiri.

Beliau memangku jabatan sebagai Kepala Wanua sampai pada tahun 1969, beliau digantikan oleh Andi Andang. Andi Andang merupakan Kepala Desa Batu pertama karena pada masa jabatannya istilah Wanua Batu itu diganti dengan istilah Desa Batu. Masa pemerintahan Andi Andang berlangsung sampai pada tahun 1978.

Pada tahun 1978 ditunjuklah H.M. Saleh (ABRI AD) untuk menggantikannya sebagai kepala Desa Batu. H.M. Saleh adalah merupakan Kepala Desa Batu ke II dan masih tetap menjabat sampai sekarang. Jadi masa jabatan beliau sebagai Kepala Desa baru matahari ke VI.

Lancirang terletak di wilayah bahagian selatan Kecamatan Dua Pitue. Wilayahnya berbatasan dengan Desa Mojong Kecamatan Maritengngae. Wilayahnya meliputi kampung Lancirang, Padangloang dan Lasiwala.

Nama desa ini berasal dari nama jenis burung yang banyak hidup didaerah ini sejak dahulu. Hidupnya selalu berkelompok dan bila berbunyi ekornya digerakkan keatas dan kebawah.

Gerakan seperti itu dalam bahasa Bugis disebut Makkuncirang. Burung seperti disebut Manuk-manuk Lancirang dalam bahasa Indonesia disebut burung Kutilang. Karena burung tersebut banyak hidup didaerah ini akhirnya kampung tersebut diberi nama Lancirang.

Menurut informasi yang berhasil dikumpulkan melalui ketua LKMD dan Sekretaris Desa Lancirang keduanya penduduk asli dikatakan bahwa orang yang mula-mula memerintah di kampung ini berasal dari daerah bahagian utara Pare-Pare, nama dan tahun memerintahnya tidak diketahui.

Selanjutnya dikatakan bahwa, Kepala Kampung ke II yang bernama Wa lamba, kemudian Wa lamba digantikan oleh La Beddu nama panggilannya Wa Beddu. dikatakan bahwa pemerintahan Wa Beddu berlangsung samapi akhir zaman Belanda. Tidak lama kemudian ia digantikan oleh La Ceppi. (Orang ini mempunyai bulu kumis yang lebat) jadi digelar Ceppi. Lalu Kepala Ceppi digantikan oleh La Basire. Kepala Basire memerintah sampai zaman kekuasaan Jepang.

Sesudah proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang menjadi Kepala Kampung ialah : La Beddu sama namanya dengan salah seorang Kepala Kampung terdahulu yang telah disebutkan diatas. Kepala Beddu inilah yang menjadi Kepala Kampung pada masa Lancirang dilanda kekacauan. Masa pemerintahan Wa Beddu berakhir pada tahun 1965. Beliau digantikan oleh Wa Lauleng. Wa Lauleng merupakan Kepala Wanua Lancirang yang pertama setelah pembentukan Desa-desanya di wilayah Dati II Sidenreng Rappang. Mulai dari Kepala Kampung pertama zaman Belanda sampai dengan Kepala Wanua pertama yang bernama Wa Lauleng merupakan anak asli Lancireng. Setelah Wa Lauleng barulah orang yang berasal dari luar atau Desa lain mulai masuk memerintah di Desa Lancirang yaitu dengan diangkatnya Mahmud ABRI-AD berasal dari Tanru Tedong menjadi Kepala Wanua. Kemudian beliau digantikan oleh Puttiro (ABRI AD). Karena Puttiro meninggal maka beliau digantikan oleh H. Abd. Kadir .M (ABRI. AD) pada kira-kira tahun 1970. Beliau berasal dari kampung Barukku Desa Batu. Sampai sekarang ini masa jabatan beliau sebagai Kepala Desasudah memasuki 13 tahun .

4. LATAR BELAKANG SOSIAL BUDAYA .

4.1 Elite-elite Desa Batu dan Lancirang .

Elite ialah sekelompok warga masyarakat yang memiliki kelebihan-kelebihan dari warga masyarakat lainnya sehingga menempati kedudukan sosial diatas para warga - masyarakat lainnya (Hasan Walinono - 1979, 16) .

Di dua Desa yang menjadi wilayah penelitian ini dijumpai tiga macam elite yaitu :

- Elite Adat .
- Elite Agama .
- Elite Nasional .

Elite Adat terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang masih kuat memegang adat tradisi Desa yang merupakan - warisan dari nenek moyang mereka. Adat tradisi inilah - yang mengatur dan mendasari tingkah laku dan hubungan - sosial mereka sehari-hari . Kelompok ini terdiri dari pada warga masyarakat turunan bangsawan dan keluarganya . Merekalah yang pada mulanya merupakan kelompok penguasa yang ada di Desa Batu dan Desa Lancirang. Bahkan masih banyak pejabat-pejabat Desa yang berasal dari keturunan elite adat tersebut .

Elite adat memperoleh kekuasaan , kewenangan dan pengaruh dari nilai-nilai dan aturan-aturan adat. Adat di hormati dan dijunjung tinggi karena dianggap warisan dari nenek moyangnya yang diterima secara terun temurun . Barang siapa yang melanggar adat maka dia akan dilaknat-oleh leluhurnya dan akan mendapat mala petaka .

Disamping itu bahwa pelanggaran-pelanggaran adat itu diancam dengan bermacam-macam sanksi seperti :

- Riuno (dibunuh) .
- Ri Pali (diasingkan ke daerah lain) .
- Ri Dosa (didenda) .
- Ri Balu (dijual) .
- Ri Pattanro (disumpah) .

Dan pada akhir-akhir ini ada pula sanksi berupa kerja bakti membersihkan halaman mesjid atau pekarangan Balai Desa atau dikenakan sumbangan untuk mesjid .

Elite Agama ialah kelompok warga masyarakat yang

memperoleh kekuasaan, wewenang dan pengaruh terhadap warga masyarakat lainnya dari nilai-nilai dan aturan-aturan agama Islam.

Di Desa Batu dan Lancirang masing-masing dijumpai kelompok pegawai syara' yang terdiri dari seseorang imam Desa, imam lingkungan, khatib (khatib) dan doja. Disamping itu juga ada ahli-ahli agama yang tidak termasuk pejabat yang disebut Panrita.

Di Desa Batu saat ini ada 6 orang imam, yaitu seorang imam Desa, lima orang imam lingkungan. Sedangkan di Desa Lancirang terdapat lima orang imam, yaitu: 1 orang imam Desa, dan empat orang imam lingkungan. Kelompok inilah yang mengatur kehidupan di kedua Desa tersebut di atas dengan dasar nilai-nilai dan aturan agama Islam.

Oleh karena itu suatu cara yang ditempuh oleh Kepala Desa Batu ialah bahwa semua perintah dan instruksi dari pemerintah sebelum diterapkan (dilaksanakan) kepada masyarakat maka terlebih dahulu dicarikan dasar dari Al Qur'an dan Hadist.

Sebagai contoh program Keluarga Berencana, pada mulanya pelaksanaannya mengalami hambatan besar terutama di Desa, karena rakyat yang diajak masuk program KB itu tidak mau ketemu dengan petugas yang datang. Bila telah ada penyampaian dari Kepala Lingkungan bahwa petugas KB akan datang, maka seluruh rakyat di lingkungan itu berangkat ke hutan dengan alasan mencari rotan atau kayu dan kembalinya pada malam hari.

Hal ini memusingkan petugas, untuk mengatasi hal tersebut maka oleh Kepala Desa memerintahkan kepada Imam Desa untuk mencarikan dasar-dasar dalam Al Qur'an dan Hadits. Dengan jalan itu imam-imam Lingkungan memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa KB itu tidaklah bertentangan dengan agama Islam, barulah rakyat dapat mengerti dan mau mengikutinya. Dengan demikian sampai saat penulis berada di lapangan Desember 1983 sudah cukup banyak yang ikut program KB. Diantara 860 pasang usia subur yang ada di Desa Batu sudah 176 pasang yang telah ikut KB secara aktif. Ini suatu bukti bahwa nilai-nilai agama mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat Desa Batu.

Jadi elite agama ini bersifat pembantu penasehat Kepala Desa dalam menerapkan semua program perintah dan instruksi .

Lain halnya di Desa Lancirang bahwa perintah dan instruksi dari pemerintah dapat terlaksana dengan lancar karena keadaan rakyatnya sudah lebih tinggi dibanding dengan Desa Batu .

Elite Nasional (Pemerintah) ialah kelompok warga masyarakat yang memperoleh kekuasaan, kewenangan dan pengaruh dari nilai-nilai dan aturan yang berasal dari pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 .

Kelompok elite nasional ini terdiri dari pejabat-pejabat pemerintah, seperti Kepala Desa, Pegawai-pegawai Desa, Guru-guru sekolah, anggota-anggota ABRI dan pemimpin-pemimpin organisasi politik. Di Desa Batu satu-satunya organisasi politik ialah Golkar sedangkan di Desa Lancirang ada dua organisasi politik yaitu Golkar dan PPP .Kelompok elite ini merupakan pengembang nilai-nilai dan aturan-aturan pemerintah Nasional Indonesia . Pada saat sekarang ini kelompok elite inilah yang merupakan sumber penguasa Desa. Kelompok ini diperkuat oleh banyaknya pendatang ke Desa yang terdiri dari pegawai negeri dan guru-guru sekolah, ditambah pula dengan penyebar luasan P4 melalui penataran-penataran anggota masyarakat, melalui kegiatan PKK, Pramuka dan kelompok paket belajar dari pendidikan Masyarakat .

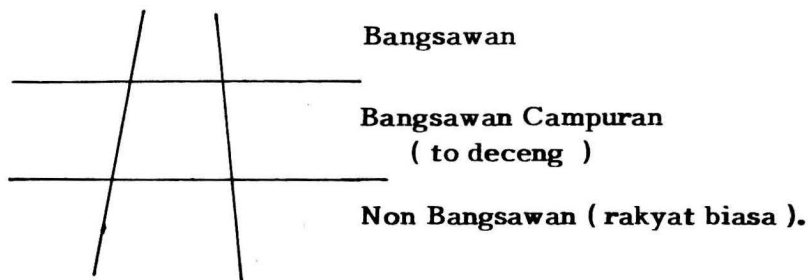
Dengan bertambah besarnya pengaruh politik pemerintah ke desa-desa menyebabkan adanya kecenderungan bahwa sebahagian dari anggota kelompok elite adat dan agama beralih ke kelompok elite Nasional. Ada yang karena jabatannya dan ada pula karena tujuan politik. Dalam kegiatannya bahwa ketiga Elite tersebut di atas tidak ada pertentangan bahwa dalam kegiatannya sehari-hari memperlihatkan adanya kerja sama dan saling membantu .

4.2. Stratifikasi Sosial .

Masyarakat di Desa Batu dan Lancirang dapat dibedakan atas tiga lapisan yaitu :

- Puang (bangsawan) .

- Iye (maradeka/ to deceng) .
- Daeng/ Uwah / Ambok (rakyat biasa) .



Pembagian seperti tersebut diatas dapat pula dilihat dalam hal perbedaan mas kawin seperti berikut :

- Puang (bangsawan) mas kawinnya 88 rellak (real)
- Maradeka mas kawinnya 44 rellak (real)
- Daeng/ Uwah/ Ambok mas kawinnya 22 rellak (real) .

Catatan : 1 rellak = Rp. 2

Hubungan antara satu lapisan dengan lapisan lainnya tidak lah tertutup mati, tetapi dalam kenyataannya bahwa seseorang yang berasal dari golongan yang lebih rendah statusnya bila mempunyai kelebihan-kelebihan seperti keberanian, kekeyaan atau pendidikan yang tinggi, dapat kawin dengan keturunan bangsawan, walaupun biasanya dibebani ongkos yang lebih tinggi yang disebut Pangelli Darah (pembeli darah) . Dengan melalui perkawinan itu berarti dia telah meningkatkan statusnya ke status yang lebih tinggi dan anaknya sudah tergolong dalam keluarga bangsawan walaupun derajatnya tidak sama .

Dahulu memilih calon pemimpin selalu dicari dari golongan (keturunan) bangsawan, hal ini mungkin disebabkan karena pada umumnya kaum bangsawan banyak yang kaya , berani dan disegani . Tetapi pada saat ini tidak lagi terpusat pada keturunan bangsawan yang penting dia punya moral/ mental baik dan mampu (berpendidikan) . Hal ini dapat dibuktikan pada beberapa pemimpin di Desa itu sekurang bukan keturunan bangsawan dan bukan penduduk asli desa seperti Kepala Desa Batu berasal dari Rappang dan Kepala Desa Lancirang berasal dari Desa Batu .

Dengan kenyataan ini i warga masyarakat dari golongan (lapisan) manapun mempunyai kesempatan untuk menduduki jabatan yang ada di Desa. Tergantung dari kemampuan mereka masing-masing. Lapisan bangsawan masih jelas dapat dibedakan dari lapisan masyarakat lainnya melalui beberapa simbol atau lambang-lambang tertentu seperti :

- Rumah bangsawan pada umumnya lebih besar dan lebih megah dari pada rumah rakyat biasa. Tutup hubungannya (timpa lajana) dibuat bertingkat ada yang sampai lima tingkat.
- Pakaian bangsawan pada umumnya mempunyai bentuk dan model tertentu terutama pada waktu menghadiri pesta . Seorang bangsawan bila menghadiri pesta masih selalu memakai Jase Tutuk (Jas tutup), Ilipa garusuk (sarung yang dikilatkan dengan menggosoknya dengan kulit kerang), Songkok Uwwe (Kopian dari Rotan). Sedangkan di Lancirang bangsawannya memakai songkok Tobone (Kopian dari serat pelepah lontar). Bila berbicara dengan bangsawan masih harus memakai kata-kata penghormatan tertentu misalnya iye puang (ya yang mulia), Iye petta (ya yang mulia). Begitu pula nama-nama mereka masih selalu ditambah didepannya dengan kata-kata Andi, Petta atau Puang . .

Bagi rakyat biasa hanya memakai nama seperti : kalau dia laki-laki La Baco / La Beddu dan kalau dia wanita I Becce / I mina dan sebagainya .

Kalau seorang bangsawan jadi Kepala Desa dia dipanggil / disapa dengan kata-kata, Petta Desa / Puang Desa, kalau jadi Imam dia disapa dengan kata-kata Petta Imam atau Puang Imam. Tetapi bila seorang rakyat jadi Kepala Desa dia hanya dipanggil/disapa dengan kata-kata istilah bahasa Indonesia seperti ; Pak Desa, kalau dia Imam dipanggil Pak Imam atau dalam bahasa Bugis setempat Uwak Imam.

4.3. Sistem Kekerabatan .

Sistem kekerabatan orang Batu dan Lancirang sama dengan sistem kekerabatan suku bugis makassar pada umumnya yaitu sistem yang mengikuti garis, baik keturunan ayah maupun ibu yang biasa disebut Bilateral atau Parental. Sistem kekerabatan seperti ini makin lama makin meluas karena seolah-olah merupakan himpunan dari keluarga ayah dan keluarga ibu. Oleh karena itu dalam satu rumah tangga orang Batu dan Lancirang tidak hanya terdiri dari ayah, ibu dan anak -

anaknyanya tetapi biasanya ditambah pula dengan mertua, atau ipar atau kemenakan yang semuanya tinggal serumah dan sedapur.

Dalam rumah tangga orang Batu yang merupakan pemimpin dan penanggung jawab tertinggi ialah ayah. Dialah yang bertanggung jawab untuk keamanan, ketertiban rumah tangga dan di a pula yang bertanggung jawab mencari nafkah untuk seluruh anggota keluarga. Sedangkan ibu adalah sebagai penanggung jawab kedalam terutam untuk kesejahteraan keluarga dan pendidikan anak-anaknya.

Pada hakekatnya kedudukan laki-laki dan wanita sama. Yang berbeda adalah peranan yang harus dilaksanakan. Persamaan hak laki-laki dan wanita dalam masyarakat suku Bugis dapat dilihat pada kerajaan-kerajaan bugis dahulu dimana ada beberapa orang rajanya yang wanita, seperti kerajaan Rappang beberapa raja wanita. Dalam hal perkawinan didesa Batu yang paling baik ialah : Kawin dengan sepupu dua kali, tiga kali dan seterusnya. Kawin dengan sepupu satu kali merupakan pantangan, karena sering menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti : misalnya selalu sakit-sakitan, sulit memperoleh reski dan mudah bercerai (sibole 10-10-1983).

Oleh karena itu perkawinan dengan sepupu satu kali selalu dihindari, hal ini sesuai pula dengan keterangan Iman Desa Batu bahwa perkawinan yang paling sering ialah antara sepupu dua kali dan sepupu tiga kali. Hal ini berbeda dengan di Desa Lancirang karena didesa Lancirang perkawinan yang paling baik ialah dengan sepupu satu kali baru yang lainnya. Perkawinan orang yang berasal dari luar desapun menurut beliau tidak ada masalah karena orang-orang Batu senang dengan orang luar dan orang-orang luar pun yang ingin kawin di Desa Batu juga boleh. Adapun mengenai istilah-istilah kekerabatan yang dipakai itu pada saat sekarang sudah banyak yang berubah dan diartikan dengan istilah bahasa Indonesia, seperti misalnya : Ambok/Uwak diganti dengan bapak, indok/Emmak diganti dengan om dan sebagainya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pegawai negeri utamanya guru-guru pendatang yang kawin di Desa Batu. Juga pada umumnya warga desa Batu yang pergi merantau banyak yang kawin di daerah perantauan baru kembali kedesaanya.

Bila terjadi hubungan dengan seorang pemuda dan pemudi diluar perkawinan maka hal ini dianggap suatu hal yang merupakan aib keluarga dan aib kampung, karena hal itu bisa menyebab

datangnya mala petaka atau bencana alam seperti : pertanian tidak menjadi, kampung terbakar, wabah penyakit menjangkit dan sebagainya. oleh karena itu bila terjadi hal yang demikian itu maka secepatnya harus diselesaikan. Penyelesaian masalah seperti ini harus melalui musyawarah antar iman Desa, Kepala Desa dan pemuka masyarakat setempat. Mereka selalu berpegang pada satu prinsip yang mereka terima secara turun temurun dari nenek moyang mereka yang berbunyi sebagai berikut :



- Lukka taro ade tellukka taro tamatoa, lukka taro tumatoa tellukka taro riale .

Maksudnya : Penetapan adat bisa batal, tetapi persepakatan orang tua tidak dapat dibatalkan. Persepakatan orang tua bisa batal tetapi persepakatan bersama (kedua belah pihak) tidak

Berdasarkan pada prinsip inilah maka semua konflik yang terjadi antar warga masyarakat penyelesaiannya selalu melalui musyawarah bersama. Adapun mengenai sanksi yang biasa diberikan kepada pelanggaran yang terjadi adalah sebagai berikut :

- Bila laki-laki yang berbuat itu lalu ada istri demikian pula wanitanya maka sanksinya ialah didenda dengan memotong seekor ayam.

Tetapi bila yang berbuat zina itu adalah orang yang sudah berkeluarga maka dendanya ialah memotong seekor kambing.

Tetapi bila pemuda dan pemudi yang berbuat zinaitu dua-dua sudah sepakat kawin dan disetujui oleh kedua orang tuanya maka penyelesaiannya ialah dikawinkan kalau memang itu disepakati.

4.4. Sistim Ekonomi.

Sebagian besar rakyat Desa Batu dan Lancirang mencari nafkah dibidang pertanian. Perbedaannya ialah bahwa rakyat Desa Batu sebagian besar sebagai petani ladang sedangkan rakyat desa Lancirang sebahagian besar hidupnya sebagai petani sawah (tanah basah) .

Tanah-tanah perladangan di desa Batu masih merupakan tanah kepunyaan bersama, artinya tanah yang kosong itu siapa saja yang berkesempatan mengolahnya itu tidak ada masalah.

Sistim perladangan di Desa Batu masih dilaksanakan secara tradisional selalu berpindah-pindah dengan tehnik pengolahan yang masih sangat sederhana. Pengolahannya masih tergantung kepada keadaan musim.

Untuk mengolah sebidang tanah untuk perladangan cukup dengan menggunakan parang penebang kayu dan pohon-pohonan kemudian setelah kering kayu-kayunya, kemudian kayu bekas pembakaran dikumpulkan pada satu tempat, setelah itu tinggal menunggu hujan untuk ditanami padi ladang atau jagung. Untuk menanam butir-butir padi dan jagung dipergunakan Asak (Kayu yang diruncing ujungnya) dan Subbek.

Kebun-kebun yang sudah diolah dengan cara yang lebih baik pada umumnya kepunyaan petani-petani pendatang dari desa-desa diluar desa Batu.

Disamping mata pencaharian berladang banyak juga diantara mereka itu yang mengumpul hasil hutan seperti rotan di sebut Mappepa atau Maruwe, mengumpul kayu atau Mabbang, membuat gula merah dari tuak atau nira yang diambil dari pohon enau. Dalam hal ini mengumpul hasil hutan (rotan, kayu dan damar memerlukan banyak tenaga kerja). Siapa yang menghimpung banyak tenaga kerja maka kemungkinan hasil yang didapat (dikumpul) akan lebih banyak. dalam hal ini oleh para pedagang rotan, kayu dan damar timbul kecenderungan untuk menguasai tenaga kerja yang banyak, sehingga tenaga kerja yang pada umumnya adalah penduduk setempat menjadi rebutan oleh pengusaha yang memiliki modal yang banyak, dalam perebutan tenaga kerja inilah biasanya timbul sengketa atau konflik , karena siapa yang punya modal yang banyak dapat menyewa tenaga yang lebih banyak pula.

Jadi di Desa Batu ini sejak dahulu sudah ada sewa menyewa tenaga, sewa menyewa tanah belum dikenal di Desa Batu.

Menurut informasi dari Kepala Desa Batu bahwa konflik yang paling sering timbul disebabkan oleh soal sewa menyewa tenaga.

Penyelesaian konflik atau pertentangan antar pemilik modal itu diselesaikan oleh Kepala Desa bersama sektor Kepolisian karena umumnya pedagang-pedagang itu orang pendatang.

Hasil utama dari Desa Batu ialah padi ladang, jagung, gula merah, rotan kayu dan damar.

Perkebunan dan peternakan merupakan usaha yang baru berkembang. Pada umumnya perkebunan dan usaha-usaha peternakan itu milik pendatang utamanya dari Tanru Tedong dan Pangkajene. Tanaman perkebunan yang mulai dikembangkan ialah cengkeh, kemiri, coklat. Sedangkan binatang ternak yang mulai diusahakan ialah : Sapi, Kerbau dan kambing merupakan binatang yang sudah lama dikenal dan dipelihara secara individual sesuai dengan kemampuan, demikian juga kuda.

Hasil-hasil yang diperdagangkan keluar daerah meliputi rotan, gula merah, kayu dan damar. Kegiatan perdagangan keluar daerah pada umumnya diusahakan pedagang-pedagang yang datang dari tanru Tedong dan yang lainnya kira-kira berjumlah 3 orang berdomisili di Desa Batu.

Sedangkan barang-barang yang didatangkan dari kotapada umumnya terdiri dari : Gula pasir, Garam, bahan pakaian dan bahan-bahan dari plastik. Hampir semua pedagang yang memiliki modal besar berdomisili di Kanru Tedong.

Ada dua pasar tempat pertemuan pedagang dan pembeli di Desa Batu yaitu pasar Barukku terbuka pada hari minggu dan pasar Compong terbuka pada hari rabu.

Karena pada umumnya rumah-rumah penduduk letaknya jauh dari pasar maka rakyat yang ingin kepasar selamanya berangkat satu hari sebelum hari pasar dan bermalam semalam di los-los pasar. Keesokan harinya barulah mereka mulai berbelanja dan so renya baru pulang.

Pengunjung pasar Barukku berdatangan pada hari Sabtu sore dan pengunjung pasar Compong pada hari Selasa. Sehingga seolah-olah masing-masing pasar itu Barukku dan Compong berlangsung dua hari dalam seminggu.

Pada umumnya pedagang yang datang menjual di kedua pasar tersebut berasal dari ibukota Kecamatan Tanru Tedong, mereka datang dengan menggunakan kendaraan motor, mobil toyota kijang sekali dalam satu minggu.

Dibidang Kerajinan tangan terutama dengan anyaman keranjang, bakul dan tikar dari rotan.

Sejak dahulu desa Batu terkenal dengan pakaian adatnya yaitu, songko Uwe (songko anyaman dari rotan), Jasek Tutuk (Jas - Tutup) dan lipak garrusu (sarung yang dikilatkan dengan kerang).

Di Desa Batu koperasi dan industri belum ada, jadi di Desa ini usaha-usaha di bidang ekonomi masih bersifat usaha individual yang dilakukan oleh anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

Di bidang penerangan listrik Desa Batu sudah mempunyai 5 buah mesin non PLN.

Di Desa Lancirang pengolahan tanah sudah lebih maju dengan menggunakan peralatan yang lebih modern seperti traktor dan irigasi, pengairan sawah sudah lama mereka kenal. Dengan kata lain panca usaha tani sudah diterapkan, sehingga panen sudah bisa dua kali setahun.

Dengan sistem pertanian yang sudah lebih maju menyebabkan rakyat bergairah sekali untuk memiliki tanah seluas mungkin. Karena mereka sudah mengerti betul bahwa tanah merupakan sumber kekayaan yang potensial asalkan diolah dengan sebaik-baiknya. Hal ini rakyat sangat hati-hati memelihara tanah hak miliknya. Keadaan seperti inilah yang sering menimbulkan sengketa antara warga masyarakat. Menurut informasi dari Ketua AMPI Rayon Lancirang sengketa yang sering timbul ialah yang disebabkan oleh karena tanah sejengkal, seperti kasus dari pendirian pabrik putu Ambon di Lingkungan I Lancirang.

Hal kedua yang sering menimbulkan konflik di Desa Lancirang dibidang ekonomi ialah masalah pembagian air untuk sawah.

Yang ketiga ialah masalah gangguan ternak piaraan seperti: itik, ayam, kambing yang sering mengganggu tanaman di sawah atau di pekarangan rumah penduduk.

Konflik-konflik seperti tersebut diatas pada umumnya dilaporkan kepada Ketua RT, kalau ketua RT tidak mampu menyelesaikannya dilanjutkan ke ketua RK, kalau ketua RK juga tidak sanggup maka dilanjutkan ke Kepala Lingkungan dan seterusnya ke Kepala Desa. Adapun sanksi dari sengketa seperti tersebut diatas antara lain ialah didenda. Bentuk denda ini bermacam-macam seperti: ada yang disuruh potong ayam untuk dimakan bersama ada yang disuruh membayar kerugian kepada orang yang dirusak tanamannya dan ada pula yang disuruh saja menyumbang ke mesjid. Denda yang paling ringan ditinjau dari segi materi ialah di sumpah dimuka kepala Desa, Imam Desa dan Kepala Lingkungan dimana sengketa itu terjadi.

Hasil utama pertanian di Desa Lancirang ialah: Padi, -

kacang -kacangan, wijen, jagung dan ubi kayu.

Perkebunan di desa Lancirang lebih maju dibanding dengan perkebunan yang ada di Desa Lancirang ialah perkebunan ubi kayu dan jambu mete yang dikelola oleh PT. Husbal.

Hasil dari perkebunan ubi kayu tersebut dibuat gaplek untuk di ekspor keluar negeri. Usaha perdagangan di Desa Lancirang meliputi :

- Hasil pertanian, beras, kacang-kacangan, wijen dan ubi kayu.
- Barang-barang campuran kebutuhan sehari-hari.
- Barang pecah belah dan barang-barang dari plastik.

Jumlah seluruh pedagang yang berdomisili di Lancirang + 81 orang, namun demikian yang memegang kendali ekonomi di Lancirang ialah pedagang dari Pangkajene ibukota Dati II Sidrap.

Pasar sebagai tempat pertemuan penjual dan pembeli terdapat satu buah terletak di wilayah lingkungan Lancirang I dipersimpangan jalan menuju ke Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo. Pasar ini merupakan satu-satunya yang terdapat di Desa Lancirang yang terbuka setiap hari rabu dan minggu. Di pasar inilah masyarakat Lancirang dan sekitarnya mengadakan kegiatan ekonomi secara bersama dua kali seminggu. Pada hari pasar selain orang-orang Lancirang banyak pula pedagang dan pembeli yang datang dari Desa Tanru Tedong, belawa, dan Pangkajene. Ada yang datang untuk menjual barangnya dan ada pula yang datang untuk membeli barang-barang kebutuhannya.

Usaha-usaha lain dibidang ekonomi antara lain sebagai berikut :

- Usaha penggilingan padi 2 buah.
- Usaha pertukangan emas 5 buah.
- Usaha pertukangan kayu 39 buah.
- Usaha Penjahitan 14 orang .
- Usaha anyam-menganyam dari bambu dan akar 36 orang .
- Bengkel sepeda 4 buah .
- Bengkel las 3 buah .
- Percetakan 1 buah .
- Pengangkutan 2 buah .
- Service Motor 3 buah .
- Salon Kecantikan 1 buah .
- BUUD - KUD 1 buah .
- BRI Unit Desa 1 buah .

Di bidang pertanian Desa Batu masih sangat sederhana, seperti telah diuraikan diatas, peralatan pengolahan tanah hanya terdiri dari parang (bangkung) Subbek dan Asak (kayu yang diruncing ujungnya). Bajak, sisir dan cangkul merupakan peralatan pertanian yang baru dikenal .

Di Desa Lancirang peralatan pertanian lebih modern,- mereka sudah menggunakan traktor, disamping bajak, sisir dan cangkul. Yang lebih penting lagi ialah bahwa mereka sudah lama menggunakan irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan pupuk serta bibit padi unggul .

Di bidang transportasi di Desa Baru pada umumnya masih dilakukan dengan menggunakan tenaga kuda (matteka) baik untuk pengangkutan orang maupun untuk pengangkutan barang . Baru beberapa tahun terakhir ini mulai masuk pengangkutan motor dan mobil. Pada saat sekarang ini kendaraan bermotor yang ada di Desa Batu sebagai berikut :

- Sepeda 10 buah
- Sepeda motor 23 buah
- Jeep (milik Kepala Desa) 1 buah
- Mini bus Colt 5 buah
- Truk 3 buah .

Di Desa Lancirang pengangkutan lebih banyak dilakukan dengan menggunakan bendi (dokar) dan mobil.. Tenaga kuda (pat teke) hanya digunakan pada tempat yang sama sekali belum ada jaringan jalannya .

Di Desa Lancirang pada saat sekarang ini terdapat alat transportasi sebagai berikut :

- B e n d i 66 buah .
- Mobil Pete-pete 22 buah .
- Mobil Colt 17 buah .
- Mobil Truk 11 buah .
- Sepeda motor 127 buah .
- S e p e d a 453 buah .

4.6. Sistem Religi .

Penduduk di kedua Desa lokasi penelitian pada umumnya memeluk agama Islam namun dalam pelaksanaannya sukar di ukur. Di Desa Batu ada sekelompok penduduk yang digolongkan Islam Khalawatiah . Mereka ini pada setiap selesai melaksanakan sembahyang lima waktu diikuti dengan suatu gerakan yang disebut rate yaitu duduk berzikir sambil meng

goyangkan badan kemuka ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Acara ini biasa dilakukan sampai tidak sadarkan diri. Mereka juga punya pimpinan tersendiri yang disebut khalifah dan punya mesjid tersendiri tempat sembahyang bersama-sama.

Selain dari pada itu terdapat pula pemeluk agama Kristen Protestan 18 orang dan pemeluk agama Hindu 9 orang. Pemeluk agama Kristen Protestan dan Hindu semuanya penduduk pendatang.

Di Desa Lancirang selain penduduk yang memeluk agama Islam juga terdapat penganut agama nenek moyang yang disebut Toani Tolotang yang jumlahnya kira-kira 17 orang dan Kristen Protestan sebanyak 17 orang pula. Pemeluk Agama - Kristen ini semuanya penduduk pendatang. Mereka pada setiap hari Minggu ke Pangkajene untuk mengikuti acara gereja. Disamping dari pada agama-agama resmi tersebut diatas juga masih banyak penduduk yang mempercayai - tentang hal-hal yang berhubungan dengan mahluk halus dan lain sebagainya.

4.7. B a h a s a .

Di Desa Lancirang seluruh penduduknya memakai bahasa Bugis baik dirumah maupun di pasar. Sedangkan di kantor, disekolah dan di mesjid-mesjid mereka memakai bahasa Indonesia di campur dengan bahasa Bugis.

Di Desa Batu penduduk memakai bahasa yang mirip dengan bahasa Maiwa yang mereka sebut bahasa Camma. Dalam pergaulan sehari-hari kadang-kadang dicampur dengan bahasa Bugis, sedangkan dikantor-kantor di sekolah dan di mesjid-mesjid biasanya di campur dengan bahasa Indonesia. Perbandingan antara ketiga bahasa tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

No.	Bahasa Bugis	Bahasa Camma	Bahasa Indonesia
1 .	Arajang	Abusungeng	Benda Keramat
2.	Masigi	Langgarak	Mesjid
3 .	Tedong	Kerabau	Kerbau
4 .	Manre	Kande	Makan

Informan = Sibole , Kepala SD. 5 Batu .

4.8 K e s e n i a n .

Satu-satunya kesenian yang sudah terkenal di Desa-Batu sejak dahulu ialah Tari Majjaga . Tarian ini dipentaskan setiap tahun pada bulan Zul Hajji atau pada waktu ada peringatan hari besar Islam, atau pada waktu ada pesta perkawinan. Dapat dimainkan semalam suntuk baik oleh anak - anak remaja maupun oleh orang-orang usia lanjut .

Pada saat mabbele (menebang kayu) untuk membuka ladang mereka menampilkan Maggasing sedangkan pada waktu musim panen mereka memainkan permainan Pani-Pani (permainan baling- baling) dan mallanca, mappadinding diadakan sesudah panen .

Sedangkan di Desa Lancirang dijumpai kesenian- kesenian seperti kecapi, biola., tari-tarian moderen seperti tari Pakurru Sumange, tari Patennung dan sebagainya . Band / orkes, group kasidah dan melagu (membaca Al Qur'an). Kecapi, biola, band dan orkes diadakan pada saat mengadakan pesta perkawinan , sedangkan tari-tarian di adakan pada saat peringatan hari-hari besar Nasional, sedangkan kasidah di adakan pada saat-saat peringatan hari-hari besar Islam .

BAB III .

GAMBARAN UMUM KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN SULAWESI SELATAN

1. ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA .

Pada zaman dahulu satuan-satuan wilayah yang ter-
kecil yang memiliki potensi untuk hidup sebagai satuan oto-
nomi dengan kelengkapan aparatur kekuasaannya , adalah
satuan wilayah yang disebut Wanua .

Wanua dipimpin oleh seorang kepala Wanua yang disebut
Arung, yang dipilih diantara beberapa orang yang berasal -
dari keluarga-keluarga yang mempunyai hak sejarah untuk
memimpin Wanua itu .

Semenjak agama Islam menjadi agama yang umum di
anut orang Bugis Makassar (abad XVII) maka pimpinan Wa-
nua diperlengkapi dengan Parewa Syarak, yaitu petugas -pe-
tugas agama Islam yang dipimpin oleh Kadhi .

Kepala Wanua (Arung) dalam melakukan pemerintahan Wa-
nua didampingi oleh Kadhi. Pada tingkatan Kampong terda-
pat Kepala Kampong dan Imam Kampong sebagai pemimpin
masyarakat yang berwibawa. Parewa adek (Kepala Wanua
dengan aparat bawahannya) dan Parewa Syarak (Kadhi de-
ngan aparat bawahannya) bersama-sama disebut Parewa -
tanah atau Parewa Wanua (aparat kekuasaan negeri)
(Mattulada . 1978) .

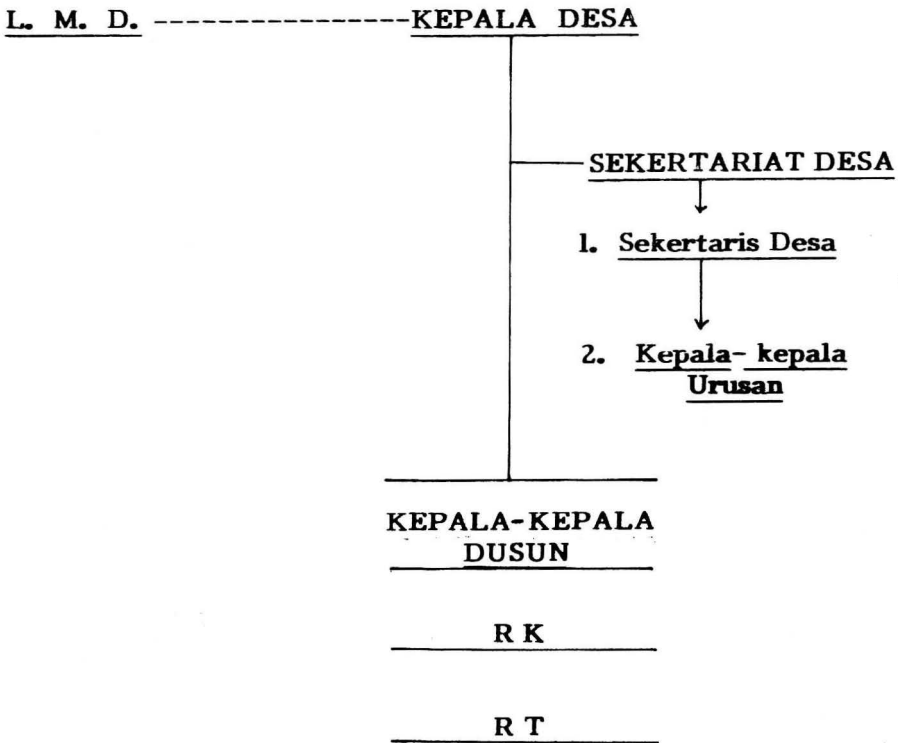
Setelah merdeka Desa-desa diatur dengan sistem ad-
ministrasi pemerintahan Nasional Indonesia maka terjadi-
lah perubahan Sistem Pemerintahan . Gaya lama yang dida-
sarkan pada nilai adat dan nilai agama mengikuti sistem -
pemerintahan gaya baru yang berdasarkan nilai-nilai Nasio-
nal Indonesia .

Menurut Sistem administrasi Nasional Indonesia peme-
rintahan Desa pada dasarnya terdiri dari seorang Kepala De-
sa dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) .

Lembaga Musyawarah Desa terdiri dari Kepala-Kepala Du-
sun, Pemimpin Lembaga Kemasyarakatan dan pemuka - pe-
muka masyarakat . Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-
nya dibantu oleh perangkat Desa, yang terdiri dari sekreta-
riat Desa dan Kepala Dusun. Sekertariat Desa terdiri dari
Sekretariat Desa dan Kepala-Kepala urusan yang meliputi
beberapa bidang pemerintahan Desa .

Struktur Organisasi Desa seperti tersebut diatas dapat di gambarkan sebagai berikut :

STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA



"Peraturan Menteri No. 1 Th. 1981"

Dalam sruktur seperti yang tergambar diatas dapat dilihat bahwa dalam pemerintahan Desa ada tiga unsur pokok yang memegang peranan penting yaitu :

1. Kepala Desa.
2. Lembaga Musyawarah Desa.
3. Perangkat Desa.

Kepala Desa sebagai pemegang kendali pemerintahan berke-wajiban mengarahkan pemerintahan Desa yang meliputi penye lenggaraan rumah tangganya sendiri.

Merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa.

Urusan Pemerintahan umum termasuk pembinaan ketenteraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa kegotong royongan masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan Pemerintahan Desa.

Seorang Kepala Desa dalam melaksanakan kewajibannya bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat dan berkewajiban memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada Lembaga Musyawarah Desa (LMD) sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.

Dari tugas dan kewajiban seperti tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa : Seorang Kepala Desa berfungsi :

1. Melaksanakan kegiatan dalam rangka menyelenggarakan urusan rumah tangga desanya sendiri.
2. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam wilayah desanya.
3. Melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah daerah.
4. Melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa.
5. Melaksanakan koordinasi jalannya pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat.
6. Melaksanakan urusan pemerintahan lainnya yang termasuk dalam tugas sesuatu instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangganya sendiri.

Disamping fungsi-fungsi seperti tersebut diatas seorang Kepala Desa juga harus menjadi Ketua Lembaga Musyawarah Desa. Jadi dengan demikian Kepala Desa adalah sebagai alat pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desanya.

Lembaga Musyawarah Desa adalah merupakan wadah permusyawaratan/permufakatan pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa bersangkutan.

Lembaga ini mempunyai tugas menyalurkan pendapat masyarakat dengan memusyawarahkan setiap rencana yang diajukan oleh Kepala Desa sebelum ditetapkan sebagai Keputusan Desa.

Permusyawaratan Lembaga ini diadakan sekurang-kurangnya sekali setahun. Adapun yang menjadi anggota Lembaga Permusyawaratan ini ialah pemuka-pemuka masyarakat dan kepala-kepala dusun yang ada di wilayah desa tersebut.

Organisasi Lembaga Permusyawaratan Desa terdiri dari atas

- Ketua , dijabat oleh Kepala Desa yang bertugas memimpin musyawarah dan membina kelancaran pemerintahan dan pembangunan desanya.
- Sekretaris, dijabat oleh sekretaris desa yang bertugas sebagai alat pelaksana administrasi, mempersiapkan musyawarah dan melakukan pencatatan Lembaga Musyawarah Desa.
- Anggota terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang berkewajiban memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa kemudian menyalurkan dalam rapat Lembaga Masyarakat Desa.

Perangkat desa terdiri dari Sekretariat Desa yang meliputi Sekretariat Desa dan Kepala-kepala urusan yang jumlahnya minimal 3 urusan, maksimal 5 urusan dan Kepala-kepala dusun.

Sekretaris Desa mempunyai tugas dan kewajiban sebagai Pembantu Kepala Desa dan memimpin sekretariat desanya, menjalankan administrasi Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan pelayanan administratif kepada-kepala Desa.

Dengan demikian Sekretaris Desa berfungsi :

- a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan.
- b. Melaksanakan urusan Keuangan.
- c. Melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- d. Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila kepala desa berhalangan.

Kepala Urusan bertugas membantu Sekertaris Desa dalam bidang-bidang tertentu yang meliputi : Urusan Pemerintahan Desa, Urusan Pemerintahan Desa, urusan perekonomian dan pembangunan, urusan kesejahteraan (kerohanian) , urusan keuangan dan urusan umum .Dalam melaksanakan tugasnya Kepala urusan masing-masing bertanggung jawab kepada sekertaris Desa.

- a. Melaksanakan kegiatan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan serta ketenteraman dan ketertiban diwilayahnya masing-masing.
- b. Melaksanakan Keputusan Desa diwilayah kerjanya.
- c. Melaksanakan kebijaksanaan Kepala Desa.

Dalam wilayah setiap dusun atau lingkungan di dapati pula Rukun Kampung (RK) dan dalam wilayah setiap RK didapati pula Rukun Tetangga (RT) .

RK dan RT ini dalam kenyataannya merupakan perpanjangan tangan dari Kepala Desa dalam melaksanakan instruksi dan perintah dari Bupati dan Camat.

Ketua RK dan RT kelihatannya hanya berfungsi sebagai koordinator kegiatan kerja bakti, gotong royong dan ronda malam.

Dari uraian seperti yang telah dikemukakan diatas maka dalam kepemimpinan pemerintahan Kepala Desa berfungsi sebagai :

1. Administrator pemerintahan desa dan bertanggung jawab ke pada kepala Daerah melalui camat .
2. Pemelihara ketertiban dan keamanan dalam lingkungan desanya.
3. Pelaksana instruksi-instruksi dari kepala kecamatan.
4. Pengawas terhadap pelaksanaan instruksi-instruksi dan peraturan dalam organisasi Rukun Tetangga (RT) dan organisasi Rukun Kampung.

2. SISTIM KEPEMIMPINAN .

Sesuai dengan hasil penemuan arkeologi di Sulawesi Selatan dapat disimpulkan bahwa sejak jaman dahulu kala telah ada manusia yang hidup di gua-gua secara bersama (bermasyarakat) .

Dengan adanya kehidupan bermasyarakat, sejak itu pula mereka telah mengenal unsur-unsur pimpinan, yang disebut Kepala Keluarga atau Kepala Suku. Mereka memilih diantara anggota nya yang kuat lahir dan batin yang mempunyai keunggulan dari anggota masyarakat lainnya. Ia diperlukan oleh anggotamasyarakatnya karena ia mempunyai keistimewaan yang sanggup mengelakkan dan mencegah mala petaka yang disebabkan oleh kekuatan gaib. Karena itu tugas-tugas seorang Kepala Suku ialah memelihara keseimbangan dalam masyarakat sehingga keamanan dan kesejahteraan akan tetap terjamin.. Dengan demikian pemimpin adalah merupakan kebutuhan pokok manusia dalam hidupnya sejak dahulu.

Sebagai salah satu unsur pokok dalam masyarakat maka kepemimpinan ini telah berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebudayaan manusia itu sendiri. Kepemimpinan dalam perkembangannya sampai saat ini dapat dibedakan atas :

1. Pemimpin Formal.
2. Pemimpin Formal Tradisional.
3. Pemimpin Informal.

Untuk lebih jelasnya setiap jenis kepemimpinan tersebut diatas diuraikan sebagai berikut :

1. Kepemimpinan Formal .

Yang dimaksud dengan kepemimpinan formal ialah :
Kepemimpinan yang terwujud melalui saluran administrasi resmi dari pemerintah pusat/ daerah seperti : Kepala Desa bupati kepala daerah tingkat II dan gubernur kepala daerah tingkat I, semuanya diangkat dengan SK oleh atasannya. Mereka ini dalam sistem kepemimpinan nasional disebut Pejabat. Menurut Prof. DR. Mattulada pemimpin semacam ini lebih tepat disebut penguasa, karena mereka inilah yang diberi kekuasaan formal. Upaya-upayanya berupa tindakan tindakan kekuasaan tidak banyak memerlukan prakarsa yang inovatif. Karena itu penguasa dalam menjalankan kewajibannya harus bersikap memihak kepada atasannya. Sebagai suatu sistem, penguasa (pemimpin formal) mengenal garis atasan dan bawahan (Mattulada, 71) .

Pengangkatan seorang pemimpin formal harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bertakwa kepada Tuhan yang maha esa.
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 45.
3. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa.
4. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan RI yang berdasarkan UUD 45, seperti G. 30 S. PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya.
5. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti.
6. Tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti, karena pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun
7. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus kecuali bagi putera desa yang berada di luar desa yang bersangkutan.
8. Sekurang-kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima)

tahun setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun.

9. Sehat jasmani dan rohani.
10. Minimal berijazah Sekolah Lanjutan Pertama atau yang berpengalaman yang sederajat dengan itu (UU No 5 Thn. 1979).

Masa jabatan seorang pemimpin formal ditetapkan oleh pemerintah seperti misalnya Kepala Desa masa jabatannya 8 tahun, Kepala daerah Tk. II dan Kepala Daerah Tkt.I masing-masing 5 (lima) tahun.

Selama masa jabatannya seorang Kepala Desa berkewajiban menentukan rencana pembangunan desanya. Berhak menerima penghormatan dari rakyat desanya, dan menerima imbalan jasa baik berupa materil maupun non materil.

Disamping itu Kepala Desa berkewajiban merencanakan anggaran belanja dan pendapatan Desa setiap tahun, berkewajiban mengayomi rakyatnya, berkewajiban memperhatikan segala saran dan pendapat-pendapat dari masyarakat, berkewajiban mendorong partisipasi masyarakat Desa dalam rangka mengembangkan gotong royong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Dan yang paling penting ialah melaksanakan segala perintah dan instruksi dari bupati dan camat.

Menurut tradisi seorang Kepala Desa (pemimpin formal) setelah pengangkatannya dia harus memelihara simbol-simbol tertentu yang merupakan perlambangkepemimpinannya.

Rumah seorang Kepala Desa harus terpelihara bersih, lebih besar dari rumah rakyat biasa. Dilengkapi dengan rumah ronda malam atau lebih terkenal sekarang dengan istilah siskamling.

Pakaiannya harus lebih teratur dan bersih, harus punya warna pakaian tertentu untuk hari-hari tertentu, misalnya pakaian putih-putih dipakai pada hari senin dan selasa, warna kaki untuk hari rabu, kamis dan sabtu.

Sedangkan hari jumat biasanya digunakan untuk berolabraga atau bekerja bakti, misalnya memperbaiki selokan, membuat jalanan kampung dan sebagainya.

Demikian pula tingkah lakunya harus tingkah laku yang terpuji agar dapat menjadi contoh kepada masyarakat. Sehubungan dengan tingkah laku ini tidak jarang pemimpin formal yang diprotes oleh rakyatnya karena dianggap melang

gar kesopanan/ moral seorang pemimpin .

Menjadi tradisi masyarakat pedesaan di Sulawesi Selatan bahwa seorang pemimpin harus dipanggil atau disapah dengan kata-kata tertentu misalnya Kepala Desa dipanggil Pak Desa atau Petta Desa, Imam Desa dipanggil Pak Imang, Puang Imang, Puang kali atau Petta Kalie.

Kepala Lingkungan dengan Pak lingkungan, Ketua RK dipanggil dengan Pak RK dan sebagainya.

Panggilan/ sapaan-sapaan penghormatan seperti ini hanya menjadi miliknya selama ia dapat memiliki sifat-sifat atau moral yang terpuji, yang menjadi contoh kepada masyarakat.

Bila sifat terpuji ini tidak dapat dipertahankannya maka serentak rakyat akan berbalik mengutuknya.

Cara pengangkatan seorang pemimpin khususnya pemimpin formal di pedesaan Sulawesi Selatan pada umumnya sama dengan cara-cara yang ditempuh untuk pengangkatan pemimpin di daerah-daerah pedesaan di wilayah lain di Indonesia yaitu : Bahwa seorang Kepala Desa sebelum ia memangku jabatannya sebagai Kepala Desa, dia terlebih dahulu harus melalui upacara pelantikan atau penyumpahan.

Penyumpahan ini dilakukan oleh pejabat atasannya yaitu Bupati Kepala Daerah setempat atau camat bila bupati berhalangan.

Upacara pelantikan ini dihadiri oleh seluruh pemuka masyarakat setempat, pegawai balai desa, Tripida Kecamatan, Kepala-kepala Dines dan Jawatan Vertical setempat dan isteri-isteri dari pejabat-pejabat desa bersangkutan atau sekarang lebih dikenal dengan Dharma Wanita.

Dalam upacara pelantikan ini diadakan pembacaan SK Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa tersebut oleh salah seorang pegawai Daerah atau pegawai Kecamatan yang ditunjuk.

Setelah itu diadakanlah penyumpahan oleh pegawai Kantor Agama Kecamatan. Bila dia seorang yang beragama Islam maka penyumpahannya dengan memakai Al Quran. Tetapi kalau dia seorang yang beragama Kristen maka penyumpahannya dengan memakai Injil.

Setelah acara penyumpahan maka diadakanlah pemasangan tanda jabatan selesai disusul pula dengan kata-kata pengarahan oleh Bupati atau Camat yang melantiknya.

Menurut catatan yang ada ternyata bahwa diDesa Batu mulai dari kepala desa pertama sampai dengan yang keempat semuanya adalah termasuk keluarga Bangsawan dan penduduk-
desa.

Pada umumnya mereka mempunyai hubungan keluarga dengan bangsawan-bangsawan yang memegang peranan di ibukota ke camatan Tanru Tedong dan Pangkajene bahkan di tingkat Propinsi sulawesi Selatan demikian juga di DPRD tingkat I. Pengangkatan mereka semuanya melalui penunjukkan kecuali Kepala Desa III dipilih langsung oleh rakyat. Keadaan ini berlangsung sampai pada tahun 1978.

Pada tahun 1978 ditunjuk Letnan H.M.Saleh (TNI AD) menggantikan Andi Andang oleh Bupati Kepala Daerah Sidrap Letkol H. Arifin Nukman menjadi Kepala Desa.

Letnan H.M. Saleh adalah seorang bekas anggota pasukan dari Letkol H. Arifin Nukman, sekarang beliau adalah sebagai Kepala Kantor Legiun Veteran Sulawesi Selatan dan Tenggara di Ujung Pandang.

H. Arifin Nu'mang dan H.M. Saleh juga sama-sama berasal dari Rappang Kecamatan Panca Rijang. Selain itu perlu pula dicatat bahwa Letnan H.M. Saleh juga masih satu Korps dengan Bupati KDH Sidenreng Rappang sekarang yaitu Letkol Opu Sidiq. H.M. Saleh sebagai Kepala Desa berpendidikan formal hanya sampai tingkat Sekolah Menengah , namun dalam menjalankan tugasnya sehari-hari termasuk Kepala Desa yang paling berhasil diantara Kepala Desa yang ada di wilayah Kabupaten - Sidenreng Rappang. Karena betul-betul ia dapat menyesuaikan perencanaan pembangunan Desanya dengan keadaan kondisi wilayah dan penduduk yang dipimpinya, sehingga pelaksanaan - program tersebut dapat berjalan dengan lancar .

Merupakan program utama yang di prioritaskan pelaksanaannya ialah pembangunan dibidang pertanian yang menunjang peningkatan kemampuan ekonomi rakyat .

Program-program tersebut terdiri dari :

- Pembangunan Pertanian yaitu perعتakan sawah-sawah baru, pembuatan bendungan-bendungan untuk pengairan.Pembukaan perkebunan baru yang meliputi penanaman cengkeh, coklat dan kemiri.
- Pembangunan Prasarana jalan dan jembatan untuk memperlancar hubungan dari satu desa ke desa yang lain demi-

mengatasi keadaan terpencil dari desa-desa yang ada di wilayahnya .

- Pembangunan mental Sprituil dengan jalan meningkatkan-pengajian- pengajian untuk belajar membaca Al Qur'an . Mempercepat dan memberi fasilitas pembangunan gedung-gedung SDbaik SD Inpres maupun Non Inpres .

Untuk menunjang pelaksanaan Program tersebut maka oleh beliau telah diusahakan :

1. Sebuah Buldozer yang di gunakan untuk pembuatan bendungan-bendungan air, pencetakan sawah baru, pembuatan jalan-jalan kampung dan jembatan .
2. Mengeluarkan Instruksi langsung kepada semua Kepala Lingkungan untuk berusaha agar rakyat menanam 1000 pohon coklat atau kemiri setiap rumah tangga, bagi yang tidak senang berkebun harus memelihara kambing atau sapi ,mini mal ayam dirumah masing- masing . Instruksi ini dikeluarkan melalui rapat yang diadakan pada tanggal 3 Desember 1983 yang turut dihadiri pula oleh pe nulis .
3. Juga melalui rapat tersebut diatas di instruksikan agar se tiap RT diadakan minimal satu tempat pengajian yang dikoor dinir oleh imam-imam lingkungan .
4. Sedangkan guru-guru SD yang berasal dari luar desa yang be lum punya rumah . .sendiri, diusahakan mendapatkan rumah tempat tinggal yang berdekatan dengan sekolah tempat kerjanya . Adapun yang masih belum berkeluarga ditampung di rumah Kepala Desa/ sendiri. Hal ini dapat dilaksanakan kare na Rumah Kepala Desa cukup besar dan luas.

Menurut pengakuan beliau bahwa ia jarang masuk duduk dikantor Dia lebih senang di lapangan dari pada duduk di kursi. Penyelesai an administrasi semuanya dilaksanakan oleh Sekertaris bersamadengan Kepala-Kepala Urusan. Nanti bila ada hal-hal yang pen ting barulah beliau datang untuk menyelesaikannya bahkan sering sekali masalah-masalah di nes itu diselesaikan saja di rumah .

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka se tiap perintah dan instruksi dari Bupati atau Camat, sebelum di laksanakan maka terlebih dahulu dimusyawarahkah dengan Imam Desa untuk mencarikan dasar dan dalil-dalil yang ada dalam Al Qur'an atau Hadist, setelah itu barulah diteruskan kepadarakyat untuk dilaksanakan, melalui masjid yang ada disetiap kampung

Hal ini menurut beliau sangat baik karena pelaksanaan perintah itu tidak perlu lagi diikuti, kita tinggal menunggu hasilnya saja .

Cara pelaksanaan program-program dari atas menurut beliau ialah : setelah perintah itu diterima harus dilihat bidang apa yang paling relevan dengannya untuk kemudian dimusyawarahkan pelaksanaannya dengan petugas di bidang itu. Jadi dengan demikian semua aparat berfungsi dengan baik dan mereka puas. Saya tidak suka mengambil hak orang lain, kata beliau .

Sifat kepemimpinan dari Letnan H.M Saleh yang Demokratis ini dapat dilihat pada rapat-rapat atau musyawarah yang diadakan di Balai Desa. Sebagai contoh dapat kami kemukakan rapat yang diadakan pada tanggal 3 Desember 1983 di Balai Desa yang dihadiri oleh semua pemuka masyarakat, kepala-kepala sekolah yang ada di wilayah Desa Batu .

Setelah waktu yang ditetapkan yaitu jam 10.00 masuk maka Sekretaris Desa melapor dan memberitahu bahwa sekarang sudah waktunya rapat dibuka, maka spontan beliau menjawab saudara Sekertaris saja yang memimpin rapat karena nanti saya memberikan penjelasan .

Oleh Sekertaris Desa rapatpun dibuka dengan ucapan " Bismillahir Rahmanir Rahim " . Adapun : acara rapat pada waktu itu ialah :

- 1 - P e m b u k a a n
- 2 - Pengarahan oleh Kepala Desa
- 3 - Laporan kegiatan masing-masing Kepala Lingkungan/Imam Desa .
- 4 - Tanggapan dan saran-saran
- 5 - P e n u t u p

Setelah rapat dibuka maka pimpinan rapat mempersilahkan Kepala Desa untuk memberikan pengarahan. Selesai pengarahan - Kepala Desa, tibalah giliran Kepala-Kepala Lingkungan untuk memberikan laporan kegiatan yang telah dikerjakan. Selesai laporan kegiatan Kepala-Kepala Lingkungan dilanjutkan dengan tanggapan dan saran-saran

Diantara Kepala Lingkungan yang hadir ada seorang diantaranya mengajukan keluhan bahwa banyak tanaman yang rusak karena binatang-binatang piaraan yang lepas berkeliaraan .

Menanggapi masalah ini Kepala Desa tidak langsung menyalahkan yang empunya binatangpiaraan yang lepas tetapi beliau terlebih dahulu menanyakan apakah kebun Saudaraitu dipagar atau

tidak ? dijawab oleh kepala Lingkungan bersangkutan bahwa tidak dipagar .

Oleh kepala Desa diinstruksikan agar yang punya kebun itu dipagar dan binatang ternak supaya dibikinkan kandang dan dijaga. Karena kebun itu harus ada pagar dan binatang piaraan itu harus ada kandang dan dijaga .

Dengan cara-cara seperti itu nampak jelas bahwa beliau u dalam mengambil keputusan tentang sesuatu tidak tergesa-gesa dan hati-hati. Menurut informasi dari sekretaris Desa bahwa jarang sekali ada masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan karena Bapak Kepala Desa betul-betul berusaha mencari jalan pemecahannya. Kalau ada suatu program dan perintah camat yang belum jelas maka beliau sendiri mintakan penjelasan dari camat, demikian juga halnya dengan pemuka-pemuka masyarakat selalu dimintai pendapat dan saran-sarannya tentang sesuatu masalah sebelum diputuskan .

Penyelesaian sengketa atau konflik yang terjadi antar warga masyarakat, selalu diserahkan dulu kepada RT untuk diselesaikan, nanti kalau RT tidak sanggup barulah dibawah ke RK demikian selanjutnya ke Kepala Lingkungan dan Kepala Desa.

Dalam menyelesaikan setiap konflik mereka selalu memutuskan melalui musyawarah, karena segala sesuatunya harus dimufakati . Kata mufakat bersama itulah yang paling tinggi dan paling benar yang oleh mereka disebut Sitaro Ria le (permufakatan bersama) .

Menurut mereka bahwa semua keputusan yang diambil bersama itu kita pulalah yang akan menerima segala akibat baik atau buruk . Oleh karena itu bila telah disepakati harus dilaksanakan dan dipatuhi bersama . Menurut Kepala Desa - Batu konflik yang sering terjadi di Desanya ialah : Dalam hal sewa menyewa tenaga kerja / mata pencaharian khususnya mengumpul rotan .

Ada perbedaan sedikit antara kepemimpinan Kepala - Desa Batu dan Lancirang. Di Desa Lancirang Kepala Desa - dalam menerima suatu program, perintah atau instruksi dalam pelaksanaannya langsung diteruskan kepada rakyat, tanpa melaluipendekatan adat tradisi dan agama utamanya agama Islam. Hal ini menyebabkan bahwa instruksi dan perintah dari Bupati atau camat itu dalam pelaksanaannya harus di kontrol terus. Bila tidak diikuti dengan kontrol dari petugas maka sering mengalami kemacetan .

Jadi ada perbedaan teknik pendekatan yang dipakai oleh kedua Kepala Desa tersebut walaupun keduanya sama-sama dari ABRI AD .

Kepala Desa Batu senantiasa memainkan peranan ganda yaitu peranan sebagai pemimpin masyarakat desa dan sebagai pejabat bawahan camat . Sedangkan Kepala Desa Lancirangsemata-mata hanya memainkan peranan sebagai pejabat bawahan camat. Hal ini mungkin disebabkan karena pengalaman karir selama dalam dinas militer. Kepala Desa Batu selama di militer memang terus menerus sebagai pemimpin pasukan dilapangan, sedangkan Kepala Desa Lancirang dalam karir militernya lebih banyak berkecimpung dalam bidang administrasi dan keuangan .

2. Kepemimpinan Formal Tradisional .

Yang dimaksud dengan pemimpin formal tradisional ialah pemimpin yang pengangkatannya melalui pemilihan oleh rakyat, kemudian disahkan oleh pemerintah . Jadi pemimpin tersebut dipilih langsung oleh anggota masyarakat kemudian hasil pemilihan tersebut disahkan dan ditetapkan oleh pemerintah. Dengan kata lain pemimpin formal tradisional ialah : Pemimpin yang memperoleh sumber kewenangan dari nilai-nilai dan aturan-aturan dari sistim jaringan politik Nasional dan dari nilai-nilai dan aturan-aturan dari sistim jaringan politik lokal atau tradisional .

Sebenarnya kepemimpinan semacam ini merupakan penggabungan dua bentuk kepemimpinan dalam diri satu orang. Menurut Prof. DR. Mattulada kepemimpinan semacam ini dapat diduga efektif tetapi dalam kegiatannya bahwa sering pemimpin tersebut melakukan satu pilihan yang berlawanan dengan salah satu panggilan dari jenis kepemimpinan yang ditanganinya . Keadaan ini terjadi pada masa jabatan Kepala Desa ke III yang bernama Wa'Duha di desa Batu, sedangkan di desa Lancirang pada masa jabatan Puttiro sebagai Kepala Desa .

Pemimpin formal tradisional ini memperoleh kewenangan dari nilai-nilai dan aturan Nasional tetapi juga tidak mengabaikan nilai-nilai dan aturan-aturan lokal atau tradisional. Persyaratan-persyaratan yang resmi harus dipenuhi disamping persyaratan lokal (Tradisional yang berlaku dikalangan masyarakat pedesaan sejak dahulu kala) .

Persyaratan lokal tersebut adalah sebagai berikut :

1. To Malebbi artinya orang mulia, terutama dilihat dari keturunannya .
2. To Acca artinya orang pandai / mampu .
3. To Warani artinya orang berani .
4. To Sugi artinya orang kaya .

Masa jabatan resmi , hak dan kewajiban-kewajibannya tidak jauh berbeda dengan hak dan kewajiban pemimpin formal yang telah dikemukakan diatas. Mengenai atribut atau simbol-simbol kepemimpinannya disamping yang telah disebutkan diatas juga dia diharuskan pula memelihara simbol-simbol kepemimpinan tradisional yang masih berlaku , seperti simbol-simbol pemersatu seperti benda-benda keramat atau arajang-arajang yang bermacam-macam bentuknya.

Ada yang berbentuk bendera, ada yang berbentuk senjata tajam dan ada pula yang berbentuk Naskah (lontara) bahkan ada berupa pesan-pesan lisan yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi .

Pengangkatan dan penyempahan seorang pemimpin formal tradisional adalah sama dengan upacara pengangkatan dan penyempahan pemimpin formal . Pada upacara penyempahan itu diserahkan SK pengangkatan dan simbol kepemimpinan yang berupa bintang jabatan pada saku baju sebelah kiri. Dengan adanya bentuk kepemimpinan formal tradisional yang merupakan gabungan antara pejabat dan pemuka masyarakat dalam diri seseorang . Dalam kenyataan pada akhirnya unsur formal itu menjadi lebih diperkuat oleh unsur tradisionalnya. Hal ini dapat dilihat misalnya seorang keturunan bangsawan yang diangkat sebagai camat atau Kepala Desa . Orang tersebut ada kecenderungan untuk menonjolkan kebangsawanannya dari jabatannya sebagai Camat atau Kepala Desa., sehingga dalam hubungannya dengan rakyat lebih kelibatan bahwa rakyat lebih cenderung memperlakukan dia sebagai bangsawan dari pada sebagai pejabat (Camat/ Kepala Desa). Hal ini mungkin disebabkan oleh karena pejabat ditingkat atas juga masih banyak yang keturunan bangsawan yang masih ada hubungan kekeluargaan dengan pejabat-pejabat Desa .

Hal ini menyebabkan banyak simbol-simbol dan tingkah laku hubungan sosial yang pada waktu sebelum jadi Camat atau Kepala Desa sudah tidak mendapatkan perhatian. Tetapi sete

lah dia diangkat sebagai camat atau Kepala Desa dipertajam kembali, seperti misalnya tata cara penyampaian berita atau undangan harus dengan tata cara tertentu, pakaian tertentu, jumlah personil tertentu, demikian pula panggilan atau sapaan-sapaan yang tadinya hanya dipanggil Pak Camat atau Pak Desa atau Pak Imang dan sebagainya lalu berubah menjadi Petta Camae atau Petta Desa atau Puang Imang dan sebagainya .

Perubahan-perubahan seperti ini biasanya dimulai dan diralangan keluarga sendiri oleh orang-orang tertentu, sebagai salah satu perwujudan rasa bangga. Dengan perubahan-perubahan yang terjadi seperti yang disebut di atas dimaksudkan menambah kokoh dan kuatnya kedudukan seseorang pemimpin sebagai Camat atau Kepala Desa . Pengaruhnya dan wibawanyapun terhadap rakyat semakin kuat dan meluas apa lagi kalau sudah diliputi oleh rasa kekebalan .

Dalam rangka pelaksanaan UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa, ada kecenderungan menerapkan pola kepemimpinan formal tradisional ini. Hampir semua calon Kepala Desa yang diajukan itu, berasal dari pemuka-pemuka masyarakat setempat, yang pada umumnya secara informal dengan aklamasi, memang rakyat telah memilihnya karena memang dia sudah dianggap sebagai pemimpin mereka . Jadi pelaksanaan pemilihan/pemungutan suara yang dilaksanakan secara resmi hanyalah merupakan rekonstruksi untuk memformalkan pembagian suara diantara calon-calon yang diajukan .

3. Kepemimpinan Informal .

Kepemimpinan informal ialah kepemimpinan yang berkembang sendiri dalam masyarakat tanpa melalui prosedur administrasi pemerintahan Nasional/Daerah .

Menurut Prof. DR. Mattulada, pemimpin semacam ini lebih tepat disebut pemuka masyarakat yaitu orang-orang, yang tidak ikut ambil bagian dalam pemerintahan resmi di Desa tetapi pendapat, saran dan buah pikirannya diterima dan dipatuhi oleh masyarakat. Jadi sebenarnya mereka ini lebih kreatif dibanding dengan pemimpin formal atau penguasa-penguasa/pejabat-pejabat. Karena pejabat itu lebih bersifat pelaksana perintah atau instruksi dari atasannya saja .

(Mattulada , 71) .

Seorang pemimpin informal memperoleh kewenangan dan kekuasaan dari nilai-nilai dan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat setempat .

Karena itu kepemimpinan informal ini tidak mengenal garis atas dan bawahan, mereka hanya mengenal garis lingkaran kekuasaan (pengaruh). Besar kecilnya pengaruh seseorang pemimpin informal dapat dilihat dari luasnya lingkaran pengaruhnya . Mereka mengenal garis ikutan dan pengikut.

Pengikut dari seorang pemimpin informal secara horizontal tidak hanya terbatas pada wilayah desa tertentu tetapi bisa saja lebih luas .

Secara vertikal pengaruhnya tidak hanya pada lapisan bawah dan menengah tetapi dapat sampai lapisan yang lebih tinggi lagi.

Persyaratan bagi seorang pemimpin informal lebih bersifat pribadi atau sifat kemampuan pribadi . Hal ini dapat dilihat pada syarat-syarat yang berlaku sejak dahulu kala bagi seorang calon pimpinan sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. To Malebbi artinya orang mulia terutama dilihat dari keturunannya dan tingkah lakunya.
2. To Acca artinya orang pandai atau berpengalaman .
3. To Warani artinya orang yang berani.
4. To Sugi artinya orang kaya.

Menurut kenyataan bahwa jarang sekali orang yang dapat memiliki ke 4 persyaratan tersebut di atas. Paling banyak hanya 3 syarat yang dipenuhi.

Karena orang yang memiliki ke 4 persyaratan diatas hanyalah orang yang betul-betul sempurna, ini sukar didapati.

Disamping persyaratan tersebut di atas juga sangat diperlukan ketekunan dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat untuk mencarikan jalan pemecahannya.

Pada saat sekarang ini dapat dilihat dimana-mana bahwa umumnya pemimpin informal ini oleh pejabat (penguasa) selalu dilibatkan dalam kegiatan pembangunan Desa melalui Lembaga Musyawarah Desa (LMD).

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam UU No.5/1979 tentang keanggotaan LMD. Ini suatu bukti bahwa peranan pemimpin informal dalam pembangunan suatu Desa sangat menentukan.

Salah satu hak yang penting dari seorang pemimpin informal ialah dihormati dan diikuti.

Sedangkan kewajiban-kewajibannya ialah wajib memupuk rasa

solidaritas dari seluruh pengikut-pengikutnya dan bertanggung jawab atas kemaslahatan pengikut-pengikutnya.

Dia harus berusaha melaksanakan apa yang ia telah tetapkan sebagai yang benar agar pengikut-pengikut tetap setia kepada danya .

Yang menunjang kesetiaan pengikut-pengikutnya itu ialah kemampuan memelihara kelebihan-kelebihan yang ia miliki agar tetap terpercaya untuk diikuti. Satu hal yang perlu menjadi perhatian seorang pemimpin informal ialah Agar nilai-nilai dan aturan-aturan yang menjadi warisan masyarakatnya turun temurun dapat terpelihara dengan baik.

Bila satu waktu ia ternyata mengakibatkan tata nilai tersebut maka secara spontan pengikutnya akan melaknat dan membelakanginya .

Di Sulawesi Selatan ini ada dua sumber tata nilai yang perlu dijaga keutuhannya agar tetap terpendang sebagai pemimpin masyarakat, yaitu : Pangngadereng yang meliputi : Adek yaitu pola tingkah laku dan hubungan sosial manusia . Bicara yaitu yang menyangkut hak-hak seseorang dalam hidupnya. Rapang yaitu contoh-contoh atau perumpamaan. Wari yaitu asas yang mengatur segala sesuatu sesuai dengan tempat sebenarnya. Yang kedua ialah Agama Islam atau yang lebih dikenal dalam istilah Bugisnya Syarak.

Besar kecilnya pengaruh dan wibawa seorang pemimpin informal tergantung kepada seberapa jauh ia menghayati Pangngadereng dan Syarak itu sendiri. Karena kepadanya semua harapan untuk tetap terpeliharanya tata nilai itu tergantung .

Tata cara pengangkatan seorang pemimpin informal tidaklah sekomplek dengan cara pengangkatan pemimpin formal. Setelah berkonsultasi dengan Arajang atau simbol kesatuan masyarakat maka resmilah ia sebagai pemimpin masyarakat.

Berkonsultasi dengan Arajang atau simbol-simbol kesatuan masyarakat berarti berkonsultasi dengan orang-orang tua kampung atau pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa. Dahulu sebelum merdeka semua masalah dan kegiatan-kegiatan di kampung dapat diselesaikan oleh golongan pemimpin informal.

BAB IV.

POLA KEPEMIMPINAN MASYARAKAT PEDESAAN DI BIDANG SOSIAL

Organisasi-organisasi sosial di kedua Desa lokasi penelitian menurut kegiatan dan kelompok anggotanya dapat dibedakan atas enam macam yaitu :

1. Kepemudaan.
2. Kewanitaan.
3. Keolah Ragaan.
4. Keamanan / Ketertiban.
5. Pembangunan dan Kemasyarakatan.
6. Politik.

- Bidang Kepemudaan .

Ada dua organisasi yang bergerak dibidang kepemudaan yaitu masing-masing :

AMPI = Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia.

Di tingkat Desa organisasi Kepemudaan AMPI ini berstatus Rayon. Jadi ada AMPI Rayon Desa Batu dan Rayon Desa Lancirang.

Organisasi ini adalah merupakan wadah penampungan kegiatan dan aspirasi pemuda di Desa untuk mengajak berpartipasi secara bersama dalam pembangunan. Maksud utamanya ialah Mengarahkan kegiatan masyarakat pemuda untuk menunjang kelancaran dan kesuksesannya pembangunan di Desa.

Adapun struktur organisasinya adalah terdiri dari ketua, Sekretaris, Bendahara dan dibantu oleh seksi-seksi OlahRaga Pendidikan dan Kesehatan. Pusat kegiatannya di Kantor Kepala Desa. Ini dimaksudkan agar supaya setiap waktu dapat diarahkan oleh Kepala Desa.

Untuk menjadi pemimpin organisasinya ditetapkan oleh Camat berdasarkan usul dari Kepala Desa .

Umumnya yang ditunjuk menjadi Pimpinan AMPI di Desa ialah pemuda yang dapat kerja sama dengan Kepala Desa. Karena dia adalah merupakan pendamping Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.

Ketua AMPI Desa Batu adalah aparat Desa. Sedangkan Ketua AMPI Desa Lancirang adalah seorang Kepala SD. Anggota-anggota organisasi ini terdiri dari pemuda-pemuda yang berdomisili di Desa tersebut tanpa membedakan agama, kepercayaan dan keturunan.

Kegiatan-kegiatan yang diharapkan dapat dikembangkan sesuai dengan seksi-seksi yang telah ditetapkan dalam susunan kepengurusannya ialah : Olah Raga, terutama menunjang pema-sarakatan olah raga, pendidikan dan kesehatan. Tetapi dalam kenyataannya Ketua AMPI dipedesaan hanya merupakan koordinator pengarahannya massa, seperti misalnya kerjabakti membuat jalan kampung atau membersihkan saluran pengairan atau memperbaiki jembatan Desa. Peranan ini meningkat pada masa-masa kampanye pemilihan umum AMPI merupakan juru kampanye Golkar yang ampuh.

- **Pramuka (Praja Muda Karana)** merupakan pendidikan non formal.

Di Desa-desanya tersebar di sekolah-sekolah yang masing-masing berstatus Gugus Depan (Gudup). Pramuka ini merupakan wadah pendidikan anak-anak di luar jam-jam pelajaran di sekolah Struktur organisasinya terdiri dari mabigus (majelis pembina gugus depan). Ini biasanya dijabat oleh Kepala Sekolah. Pembina gugus depan terdiri dari pada pembina puteri dan putera.

Di Desa Batu karena sekolah baru tingkat SD maka anggota Pramukanya barulah pada tingkat Siaga dan Penggalang saja. Sedangkan di Desa Lancirang sudah sampai ke tingkat Pen-dega dan penegak karena sudah ada Sekolah Tingkat Menengah Pertama (SMP).

Pramuka di Desa Batu baru mulai berkembang dibandingkan di Desa Lancirang atau di ibukota kecamatan.

Menjadi pimpinan Pramuka pada setiap gudup dipilih dari kepala Sekolah dimana gudup itu berada atau dari salah seorang anggota BP3 sekolah tersebut.

Kegiatan-kegiatan Kepramukaan di kedua Desa ini pada umumnya diaktifkan pada masa-masa libur sekolah, menghadapi hari-hari nasional atau kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pemerintah Dati II atau Kecamatan.

Dalam hal ini pemimpin Pramuka berperan seperti koordinator pengarahannya massa pelajar dan anak-anak sekolah yang berseragam coklat.

- **Bidang Kewanitaan.**

Organisasi Sosial di bidang kewanitaan di Desa Batu ialah : Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Arisan keluarga guru-guru SD.

Sedangkan di Desa Lancirang organisasi di bidang kewanitaan

ialah : PKK , Dharmawanita dan arisan keluarga guru-guru dan pegawai Desa .

- PKK adalah wadah untuk menampung kegiatan-kegiatan kewanita-an di Desa. Ada Pkk Desa Batu dan ada pula PKK Desa Lancirang. Organisasi ini bergerak dibidang kesejahteraan keluarga, Pendidikan keluarga dan usaha-usaha untuk m,eningkatkan keterampilan wanita-wanita Desa. Seperti keterampilan mengatur Rumah Tangga., Pemeliharaan Kesehatan, masak memasak dan jahit menjahit termasuk pula industri rumah tangga .

Pelaksanaan kegiatan seperti tersebut diatas diadakan pada tempat-tempat tertentu setiap lingkungan dalam wilayah Desa.

Struktur organisasinya adalah terdiri dari pada Ketua, sekretaris, Bendahara dan beberapa Seksi-seksi yang menangani -bidang-bidang usaha tertentu .Pada umumnya yang menjadi ketua PKK ialah : istri Kepala Desa. Ini dimaksudkan untuk memudahkan pengarahan kegiatan oleh Kepala Desa. Karena PKK berfungsi sebagai organisasi wanita yang berfungsi mendidik wanita-wanita Desa terutama yang tidak tergabung dalam Dharma wanita.

Dalam menggerakkan partisipasi kaum wanita secara bersama dalam suatu program atau kegiatan , PKK ini merupakan tangan ampuh dari Kepala Desa. Dengan adanya PKK pada setiap Desa maka dalam waktu yang relatif singkat kader-kadernya sudah tersebar di lingkungan setiap Desa. Melalui predikat-kader PKK ini perintah Desa dapat mengikat dan meningkatkan-partisipasi masyarakat wanita desa bila diperlukan, seperti mewakili Desanya dalam kegiatan-kegiatan perlombaan, mensukseskan program P2WKSS dan KB .

- Organisasi Dharmawanita hanya terdapat di Desa Lancirang. sedangkan di Desa Batu hanya merupakan individu-individu anggota yang tergabung dalam Dharmawanita Kecamatan yang berkedudukan di Tanru Tedong . Organisasi Dharmawanita adalah merupakan wadah penampungan kegiatan dan aspirasi dari Pegawai Negeri wanita dan isteri-isteri Pegawai Negeri dalam rangka partisipasi bersama mensukseskan pembangunan . Melalui organisasi ini diharapkan peningkatan keikutsertaan kaum wanita dalam pembangunan secara menyeluruh .

Struktur organisasinya adalah terdiri dari pada Ketua, sekretaris, Bendahara dan seksi-seksi yang m,embidangi usaha tertentu . Sebagai pusat kegiatannya ialah Balai Desa. Hal ini dimak

sudkan agar komunikasinya dengan Kepala Desa bersama apa ratnya lebih mudah . Karena anggota-anggotanya yang terdiri - dari isteri-isteri pegawai yang ada di desa tersebut merupakan - pendamping suaminya dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Itulah sebabnya yang ditunjuk menjadi Ketua ialah isteri Kepala Desa. Agar dapat terjalin kerja sama yang baik suami isteri.

Kegiatan utama Dharmawanita di Desa Lancirang selain - dari pada mengadakan kursus-kursus keterampilan wanita ber sama dengan PKK juga setiap bulannya diadakan arisan. Maksud diadakan arisan setiap bulannya ialah untuk mempertemukan - anggota-anggota dalam rangka memperkokoh kesatuan dan per satuan antar anggota .

Sebagai penarik atau pengikat untuk hadir diadakan pula kewa jiban-kewajiban setiap anggota untuk membayar sejumlah uang tertentu. Uang tersebut yang berhasil dikumpul dipergilirkan kepada anggota untuk menggunakannya. Kesempatan mengguna kan uang tersebut ditentukan melalui undian nama. Yang naik - pertama namanya itulah yang berhak menggunakan uang terse but pertama kalinya. Disamping itu juga diadakan ceramah ce ramah agama oleh Imam Desa atau Lingkungan atau ulama -u lama yang ada di Desa. Melalui pertemuan-pertemuan arisan i - ni pemerintah menyampaikan pengumuman yang menyangkut - pembangunan Desa .

Bidang Keolahragaan .

Olah Raga yang sudah dikenal di Desa Batu dan Lancirang Sejak dahulu adalah Maggolok (sepak bola) dan Maddaga(ma - in Raga yaitu permainan yang menggunakan bola yang dianyam - dari rotan) tetapi pelaksanaannya belum terorganisir. Tujuan utama ialah sebagai pengisi waktu luang setelah panen.

Pada saat ini di Desa Batu telah ada organisasi olah raga - yang meliputi Sepak bola, Volly dan Takraw (merupakan hasil pengembangan dari pada main raga). Sedangkan di Desa Lancir - rang selain dari pada sepak bola. volly ball dan sepak takraw - juga telah ada permai nan Bulu Tangkis (Badminton).Kegiatan -kegiatan di bidang keolahragaan ini terutama dilakukan oleh pemuda desa. Kegiatannya meningkat terutama pada saat-saat menyongsong peringatan hari-hari bersejarah atau ulang tahun ,baik yang bersifat nasional maupun daerah. Akhir-akhir ini su - dah diaktifkan pertandingan olah raga antar kampung dan Desa.

Struktur organisasi keolah ragaan ini adalah terdiri dari

ketua, sekertaris, Bendahara dan seksi-seksi. Seksi-seksi terdiri dari seksi perlengkapan, perwasitan dan pertandingan. Tujuan utama yang ingin dicapai dalam bidang keolah ragaan ini ialah membangkitkan gairah dan semangat generasi muda untuk ikut berpartisipasi bersama untuk mensukseskan program memasyarakatkan olah raga dan mengolah ragakan masyarakat. Hal ini penting dalam pembangunan. Manusia patriotik yang sportif untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya .

Oleh karena pentingnya peranan olah raga dalam pembinaan generasi muda pedesaan, maka pada umumnya penunjukan pimpinannya/ketuanya ditentukan oleh Kepala Desa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi dan keahlian dibidang olah raga. Hal ini penting terutama dalam pengadaan peralatan dan perlengkapan olah raga. Berdasarkan persyaratan tersebut di atas maka pimpinan-pimpinan organisasi keolah ragaan dikedua Desa tersebut umumnya dari pegawai Negeri atau pengusaha terutama Volly Ball dan Bulu Tangkis .

- Bidang Keamanan dan Ketertiban .

Dikedua desa lokasi penelitian telah dijumpai satuan-satuan Hansip (Pertahanan Sipil) yang merupakan anggota dari satuan pertahanan Sipil Kecamatan. Satuan-satuan pengamanan bertugas terutama membantu Kepala Desa dalam menjaga keamanan dan Ketertiban pelaksanaan program dan instruksi- instruksi Desa. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Hansip merupakan alat yang ampuh bagi Kepala Desa, terutama dalam hal pengarahannya tenaga (masyarakat) untuk ikut berpartisipasi secara bersama melaksanakan suatu pekerjaan. Seperti pembuatan jalan kampung, pembersihan pekarangan rumah, perbaikan jembatan Desa dan lain-lain pekerjaan di Desa yang memerlukan banyak tenaga rakyat. Disamping itu juga merupakan alat komunikasi antara Kepala Desa dan rakyat .

Pemimpin Hansip Desa ditunjuk oleh Komandan Hansip Kecamatan atas usul dari Kepala Desa. Pengusulan calon pemimpin satuan Hansip ini didasarkan pada kemampuan fisik/mental keberanian dan kerja sama yang baik dengan aparat Desa. Oleh karena itu hampir semua anggota Hansip itu mempunyai hubungan keluarga dengan salah seorang aparat Desa .

Disamping Hansip di Desa Batu dan Lancitang juga dijumpai kelompok anggota veteran pejuang kemerdekaan. Mereka ini merupakan anggota dari Kantor ranting Veteran Republik Indonesia

Kecamatan Dua Pitue yang bermarkas di ibukota Kecamatan-
Tanru Tedong . Kelompok masyarakat Veteran Desa ini meru-
pakan pembantu atau konsultan begi Kepala Desa dalam me-
laksanakan tugas sehari-hari terutama dalam hal pemberian-
keamanan dan ketertiban Desa. Bahkan di Desa Batu ketua LK
MD nya adalah orang-orang anggota Veteran . Karena mereka
pada umumnya oleh masyarakat Desa dianggap pemuka- pemu-
ka masyarakat yang punya jaringan-jaringan kesatuan bukan
hanya di tingkat Desa Kecamatan dan Kabupaten, bahkan sam-
pai ditingkat Propinsi .

Bidang Kemasyarakatan .

Organisasi masyarakat yang ada di Desa Batu yang bi-
dang kegiatannya terutama pembanguann Desa adalah Lem-
baga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Sedangkan di Des-
sa Lancirang, selain LKMD juga didapati Kelompok tani dan
panitia pemakaman .

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) adalah-
merupakan wadah permusyawaratan/permufakatan pemuka -
pemuka masyarakat yang ada di Desa .

Lemabaga ini bertugas membuat programpembangunan Desa
,sesuai dengan saran dari masukan-masukan dari kepala -ke-
pala Dusun. Rencana tersebut sebelum dijadikan keputusan De-
sa , maka terlebih dahulu harus dimusyawarahkan dengan se-
mula pemuka-pemuka masyarakat yang tergabung dalam LK
MD. Jadi pada hakekatnya LKMD adalah wadah yang menam-
pung pemuka-pemuka masyarakat untuk membantu Kepala
Desa melaksanakan tugasnya sehari-hari terutama penyusunan
program dan pelaksanaannya termasuk pengumpulan dana dari
swadaya masyarakat .

Struktur kepengurusan LKMD terdiri dari Ketua, yang di
jabat sendiri oleh Kepala Desa, Sekertaris juga dijabat oleh -
Sekertaris Desa, anggota-anggota terdiri dari pemuka-pemuka
masyarakat, termasuk Kepala-Kepala Dusun setempat. Adanya
ketentuan yang mengharuskan Ketua dan Sekertaris dijabat -
oleh Kepala Desa dan Sekertarisnya menunjukkan bahwa lem-
baga ini adalah alat dari Kepala Desa dan Sekertaris
Oleh karena itulah kegiatannya dipusatkan di kantor Kepala -
Desa .

Kelompok Tani adalah merupakan kumpulan beberapa orang
petani yang berdekatan sawah garapannya. Jadi sawahnya ter

letak dalam satu Lompo .

Kelompok tani seperti ini tujuannya ialah membina para petani agar dapat meningkatkan produksinya, selain untuk konsumsi juga untuk diperdagangkan. Dalam kegiatan yang diadakan selain yang ada kaitannya dengan teknis-teknis pertanian juga dalam kaitannya dengan hidup bermasyarakat. Seperti mengikuti perlombaan-perlombaan keterampilan dan kecerdasan-para anggotanya .

Susunan kepengurusan kelompok tani ini terdiri dari Ketua, Sekertaris dan Bendahara. Untuk menjadi pimpinan kelompok harus mempunyai kemampuan dan pengalaman kemasyarakatan yang betul-betul dapat membina kelompoknya . Penunjukan pimpinan setiap kelompok, didasarkan pada dedikasinya pada pemerintah Desa, pengalaman dan kekayaannya . Pada kenyataannya bahwa kelompok-kelompok tani ini dijadikan alat dari pemerintah Desa dalam mempermudah koordinasi rakyat pedesaan khususnya petani .

- Panitia Pemakaman , ini merupakan suatu perkumpulan masyarakat khususnya yang beragama Islam. Kegiatan utamanya ialah mengurus pemakaman warga masyarakat yang meninggal dunia. Pengurusan pemakaman ini mulai dari persiapannya (- kain kafan, shalat jenazah), izin penguburan, penggalian liang lahat sampai pada pengantaran mayat kekkubur. Oleh karena itu semua anggota pengurusnya diambil dari pegawai syara' di Desa Lancirang .
- Bidang Politik .

Satu-satunya organisasi politik yang ada di Desa Batu ialah Golongan Karya. Sedangkan di Desa Lancirang disamping Golkar juga ada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) . Sebelum munculnya Golongan Karya di kedua Desa ini organisasi Politik yang berdasarkan Islam cukup kuat. Karena pada saat itu masih dijumpai Nahdatul Ulama (NU), Partai Syarikat Islam (PSII) dan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) dua bernama Masyumi .

Setelah munculnya Golongan Karya maka mulailah organisasi-organisasi politik seperti tersebut diatas satu persatu membubarkan diri. Proses pembubaran lebih cepat prosesnya setelah ditetapkan Golkar sebagai organisasi politik yang harus bagi Pegawai Negeri dan rakyat pada umumnya .

Pada umumnya semua pimpinan Golkar itu adalah orang-orang yang ditunjuk oleh Pemerintah Dati II bahkan dari Dati I. Peranan pimpinan Golongan Karya dalam pengelolaan pemerintahan daerah khususnya Desa sangat menentukan, terlebih-lebih lagi setelah Pemilu 1982 dimana Golkar di Desa Batu menang mutlak. Sedangkan di Desa Lancirang, sebahagian kecil rakyat - masih dikuasai oleh PPP .

BAB V

POLA KEPEMIMPINAN MASYARAKAT PEDESAAN DIBIDANG EKONOMI

Usaha-usaha ekonomi yang ada di Desa Batu dan Desa Lanci rang meliputi :

- Pertanian / Perladangan .
- Pengangkutan .
- Pengumpulan Hasil Hutan .
- Perdagangan .
- Pertukangan / Kerajinan Tangan .

Dari masing-masing bidang usaha ekonomi seperti tersebut diatas tidaklah terpisah satu dengan lainnya melainkan masing-masing mempunyai hubungan kait mengait . Demikian pula orang-orang yang terlibat dalam satu bidang kegiatan tidaklah berarti bahwa dibidang lain ia tidak aktif.

Hal ini menyebabkan sukarnya memisahkan antara satu kelompok pengusaha dengan kelompok pengusaha lainnya, karena ada diantara mereka yang mengusahakan lebih dari satu bidang usaha, karena ada diantara mereka yang juga pegawai Negeri.

Seorang petani baik ia petani sawah maupun petani ladang dalam waktu-waktu tertentu mereka masuk hutan untuk mencari rotan atau kayu atau pergi menjual dipasar, bahkan ada juga yang menjadi tukang kayu atau tukang emas, ataupun bekerja sebagai tukang reparasi sepeda dan lain sebagainya .

Berdasarkan kegiatan seperti ini masyarakat pedesaan tidak tepat dibagi menurut bidang usaha, karena ada kemungkinan seorang warga desa melakukan dua atau tiga macam usaha (mata pencaharian), tergantung pada kesempatan yang dimilikinya.

Dengan demikian yang lebih tepat ialah pengelompokan atas pekerjaan pokok dan pekerjaan sambilan seperti misalnya seorang petani pekerjaan utamanya ialah bertani, pekerjaan sambilannya tukang kayu. Demikian pula seorang Pegawai Negeri pekerjaan pokoknya sebagai guru sekolah, pekerjaan sambilannya sebagai petani dan sebagainya .

Namun demikian bahwa setiap bidang usaha itu tidak dapat dipisah-pisahkan satu dengan lainnya. Di Desa Batu dan Lanci rang dijumpai bahwa setiap bidang usaha mempunyai pemimpin tersendiri yang mengatur dan mengkoordinir masing-masing bidang kegiatan tersebut .

Untuk lebih jelasnya pola dan sistem kepemimpinan pada masing-masing bidang tersebut berikut ini diuraikan satu persatu .

1. Bidang usaha Pertanian Sawah / Ladang .

Usaha Pertanian di Desa Batu masih lebih banyak yang berupa perladangan dari pada sawah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

- Tanah lahang di Desa Batu masih luas dan masih merupakan tanah-tanah yang belum terolah .
- Pada umumnya tanah-tanah tersebut merupakan tanah pegunungan yang berbukit-bukit, jadi sukar untuk dijadikan sawah.

Sedangkan di Desa Lancirang 60 % berupa pertanian sawah, karena tanah-tanah lahan di Desa tersebut umumnya datar jadi mudah dibuat sawah, begitu pula jaringan irigasi sudah ada .

Untuk mengkoordinir kegiatan dalam usaha pertanian ini oleh para warga masyarakat petani setempat yang berdekatan sawahnya biasanya terdiri dari : 10 s/d 20 orang, ditunjuk seorang pemimpin yang diserahi tanggung jawab dan kekuasaan untuk mengatur kegiatan-kegiatan pengolahan sawah dan ladang .

Pangelompokan ini didasarkan atas wilayah lompok yaitu sawah yang berada pada satu lembah atau aliran sungai . Pemimpin yang ditunjuk itu disebut Ponggawa (pemimpin/ ketua). Bila yang dipimpin itu petani sawah maka dia disebut Ponggawa paggalung. Seperti Pongggawa Paggalung di Desa Lancirang ada juga daerah yang memakai istilah Matoa Paggalung .

Tetapi bila yang dipimpin itu petani ladang maka dia disebut Ponggawa Paddare seperti Ponggawa Paddare di Desa Batu .

Sesuai dengan fungsi dan tugasnya maka ponggawa ini dapat dibedakan atas Pangulu (penghulu) yaitu ponggawa yang bertugas sebagai pemimpin yang menentukan waktu mulainya turun sawah atau turun ke ladang untuk bekerja. Orang ini pintar ilmu falak, mengetahui tentang peredaran musim. Orang ini digelar Papananrang atau Pallontarak (ahli falak atau ahli lontarak). Sedangkan Ponggawa yang bertugas sebagai Sanro (dukun) tani disebut Mado yaitu ponggawa yang memulai menanam padi atau jagung pada waktu musim tanam dan memulai menuai pada musim panen . Orang ini ahli tentang seluk beluk tanaman, tahu mengobati tanaman yang sakit dan sebagainya . Oleh karena cukup berat tugas yang harus dipikul oleh seorang ponggawa Paggalung maka untuk menjadi seorang Ponggawa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Kaya karena hasil pertanian, dalam bahasa bugisnya :
" Madeceng-deceng atuwo-tuwong rilinona "
- Punya pengalaman dalam bidang pertanian, dalam bahasa Bugisnya :
" Maegani pejje nanre riaggalungengne "
- Punya sawah yang luas atau kerbau/sapi yang banyak, bahkan juga sudah menjadi syarat punya trakator mini .

Yang menjadi tugas utama dari seorang ponggawa Paggalung ialah mengatur kegiatan pertanian yang meliputi :

- Penentuan waktu turun sawah atau ladang .
- Penentuan waktu menabur bibit .
- Penentuan bibit yang cocok ditanam untuk tahun itu (sekarang bibit ditentukan oleh penyuluh pertanian melalui Kepala Desa) .
- Penentuan waktu memulai menuai .
- Mengkoordinir upacara pesta panen (akhir-akhir ini sudah mulai dikoordinir oleh pemerintah setempat) .
- Membantu petugas pembagi air (Ulu-ulu) untuk mengatur pembagian air di sawah-sawah. Tugas ini hanya dijumpai di Desa Lancirang karena di Desa Batu belum ada jaringan irigasi .
- Membantu petugas pertanian (Tugas baru) dalam penyaluran bibit dan pupuk .
- Menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi antara petani ber-sama-sama Kepala Desa. Masalah semacam ini lebih banyak dijumpai di Desa Lancirang .

Ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas adalah penting karena ada satu pesan yang diterima turun temurun yang selalu mereka jadikan pegangan dalam melaksanakan pertanian yaitu : bahwa pertanian pangan (bisase) akan jadi bila memenuhi tiga syarat yaitu :

1. Wattunnai (waktunya tepat) .
2. Massama-samang (serentak) .
3. Massidi Ati (bersatu) (H. Malayang, 11-10-1983) .

Bila tidak sesuai dengan persyaratan tersebut diatas maka akan banyak terjadi gangguan, akhirnya tidak memperoleh hasil yang diharapkan. Kewajiban seorang Ponggawa Paggalung ialah selalu berusaha memupuk persatuan dan kesatuan antar sesama anggota kelompoknya dan sebaliknya seorang warga tani berkewajiban mengikuti ketentuan yang telah digariskan-

pongawanya. Bila tidak dapat mentaati maka dia akan di pencilkan dari kelompok tani yang bersangkutan .

Seorang ponggawa paggalung memperoleh kekuasaan dan kewenangan dari kelompoknya sendiri. Hal ini terjadi karena didasari oleh kepercayaan atas kemampuan yang dimiliki ponggawa itu .Ponggawa ini tidak mempunyai penghasilan tertentu. Sebagai imbalan jasa yang biasa ia terima hanyalah berupa bantuan tenaga dari anggota-anggota kelompoknya seperti pada waktu mencangkul atau membajak sawahnya atau pada waktu menuai atau pada waktu selesai panen. Dia diberikan bantuan berupa tenaga. Dahulu setiap perintah atau instruksi raja (Arung) yang menyangkut pertanian harus melalui Ponggawa, baru diteruskan kepada anggota-anggotanya. Jadi secara tidak langsung juga di sebagai penyalur perintah atau instruksi dari raja kepada rakyat.

2. Bidang Usaha Pengangkutan .

Usaha pengangkutan di Desa Batu lebih banyak dilakukan dengan tenaga hewan. Barulah pada tahun 1980 dimulai pula menggunakan mobil sebagai alat pengangkut disamping kuda dan sepeda . Pengangkutan dengan menggunakan tenaga kuda untuk mengangkut manusia dan barang. Kerbau tenaganya digunakan untuk menarik balok kayu dari butan dan untuk menarik bajak di sawah .

Sekelompok Patteke (pengangkutan dengan tenaga kuda) biasanya terdiri dari 5 s/d 10 orang masing-masing dengan kuda bebannya yang kesemuanya masih punya hubungan - keluarga biasanya menunjuk seseorang diantara mereka, sebagai orang yang dituakan. Bertanggung jawab mengkoordinir kegiatan kelompoknya .

Orang yang ditunjuk sebagai Ketua kelompok itu disebut Ponggawa Patteke (Pemimpin pengangkutan dengan tenaga kuda) .

Ponggawa Patteke inilah yang bertugas untuk :

1. Mencari muatan (langganan) .
2. Memutuskan sewa (tampa) dan menentukan pembagian - nya kepada anggota kelompoknya .
3. Bertindak sebagai penengah bila timbul perselisihan diantara para anggotanya .
4. Menjaga keutuhan kelompok dari gangguan-gangguan dari luar .
5. Menentukan daerah operasinya .

Oleh karena itu seseorang yang akan ditunjuk sebagai Pong gawa Patteka haruslah orang yang :

- Ahli dalam hal pengangkutan dengan kuda .
- Disegani oleh seluruh anggota kelompok .
- Mempunyai banyak relasi di masyarakat .
- Ahli mengobati kuda yang kena penyakit (guna-guna) .
- Punya kuda beban sendiri .

Ponggawa sebagai pemimpin kelompok berkewajiban melindugi seluruh anggota kelompok termasuk kudanya. Disamping itu pula berhak untuk mendapatkan penghormatan dari anggota-anggota kelompoknya . Daerah operasi kelompok Patte ke dari Lancirang bukan hanya di wilayah Desanya saja tetapi sampai ke kecamatan Belawa Kabupaten Wajo ke Desa Tanru Tedong, ke kecamatan Mari Tengngae dan sebagainya Operasi keluar Desa terutama dilakukan pada musim panen .

Pada waktu mereka kalaur dari wilayah desanya untuk mem permudah pengenalannya mereka memakai Garocang (alat bunyi-bunyian yang terbuat dari kuningan yang digantungkan dileher kuda beban pada waktu sementara berjalan). Sedang kan orangnya sendiri memakai seragam hitam, celananya panjang sampai dilutut dan memakai topi yang terbuat dari daun lontar atau bambu dan memakai ikat pinggang dari kain mera /putih .

Adapun pengangkutan yang menggunakan mobil atau motor merupakan usaha perorangan. Jadi mereka itu masing-masing menjalankan usaha pengangkutannya sesuai dengan kemampuan sendiri tanpa pemimpin tertentu . Trayek dan terminalnyapun tidak tentu, tergantung kepada kesempatan dari sopirnya . Kecuali mobil-mobil yang beroperasi diibukota kabupaten yaitu Pangkajene mempunyai terminal tertentu . Daerah operasi dari pengangkutan dengan mobil yaitu dari Desa ke Kecamatan dan ibukota Kabupaten dan sebaliknya. Pada saat hari pasar pada suatu Desa pengangkutan ke Desa-tersebut akan lebih ramai dibanding dengan hari-hari lainnya

3. Usaha Pengumpulan Hasil Hutan .

Pengusaha pengumpul hasil hutan hanya didapati di De sa Batu. Hasil hutan yang banyak terdapat di hutan sekitar De sa Batu ialah : Peppa (rotan) kayu, damar dan tuak manis (nira). Pada mulanya pemcarian rotan di hutan hanya dilaku

kan secara individual sesuai dengan kemampuan masing-masing penduduk . Hasilnya dijual sendiri dipasar terutama ke Tanru Tedong dengan menggunakan tenaga kuda setiap hari pasar .

Setelah rotan ini menjadi bahan perdagangan umum, maka mulailah pedagang-pedagang berdatangan untuk membelinya langsung dari penduduk. Dengan demikian bertambah banyaklah rakyat yang ikut mencari rotan ke hutan bahkan akhir-akhir ini banyak pula orang dari luar Desa yang ikut. Karena melihat bahwa pasaran rotan itu lebih mudah dibanding dengan bahan-bahan dagangan lainnya .

Karena makin bertambah banyaknya pencari rotan di hutan maka timbullah usaha mengelompokkan diri yang anggotanya terdiri 5 s/d 10 orang dan diutamakan yang masih ada hubungan keluarga. Untuk setiap kelompok ditunjuk seorang sebagai ketua atau pemimpin kelompok .

Tugas dan fungsi dari ketua kelompok itu ialah :

- Mengkoordinir kegiatan pengumpulan rotan .
- Mencari langganan atau pembeli .
- Menetapkan harga .
- Mengatur waktu pengumpulan .
- Mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan terutama bahan bahan makanan selama berada di hutan .
- Menentukan daerah operasi .

Ketua kelompok disebut Ponggawa Pappappa (Ketua Pencari rotan).

Untuk diangkat sebagai Ponggawa Pappappa seseorang harus memiliki :

- Keahlian dibidang mencari rotan (berpengalaman di hutan)
- Dapat mengadakan hubungan dengan pedagang dan kepala lingkungan .
- Dipercaya dan disegani oleh anggota kelompoknya .
- Keadaan perekonomiannya lebih baik dari anggota- anggotanya.

4 . Usaha Perdagangan .

Di Desa Batu sekurang-kurangnya ada tiga orang pedagang hasil bumi yang terkenal yaitu :

- Siraju , seorang pensiunan TNI berasal dari Barukku .
- M. Arif , Kepala lingkungan II Desa Batu , berasal dari Barukku .
- H. Malayang , Imam Desa Batu , berasal dari Barukku .

Adapun barang-barang dagangan yang diperdagangkan semuanya berasal dari Desa Batu yaitu : rotan, kayu, damar, dan gula merah. Sedangkan barang kebutuhan sehari-hari seperti : garam, gula pasir, ikan , teh, bahan pakaian, pecah belah dan bahan-bahan plastik seluruhnya didatangkan dari ibukota kecamatan Tanru Tedong, dari Lancirang bahkan dari ibukota - Kabupaten Pangkajene. Dari Tanru Tedong ada 3 orang pedagang yang merupakan penguasa ekonomi yaitu : - H. Nurbasa, H. Halide dan H. Waru .

Disamping ketiga orang pedagang tersebut diatas masih banyak pedagang lainnya yang setiap minggu mendatangi pasar-pasar di Desa Batu dan Lancirang. Di Desa Lancirang kira-kira ada 81 orang pedagang, tetapi yang terkenal baik karena modalnya besar maupun karena pengaruhnya dalam masyarakat, tidak kurang dari 6 orang pedagang dengan barang dagangan yang berbeda-beda. Pedagang-pedagang tersebut adalah sebagai berikut :

- H. Pulaengsong, pedagang hasil bumi punya pengilingan padi. Beliau adalah keluarga dari BKD Sidrap, berdomosili di Pangkajene.
- H. Tayyeb, berdagang hasil bumi, asal Lancirang .
- La. Didu, pedagang hasil bumi, asal Lancirang .
- La Nure, pedangan hasil bumi dan pengusaha pengangkutan asal Lancirang .
- Lakki pedagang barang campuran, berasal dari Lancirang.
- Laseng pedagang barang pecah belah dan plastik asal dari Lancirang.

Dari semua pedagang yang ada di Desa Batu. Lancirang dan Tanru Tedong menurut pengamatan, pedagang-pedagang dari desa Batu ruang geraknya masih terbatas antar Desa dengan Kecamatan .. Sedangkan pedagang-pedagang dari Tanru Tedong dan Lancirang sudah lebih luas sampai ke ibukota propinsi yaitu Ujung Pandang .

Hal ini mungkin disebabkan karena jenis barang dagangannya berbeda. Semua pedagang dari desa Batu hanya berdagang barang-barang hasil desanya saja, dan barangtersebut sudah ada orang yang bersedia menerimanya di Kecamatan. Tetapi pedagang-pedagang dari Tanru Tedong dan Lancirang disamping berdagang hasil bumi juga barang-barang hasil industri dari kota, luar daerah, bahkan ada diantara mereka berusaha mendatangkan barang dagangan dari Ujung Pandang dan dari Jawa .

Di Desa Batu pedagang-pedagang seperti yang telah di sebutkan diatas belum terkoordinir oleh satu organisasi tertentu Mereka masih berusaha sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan keuletannya .

Dalam mereka mengembangkan usahanya masing-masing, sering timbul pertentangan atau konflik terutama dalam memperebutkan massa pekerjaanya (pengumpulan rotan) di hutan .

Seperti terjadinya pertentangan antara Siraju dengan H. Mala yang, namun pertentangan itu masih dapat diselesaikan melalui musyawarah bersama . Hal ini sesuai dengan informasi dari Kepala Desa bahwa pertentangan antara warga masyarakat Desa Batu yang paling sering terjadi ialah karena masalah ekonomi / mata pencaharian .

Pedagang-pedagang di Tanru Tedong dan Lanciran^a , karena bidang usaha mereka bermacam-macam maka jarang terjadi perebutan untuk menguasai salah satu bidang usaha produksi . Persaingan mereka lebih banyak bersifat persaingan modal dan fasilitas. Siapa yang punya modal besar akan melebihi usaha pedagang modal kecil atau istilah sekarang pedagang ekonomi lemah. Demikian juga dalam masalah fasilitas yang bisa didapatkan, dari pemerintah desa, kecamatan, daerah maupun propinsi Fasilitas ini sangat ditentukan oleh adanya hubungan kemanusiaan antara pedagang tersebut dengan penguasa setempat. Barang siapa yang punya hubungan lebih banyak dengan Pak Desa atau Pak Camat, maka dia juga mendapat kemungkinan yang besar untuk memperoleh fasilitas, terlebih lagi kalau ada hubungan -keluarga. Hubungan jaringan tersebut baik secara langsung maupun melalui beberapa oknum tertentu, tetap membawa dampak positif terhadap usaha yang dia kembangkan .

Dari masalah ini juga yang menyebabkan sehingga hampir setiap ada pencalonan atau pemilihan Kepala Desa atau Camat dan sebagainya para pedagang itu ikut terlibat didalamnya disamping dari pada dia sebagai warga masyarakat setempat .

Dibidang perdagangan dikenal juga adanya pemimpin yang disebut : Ponggawa Padangkan (pemimpin kelompok pedagang). Bedanya dengan bidang lain ialah karena jumlah anggota pengikutnya tidak menentu. Jadi keanggotaannya tidak terlalu terikat .

Orang yang dianggap sebagai Ponggawa dibidang Perdagangan - pada umumnya :

- Mempunyai modal yang besar sehingga dapat menguasai ber-

macam-macam bidang usaha .

- Sudah punya pengalaman dibidang usaha perdagangan .
- Punya hubungan baik dengan penguasa setempat .
- Disegani dan dipercaya oleh pedagang (Masyarakat penjual)

Seorang Ponggawa dibidang perdagangan punya kewajiban mem bantu pedagang-pedagang kecil yang masuk dalam kelompoknya Bantuan-bantuan tersebut ada yang berupa barang kredit arti nya : nanti dibayar setelah barang itu terjual . Berupa pinjaman modal yang harus dibayar setiap hari pasar dan ada juga setiap minggu. Berupa fasilitas atau jaminan kepercayaan kepada sese orang untuk memberi barang dengan kredit .

5. Pertukangan / Kerajinan Tangan .

Dalam bab. II 4, telah dikemukakan bahwa Desa Batuper tukangn yang ada ialah : Tukang Kayu (pembuat rumah) dan pengrajin anyam-anyaman dari rotan. Sedangkan di Desa Lanci rang selain dari pada tukang kayu, pengrajin anyam-anyaman - dari daun lontar dan bambu juga dijumpai usaha-usaha tukang las, tukang mas, tukang servis motor, tukang jahit dan tukang (bengkel) sepeda .

Usaha-usaha pertukangan/kerajinan tangan seperti terse but diatas masih merupakan usaha-usaha individual. Kalaupun ada yang sudah merupakan kelompok, jumlah anggotanya ha nya berkisar 2 sampai 3 orang saja . Dalam usaha seperti ini istilah pemimpin atau ketua jarang dijumpai kecuali dalam per tukangn kayu, khususnya pembuat rumah . Dalam bidang tu kang rumah di Desa Batu dan Lancirang ini dikenal gelar : Panre Bola yaitu orang yang pintar membuat rumah kayu . Seorang Panre Bola dalam melakukan pekerjaannya mempunya i pembantu 3 s/d 5 orang . Yang diangkat sebagai pembantu di utamakan orang yang masih ada hubungan kekeluargaan deng an Panre bola tersebut . Hal ini penting karena seorang Pan re bola disamping bekerja sebagai tukang juga dia berusaha me ngajar pembantunya itu agar dapat mencapai derajat panre . Oleh karena itu mengambil pembantu harus dari keluarga sen diri agar ilmunya tidak jatuh pada orang lain .

Mencapai gelar Panre tidak ada campur tangan orang la- in apalagi Kepala Desa (pejabat) . Karena ia capai karena betul-betul melalui usaha dan keuletan pribadi dengan memakai jalur keturunannya .

Seorang Panre yang betul-betul menguasai pembuatan rumah, baik tehnik maupun upacara-upacara yang berkaitan dengan nya biasa disebut Panrita Bola.

Dalam kenyataannya seorang Panrita Bola pengaruhnya biasa nya bukan hanya dalam hal pembuatan rumah saja tetapidapat lebih meluas dalam masyarakat umum. Karena seseorang yang sudah berstatus Panrita Bola umumnya juga merupakan Sanro Kampong (dukun kampung).

BAB VI

POLA KEPEMIMPINAN MASYARAKAT PEDESAAN DIBIDANG AGAMA

Kepemimpinan dibidang agama mengambil dasar dan pola dari ajaran Al Qur'an dan hadist. Al Qur'an adalah merupakan sumber utama karena merupakan nilai-nilai dan aturan - aturan yang diwahyukan langsung dari Tuhan kepada "Nabi Muhammad SAW.

Sedangkan Hadist ialah merupakan pernyataan-pernyataan dari Nabi Muhammad SAW berupa kalimat (nasehat/larangan) perbuatan-perbuatan atau tingkah laku, merupakan pelengkap.

Disamping kedua sumber tersebut di atas terdapat pula sumber nilai yang disebut Ijma dan Kiyas.

Ijma adalah merupakan hasil kebulatan pendapat dari para ulama tentang suatu masalah. Sedangkan Kiyas adalah merupakan analogi tentang sesuatu masalah berdasarkan dalil-dalil yang telah dinyatakan dalam Al Qur'an .

Atas dasar dari sumber nilai dan aturan-aturan seperti tersebut di atas kepemimpinan dibidang agama merupakan kekuasaan kewenangan dan pengaruh dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.

Struktur kepemimpinan dibidang agama di Desa Batu dan Lancirang terdiri dari :

- Imam Desa (Imam Desa)
- Khatib Desa (Khatib Desa)
- Bilalak Masigi (Tukang adzan di mesjid)
- Doja Masigi (Penjaga mesjid)

Imam Desa diangkat oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidrap berdasarkan usul dari camat Dua Pitue. Calon yang diajukan oleh Camat didasarkan atas keahlian dan keturunannya.

Selain dari pada Imam Desa di Desa Batu dan Lancirang juga didapati Imam Lingkungan pada setiap Lingkungan yang ada.

Dengan demikian di Desa Batu terdapat 6 orang imam yaitu : 1 orang Imam Desa dan 5 orang imam Lingkungan. Semua imam tersebut di atas penduduk asli Desa Batu. Imam Desa Batu sendiri (H. Malayang) adalah imam yang turun temurun, mulai dari neneknya dan bapaknya adalah bekas imam di Kampung Barukku . H. Malayang adalah bekas pelajar pendidikan Islam di Rappang. Disamping itu juga dia pernah menjadi pengurus (Bendahara)

Madrasah DDI (Daru Dakwa Wal Irsyad) yang pernah didirikan di Barukku, oleh Sekertaris Distrik Pitu Riase, Abd. Azissebelum Revolusi kemerdekaan.

Sayang madrasah tersebut dimasa Revolusi bubar, sampai sekarang tidak berbekas lagi .

Di Desa Lancirang terdapat 5 orang imam yaitu seorang Imam Desa dan 4 orang Imam Lingkungan. Satu diantaranya adalah berasal dari Enrekang sedangkan yang lainnya penduduk asli Lancirang.

Imam Desa sebagai anggota perangkat Desa mendampingi Kepala Desa dalam melaksanakan tugas kemasyarakatan sehari-hari terutama dibidang pembinaan mental dan rohani masyarakat.

Jadi dia merupakan penasehat Kepala Desa dalam hal yang berkaitan dengan agama dan sistim kepercayaan masyarakat.

Oleh karena itu kegiatan imam desa berpusat di Balai Desa. Sedangkan imam lingkungan tugas utamanya ialah memimpin penyelenggaraan ibadah di mesjid-mesjid dan kegiatan keagamaan di lingkungan masing-masing, seperti perkawinan, kematian atau pesta .

Khatib mempunyai tugas sebagai Sekretaris dan pembantu Imam Desa dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari seperti dalam hal memimpin kegiatan keagamaan dan membaca Khutbah pada hari Jumat di mesjid atau memberikan ceramah - ceramah keagamaan kepada masyarakat.

Disamping Khatib di mesjid, tugas utamanya ialah membantu Imam Kampung melayani kegiatan masyarakat dibidang keagamaan seperti : Akad Nikah, upacara Agama, mabbaca doang (membaca do'a), mabbarazanji (membaca kitab barzanji) Seorang Khatib pengangkatannya ditentukan oleh Kepala Desa berdasarkan usul iman desa, penunjukannya terutama didasarkan pada pengetahuan keagamaan dan keturunannya.

Bilalak adalah orang yang tugasnya membacakan Adzan di mesjid pada setiap waktu sembahyang lima waktu dan mengajak orang berdiri untuk sembahyang jamaah dengan membacakan qamat .

Istilah Bilalak ini sudah tidak sepopuler dahulu, dan tidak lagi monopoli satu orang. Hal ini mungkin disebabkan oleh karena perkembangan pendidikan sehingga dalam setiap lingkungan mesjid, sudah banyak orang yang dapat melaksanakan tugas itu .

Seorang Bilalak ditunjuk oleh Imam Lingkungan berdasarkan pengetahuan agamanya dan kepasihan dalam membaca ayat - ayat Al Qur'an. Diutamakan yang merupakan keluarga Bilalak terdahulu (keturunan) .

Doja (Penjaga mesjid) adalah orang yang tugasnya menjaga kebersihan mesjid dan lingkungannya, mengisi air kolam mesjid dan membuka serta menutup pintu / jendela mesjid.

Pengangkatan seorang Doja didasarkan atas Penunjukan i mam Lingkungan. Biasanya didasarkan pada usia, ketaatandatng berjamaah di mesjid dan keturunannya .

Pada zaman dahulu semua pejabat-pejabat Desa dibidang keagamaan ini tidak mempunyai penghasilan tetap sebagaimana halnya dengan Pegawai Negeri. Yang menjadi penghasilan bagi mereka hanyalah dari pemberian suka rela dari masyarakat yang biasanya diberikan pada waktu ada upacara keagamaan atau pada waktu selesai panen .

Biasanya untuk mengumpulkan pemberian-pemberian masyarakat ini ditugaskan kepada Doja untuk mengumpulkannya dengan jalan mengunjungi rumah-rumah penduduk satu persatu .

Pada saat sekarang ini sudah ada yang berpenghasilan tetap, karena yang ditunjuk memang adalah seorang Pegawai Negeri seperti halnya dengan Imam Desa Batu. Namun pejabat-pejabat di bidang keagamaan ini tidak mempunyai penghasilan tetap tetapi mereka dalam melaksanakan tugasnya tetap tekun dan bersungguh-sungguh. Hal ini mungkin karena didasari oleh keyakinan iman/kepercayaan kepada Tuhan yang maha esa. Mereka berkeyakinan bahwa melaksanakan nilai-nilai aturan-aturan agama adalah melaksanakan amanah Allah. Memasyarakatkan agama Allah adalah yang menjadi tujuan utama mereka.

Yang menjadi simbol utama membedakan mereka dengan anggota masyarakat lainnya, biasanya dilihat dari segi kesederhanaannya. Baik dalam pakaian maupun dalam tingkah laku dalam pergaulan dengan masyarakat .

Bila tiba waktu sembahyang mereka duluan ke mesjid duduk tafakur dibarisan depan. Bila berjumpa dengan sesama anggota masyarakat selalu didahului dengan sapaan salam " Assalamu Alaikum " Taat mengenakan pakaian yang menunjukkan Islam seperti Jas, sarung dan songkok/ songkok haji (cipo-cipo) bagi yang sudah haji .

Dengan ketaatannya pada sifat-sifat tersebut di atas maka mereka itu berhak mendapatkan panggilan kehormatan dari masyarakat seperti : Puang Imang, Uwak Imang atau Pak Imang, Puang Katte, Puang bilalak dan Puang Doja dan sebagainya.

Bila seorang telah berhasil memperoleh gelar kehormatan seperti : Puang Imang, Puang Katte dan sebagainya maka wibawanya

terhadap masyarakat akan lebih mantap sehingga nasehat -nasehatnya dan petunjuk-petunjuknya lebih ditaati. Hal ini dapat dilihat di Desa Batu dalam penerapan Instruksi atau perintah-perintah dari Bupati atau Camat .

Sebelum instruksi atau perintah-perintah itu diterapkan kedalam masyarakat maka terlebih dahulu dibahas bersama Imam Desa. Bagaimana teknis dan cara penerapan yang sebaik-baiknya agar mudah diterima oleh masyarakat.

Cara yang paling banyak ditempuh menurut informasi dari Kepala Desa Batu ialah penyampaian instruksi, perintah atau pengumuman melalui mesjid-mesjid pada waktu sembahyang jamaah / Jumat oleh Imam-imam Lingkungan. Ini salah satu bukti bahwa pengaruh pemimpin agama di Desa lokasi penelitian sangat besar terhadap masyarakat .

Dalam kenyataannya tugas formal dari pada pemimpin dibidang keagamaan ialah menjadi petugas pencatat nikah, talak dan rujuk (P3NTR), membantu Kepala Desa dalam pembinaan rohani.

Jadi sesuai dengan fungsi yang diembangnya maka sebenarnya pemimpin-pemimpin agama di tingkat Desa itu mempunyai tugas ganda yaitu : sebagai pemimpin yang bekerja berdasarkan nilai - nilai dan aturan-aturan agama Islam dan dilain pihak iasebagai pemimpin Nasional yang bekerja menurut aturan-aturan dan nilai - nilai Nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Salah satu hak dari pemimpin-pemimpin dibidang agama (pegawai Syara') ialah : Pada setiap kegiatan-kegiatan masyarakat di kampung, mereka harus diundang, karena dianggap dapat membawa berkah .

Dengan mengharapkan kehadiran Pak Imang atau Pak Katte dapat menyebabkan acara ditunda pembukaannya .

BAB VII

POLA KEPEMIMPINAN MASYARAKAT PEDESAAN DIBIDANG PENDIDIKAN

Sebelum masuknya Islam di Desa Batu dan Lancirang pendidikan dilaksanakan secara Tradisional yaitu : melalui nasehat -nasehat, pesan-pesan dan pemberian contoh-contoh yang baik.

Dengan melalui anjuran-anjuran, perintah-perintah dan larangan-larangan bermacam-macam pemali-pemali serta pemberian contoh-contoh tentang hal-hal yang baik maka generasi tua (orang tua) berhasil mewariskan nilai-nilai dan aturan-aturan hidup bermasyarakat kepada generasi muda atau anak-anak mereka.

Pada masa itu proses pendidikan berlangsung secara tidak disadari baik yang bertindak sebagai pendidik maupun yang menjadi sasaran pendidikan .

Pendidikan seperti ini berlangsung baik di rumah-rumah keluarga maupun dimasyarakat kampung atau desa .

Di rumah-rumah yang bertindak sebagai pendidik ialah orang tua, terutama ibu karena ibulah yang paling dekat dengan anak dan paling lama waktunya tinggal di rumah. Sedangkan ayah lebih banyak waktunya digunakan diluar rumah untuk mencari rezeki. Bapak biasanya hanya melatih anaknya dalam kekuatan dan keterampilan fisik atau mengikutkan anak-anak mereka ke hutan mencari rotan atau kayu atau mengikutkan bekerja di kebun dan di sawah .

Sejak kecil anak-anak sudah dilatih dan diajar sopan santun terhadap orang tua dan terhadap kakak dan saudara - saudaranya begitu pula terhadap tetangga-tetangga. Di masyarakat yang bertindak sebagai pendidik ialah pemuka-pemuka masyarakat atau orang yang dituakan dalam kampung itu. Orang seperti ini mempunyai kelebihan terhadap warga masyarakat lainnya seperti : ahli dalam ilmu-ilmu gaib, mengetahui macam-macam ketangkasan bela diri dan ilmu-ilmu pengobatan penyakit, disebut Sanro (dukun).

Dia akan ditaati dan didengar petuahnya selama dia tetap dalam tingkah laku dan perbuatan yang benar. Oleh karena itu dia harus selalu menjauhkan diri dari segala perbuatan dan hal-hal yang tercela .

Bila sekali waktu ia berbuat tercela maka masyarakat tidak akan mengakuinya lagi sebagai panutan atau pimpinan .

Setelah masuknya Islam maka mulailah nilai-nilai yang diajarkan itu bertambah luas dengan adanya nilai-nilai dan aturan-aturan Islam .

Pendidikan di rumah-rumah selain mengajarkan nilai-nilai adat juga mengajarkan nilai-nilai dan aturan-aturan Islam. Pendidikan belajar membaca Al Qur'an pun mulailah dirumah-rumah tertentu. Karena menurut anggapan mereka bahwa untuk menjadi umat Islam yang baik syaratnya ialah harus pandai membaca Al Qur'an. Hal ini erat kaitannya dengan ibadah Shalat.

Pendidikan membaca Al Qur'an dibeberapa tempat antara lain :

1. Di rumah, pendidikan Al Qur'an dipimpin sendiri oleh ibu rumah tangga. Juga biasanya dibantu oleh ayah atau anak yang tertua. Diadakan pada waktu selesai sembahyang magrib atau asar.

2. Mendatangi guru-guru mengaji ke rumahnya. Di pusat-pusat kerajaan ada pula sebaliknya yaitu guru-guru mengaji itu yang mendatangi istana untuk mengajar anak-anak bangsawan membaca Al Qur'an .

Guru Ngaji seperti ini digelar Gurunna Andi (Guru anak bangsawan). Yang diajarkan bukan hanya membaca Al Qur'an saja, tetapi juga pelajaran keterampilan bela diri (pencak silat), ke tangkasan menunggang Kuda dan ilmu-ilmu kekebalan dan lain sebagainya.

Memilih guru mengaji diutamakan orang yang memang keturunan guru, orang yang masih ada hubungan keluarga dengan anak yang akan diajar dan orang yang ahli membaca Al Qur'an. Jadi guru-guru ngaji itu umumnya mengajar anak-anaknya atau kemenakan-kemenakannya atau cucunya.

Di Desa Batu ada 5 orang guru mengaji yang terkenal satu orang diantaranya berasal dari Rappang yaitu Mahmud Mide .

Disamping dia mengajar mengaji dirumahnya, juga dia mengajar agama di SD No. 1 Batu. Mengajar ngaji dirumah ia dibantu oleh isterinya. Mahmud Mide adalah anak dari Katte Mide dari desa Bulu (Rappang). Di Desa Lancirang ada tidak kurang 8 orang guru mengaji yang terkenal, diantaranya ada satu orang yang berasal dari Enrekang .

3. Mengaji di Mesjid. Yang memimpin pengajian di Mesjid ialah imam mesjid sendiri atau orang yang ditunjuk olehnya .Di Desa Batu ada 11 buah mesjid yang menjadi tempat belajar mengaji. sedangkan di Desa Lancirang tidak kurang dari 7 buah mesjid ditambah pula dengan madrasah yngh diasuh oleh organisasi Muhammadiyah dan As Adiyah .

Guru-guru mengaji ini tidak mempunyai penghasilan - tertentu seperti Pegawai Negeri kecuali guru-guru mengaji- Di Madrasah Muhammadiyah dan As Adiyah. Sebagai imbalan jasa, mereka hanya biasa dibantu tenaga oleh murud- muridnya mencangkul di kebun / di sawah, membersihkan halaman rumah, mengangkat air dari sungai, atau mengambil kayu bakar . Sekali setahun mereka menerima zakat Fitrah dari anak-anak mengaji dan keluarganya yaitu pada bulan Ramadhan. Namun demikian guru-guru mengaji tersebut tetap tekun dan patuh melaksanakan tugasnya., karena didorong - oleh bayangan pahala yang akan diperoleh kelak .

Menjadi hak bagi seorang guru mengaji ialah diundang pada setiap ada upacara-upacara di kampung atau di desa, lebih-lebih bila ada acara keagamaan, karena seorang guru mengaji di Desa itu dianggap orang yang mengandung berkah .
Terutama acara-acara dari keluarga anak mengajinya .

Adapun tingkat-tingkat kelas (kelompok) anak-anak yang belajar mengajji pada seorang guru dapat dibedakan - atas :

- Tingkat mengeja yaitu mengenal huruf Al Qur'an .
- Tingkat membaca bentuk-bentuk kalimat .
- Tingkat Juz Amma yaitu membaca Jus-juz Al Qur'an yang lebih panjang .
- Tingkat melagu yaitu belajar membaca dengan memperhatikan ilmu Tajwid dan irama lagunya .

Dalam rangka peningkatan pengajian Al Qur'an di Desa Batu maka oleh kepala Desa Batu pada bulan Desember 1983 untuk memasuki tahun 1984 diinstruksikan kepada semua Kepala Lingkungan untuk membentuk kelompok pengajian anak-anak pada setiap RT yang ada di wilayahnya .

Instruksi ini dikeluarkan melalui rapat LKMD pada hari Sabtu 3 Desember 83 yang sempat dihadiri oleh penulis .

Selanjutnya di Desa Batu dan Lancirang didapatkan pula bentuk pendidikan yang diadakan sesudah sembahyang subuh dan sembahyang magrib. Materi yang diberikan pada setiap ceramah seperti itu berkisar pada peningkatan pemahaman tentang ajaran agama Islam, seperti ibadah, muamalah dan soal soal mengenai hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat . Pidato atau ceramah-ceramah seperti ini pada bulan Ramadhan lebih ditingkatkan frekwensinya . Karena itu biasanya di bulan Ramdhan di undang ulama-

ulama dari luar Desa untuk memberikan ceramah, terutama dari Pangkajene, Tanru Tedong dan Rappang . Mubalig -mu balig yang didatangkan dari luar desa itu karena tempatnya-jauh maka bagi mereka biasanya setelah selesai melaksana-kan tugas diberikan uang transport yang sebesar antara Rp 1.000 dan Rp. 2.000.-

Biasa juga dijamu di rumah Kepala Desa atau imam Desa se bagai pertanda keakraban . .

Untuk emenjadi penceramah pada mesjid-mesjid yang ada dikedua Desa tersebut harus terlebih dahulu dipilih oleh Panitia mesjid yang bersangkutan terutama ulama-ulama - yang berasal dari luar Desa .

Dalam pemilihan ini diutamakan orang yang sudah tergolong sebagai Ulama / Kiayi (Panrita) baik ilmunya maupun ting kah lakunya (masipa nabi) artinya bertingkah seperti Nabi . Lebih baik lagi bila Ulama yang akan dipanggil itu mempuny ai bekas murid dikampung itu . Jadi secara langsung ada yang mengetahui identitasnya dan riwayat hidupnya . Melalui ceramah seperti itu secara langsung dapat mening -katkan ketakwaan terhadap Allah SWT .

Selain dari pada itu Desa Batu juga dijumpai bentuk pendidikan berupa diskusi/dialog . Pendidikan seperti ini terutama dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang ter golong anggota Tareka Khalawatiah .

Dialog itu diadakan pada setiap selesai shalat lima waktu se cara berjamaah. Materi dialognya terutama bertujuan untuk pemahaman tentang hakekat sesuatu berdasarkan konsep Is- lam. Jadi bersifat Tasauf (Filasafat Islam) . Setiap dialog yang diadakan dipimpin langsung oleh Ketua Kelompoknya - yang disebut Khalifah ((di Desa Batu hanya ada satu orang - khalifah), Khalifah biasa dipanggil Puang Lompo .

Untuk diangkat (ditunjuk) sebagai khalifah harus betul- be tul menguasai ilmu tasauf, bermoral tinggi, bertingkah laku yang baik dan dapat menjadi contoh kepada seluruh anggotanya .

Penganut tarekat Khalawatiah ini sangat patuh dan fanatik terhadap Khalifahnya sehingga sewaktu-waktu dia dapat dicium kakinya ~~deimi~~ untuk mendapatkan berkah.

Khalifah adalah model manusia yang paling baik di dunia, ka rena itu dari padanya terpancar selalu sinar berkah. Menjadi Khalifah sama halnya dengan menjadi guru mengaji, tidak -

mempunyai penghasilan tetap . Yang biasa mereka terima hanyalah sumbangan-sumbangan suka rela dari anggotanya atau murid-muridnya berupa benda ataupun lainnya . Namun demikian kenyataannya, hidup seorang Khalifah itu lebih makmur dibanding dengan warga masyarakat lainnya yang sehari-harinya membanting tulang mencari rezeki .

Dengan predikat Khalifah seorang mempunyai kekuatan kekuasaan dan wewenang untuk mengatur dan menguasai jemaahnya. Semua kegiatan dan upacara dari anggota harus di laporkan kepada Khalifah untuk mendapatkan restu. Penggantian seorang Khalifah bersifat turun-temurun, paling sedikit pengganti itu ada hubungan keluarga dari khalifah terdahulu oleh karena itu biasanya sebelum meninggal, khalifah itu sudah mempersiapkan calon penggantinya .

Dari uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa pola atau sistem yang mereka gunakan dalam melaksanakan pendidikan dalam arti mewariskan nilai-nilai budaya dan pembentukan kepribadian generasi mudanya adalah sistem demokrasi .

Si Guru mengaji sebagai pemimpin dapat melayani anak didiknya yang mempunyai kepentingan dan kemampuan berbeda-beda demikian juga halnya Muballigh atau Khalifah yang memimpin jemaahnya dari bermacam-macam tingkat pengetahuan. Mereka memberikan kesempatan untuk memajukan pertanyaan-pertanyaan atau masalah-masalah untuk dibahas bersama. Jadi dari sistem kepemimpinan yang tanpa struktur kenyataannya dapat lebih efektif dan efisien dalam arti pencapaian tujuan dapat menyatu dengan individu anggota atau anak didiknya .

Yang menjadi hak seorang pemimpin dibidang pendidikan non formal ini ialah dihormati oleh muridnya atau anak didiknya dan mendapatkan imbalan materi dan non materi . Sedangkan dia berkewajiban untuk mewariskan nilai-nilai ilmu dan keterampilan-keterampilan yang ia miliki kepada murid atau anak didiknya. Sebagai konsekuensi seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya ialah bahwa ia betul-betul harus dapat dicontoh baik ilmunya maupun tingkah lakunya. Dia betul-betul harus memelihara diri dari tingkah laku yang tercela karena cela sedikit saja dapat menghapuskan kekuasaan dan wewenangnya terhadap masyarakat. Seorang guru yang betul-betul bersih dari segala ma-

cam hal yang tercela itulah yang menurut mereka yang berhak diberi gelar Gurutta/ Anregurutta (guru kita) .

Seorang yang sudah mendapatkan gelar Gurutta itu berarti dia betul-betul sudah bersih dari perbuatan tercela dan sudah dapat dijadikan contoh tauladan dunia akhirat .

Istilah Bugisnya :

" RITUDANGI PAJJELLONA RI PABBANUAE "

Maksudnya : Segala petua, saran-saran serta pendapatnya diikuti oleh orang banyak .

Sedangkan istilah Gurue (guru) ini biasanya diperuntukkan bagi pegawai-pegawai Syara' yang biasa dipanggil membaca barzanji atau membaca do'a pada pesta-pesta.

Seorang pemimpin agama yang sudah bergelar Guruttapengaruhnya bukannya saja terbatas pada wilayah Desanya tetapi bisa lebih luas lagi sampai ketingkat propinsi seperti contohnya : Gurutta H.Abd. Muin Yusuf di Sidrap, Gurutta K.H Yunus Maratang di Sengkang .

Disamping pendidikan non formal seperti yang disebutkan di atas yang seluruh proses pertumbuhannya dari masyarakat itu sendiri, masih dijumpai pula bentuk pendidikan yang diatur dari atas. Maksudnya ialah bahwa baik pimpinannya maupun jenis kegiatannya dan mata-mata pelajarannya ditentukan dari atas seperti : Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Pramuka .

Perkembangan PKK dan Pramuka di Desa Lancirang kelihatan lebih berkembang dibanding dengan di Desa Batu. Hal ini mungkin karena pola perkampungannya yang terpencar-pencar dan hubungan satu kampung dengan kampung lainnya sulit sehingga kegiatan yang dilakukannya masih terbatas pada ibukota Desa saja yaitu Barukku dengan ibukota kecamatan Tanru Tedong lebih mudah, karena sudah ada mobil yang datang setiap waktu dari kota .

Pendidikan formal di kedua Desa yaitu Batu dan Lancirang meliputi : Taman kanak-kanak (TK), hanya terdapat di Lancirang, Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) . Seluruh kurikulum, jenis-jenis kegiatan, waktu belajar, jam belajar dan sarana dipersiapkan oleh pemerintah. Kepala Sekolah dan guru-gurunya semuanya diangkat oleh pemerintah dengan persyaratan-persyaratan

yang ditentukan sendiri oleh Pemerintah .

Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi Guru SD atau SMP berlaku umum untuk seluruh In donesia yaitu :

1. Harus berijazah kependidikan .
2. Lulus Test menjadi Pegawai Negeri .

Cara pengangkatannya ialah : dengan melalui SK sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang diterbitkan oleh Depdikbud - atau Pemda bila yang bersangkutan itu adalah Pegawai daerah . Setelah mereka itu diangkat dengan SK maka mereka berkewajiban mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil . Atas dasar pengabdianannya itu dia berhak menerima gaji setiap bulan, naik pangkat pada waktu tertentu dan mendapatkan pelayanan kesejahteraan bersama keluarganya .

Oleh karena itu pemimpin (guru) dibidang pendidikan formal dalam melaksanakan tugasnya selalu harus berfihak - kepada atasannya . Karena mereka sebenarnya adalah sebagai pelaksana perintah/instruksi dari atasannya yaitu pemerintah .

Seorang guru sekolah di Desa Batu dan Lancirang oleh masyarakat dipanggil dengan gelar Pak Guru atau Tuan Guru . Umumnya guru-guru yang bertugas di kedua desa ini berasal dari luar. Di Desa Batu diantara 6 buah SD hanya satu yang dikepalai oleh penduduk asli Desa Batu, sedangkan di Desa - Lancirang terdapat 1 buah Taman Kanak-Kanak, 10 buah SD dan 2 buah SMP (satu diantaranya diasuh oleh Muhammadiyah) .

BAB VIII .

BEBERAPA ANALISA .

1. PENGARUH KEBUDAYAAN TERHADAP SISTEM KEPEMIMPINAN DI PEDESAAN .

Pada uraian di bab III telah disinggung bahwa : Kepemimpinan itu muncul bersamaan dengan munculnya kehidupan manusia secara bersama (bermasyarakat), yang bermula di gua-gua sejak dahulu kala . Bahkan didalam ajaran Islam dikatakan bahwa kepemimpinan itu muncul sejak Adam dan Hawa hidup bersama. Pada saat itu seseorang yang diangkat menjadipemimpin harus memiliki kekuatan fisik dan mental yang kuat dan punya keistimewaan menundukkan mahluk-mahluk gaib yang sering mengganggu kehidupan manusia. Karena tugas dan kewajiban seorang pemimpin ialah melindungi dan mensejahterahkan rakyatnya lahir batin serta menjaga keseimbangan kehidupan dan lingkungan alamnya .

Kepemimpinan sebagai salah satu unsur kebudayaan manusia, senantiasa berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan kebudayaannya. Makin maju dan berkembang suatu masyarakat, makin kompleks dan banyak jenisnya pemimpin. Perkembangan kepemimpinan suatu masyarakat itu meliputi segala aspeknya.

Oleh karena itulah pada masyarakat yang masih sederhana akan dijumpai pula kepemimpinan yang sederhana, baik persyaratan, hak dan kewajiban-kewajibannya maupun tugas-tugasnya. Seseorang pemimpin walaupun dia mendapatkan kedudukan yang istimewa tetapi ia tetap dipandang sebagai anggota masyarakat biasa. Dia dibutuhkan oleh masyarakat hanya karena dia memiliki kelebihan-kelebihan dari anggota masyarakat biasa berupa kepandaian kekuatan gaib .

Seorang pemimpin pada saat itu memegang pemerintahan tidak secara mutlak, atau aristokrasi.

Dalam perkembangan selanjutnya, muncullah type kepemimpinan yang bersifat mutlak, dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan raja. Bentuk-bentuk kepemimpinan seperti tersebut diatas dijumpai pada saat munculnya kerajaan diberberapadaerah di Sulawesi Selatan, termasuk kerajaan Sidenreng Rappang.

Pada saat itu ada anggapan atau kepercayaan dari kalangan rakyat bahwa : Arung (raja) itu adalah orang dari keturunan To ma

nurung yaitu orang yang merupakan asal mula nenek moyang raja-raja di Sulawesi Selatan yang turun dari kayangan atau suatu tempat yang tinggi.

Oleh karena itulah raja-raja itu dianggap tidak samadengan orang-orang biasa. Berdasarkan kepercayaan dan anggapan itulah seorang raja sangat dihormati oleh rakyatnya.

Di kerajaan Sidenreng dan Rappang pada saat itu sesuai dengan yang tertulis dalam lontarak terkenal ikrar (pernyataan kesetiaan) rakyat kepada Arung atau raja yang memegang pemerintahan. Ikrar tersebut sebagai berikut :

" Tenri Cacca mupojie, Tenri poji mucaccae. Angikkokiraukkaju, Solokko nikibatang. Lompok-lompok mutettongi Lompok-Lompok kilewo .

Bulu-Bulu mutettongi, bulu-bulu kilewo. Makkedako mutenribali, mettekko mutenri Sumpalak "

Maksudnya :

Takkan kami tolak apa yang engkau sukai. Takkan kami sukai apa yang engkau tolak.

Engkau adalah arus, sedang kami adalah batang kayu.

Lembah tempat engkau berpijak, lembah pula yang engkau pagari. Bukit tempat engkau berpijak, bukit yang kami pagari.

Sabdamu kami junjung, titahmu kami patuhi.

Pernyataan kesetiaan rakyat kepadanya hanya sepanjang ia dapat memegang dan mengembangkan nilai-nilai adat yang diramatkan oleh masyarakatnya. Bila hal itu tidak ada pada dirinya maka serentak rakyat akan melaknatnya.

Ikrar kesetiaan itu erat sekali kaitannya dengan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang calon Arung (raja). Menurut adat di kedua kerajaan tersebut di atas syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin adalah sebagai berikut :

1. To Malebbi artinya orang mulia. ini terutama dilihat dari keturunannya (bangsawan atau bukan).
2. To Acca artinya orang pandai.
3. To Warani artinya orang berani .
4. To Sugi artinya orang kaya .

(Desa Batu dan Lancirang, 10-10-1983)

Persyaratan-persyaratan seperti tersebut di atas dimaksudkan agar seorang pemimpin betul-betul mempunyai kelebihan dari pada rakyat yang dipimpinnya.

Bila seorang pemimpin yang menurut penilaian betul-betul telah memenuhi persyaratan menurut nilai-nilai dan nama-nama yang dijunjung tinggi oleh masyarakat maka kepada pemimpin seperti itulah ditujukan iktar (pernyataan kesetiaan) seperti tersebut di atas. Bahkan bukan hanya sampai disitu saja kalau betul-betul raja itu berlaku seperti apa yang diharapkan maka kepadanya di perlakukan iktar :

" Polo pang Polo panni "

maksudnya : Kalau perintah raja, tidak ada alasan menolak, segalanya dikerahkan untuk melaksanakan .

" Napo Sirii ajjoarengge, Napomatei Joae "

Maksudnya : Kalau raja dipermalukan, kami rakyat lebih baik mati saja .

Pernyataan-pernyataan seperti tersebut di atas menunjukkan bahwa bila sesuatu itu telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh adat, apapun yang akan terjadi harus dilaksanakan / dijalankan .

Pernyataan-pernyataan seperti tersebut di atas juga sekaligus menjadi kontrol bagi tindakan-tindakan raja (pemimpin). Sebab bila seorang pemimpin sudah tidak dapat menjadi panutan rakyat maka dia akan serentak diturunkan oleh rakyatnya seperti halnya yang dialami oleh salah seorang Arung Rappang yang pernah mengadakan kerja sama dengan Arung Pammana yang dianggap merugikan rakyat maka ia serentak diturunkan dari tanyanya . Karena menurut adat Bugis bahwa pemimpin tana (pemerintah) itu adalah merupakan pusat (tumpuan) harapan rakyat untuk tetap terpeliharanya nilai-nilai dan norma - norma yang menjadi pedoman hidup masyarakat. Jika hal seperti ini sudah tidak dimiliki oleh seorang pemimpin maka pada saat itulah tiba saatnya diadakan penggantian .

Sebagai pasangan pernyataan dari rakyat seperti tersebut diatas maka oleh Arung (raja) dibalas pula dengan pernyataan sebagai berikut :

" Assama iyyako muabbulo sipeppa, Mupenrekengak Nanre manasu "

Maksudnya : Bermusyawarah dan bermufakatlah karena apa yang telah kamu mufakati, itulah yang akan aku jalankan.

" Pura taro Arung, teppura taro adek. Pura taro adek teppura taro maranang "

Maksudnya : Keputusan raja dapat dirobah, Keputusan adat tidak dapat dirobah. Keputusan adat dapat dirobah, Keputusan bersama tidak dapat dirobah .

Setelah masuknya agama Islam di Sidenreng Rappang maka di tambah pula menjadi :

" Pura taro maranang teppura taro syarak (Agama) "

Maksudnya : Keputusan bersama dapat dirobah, Keputusan agama tidak dapat dirobah .

" Teccau Maegae, tebbakke tongengge "

Maksudnya : Yang banyak tak pernah tersisihkan, yang benar tak pernah kalah .

Dengan pernyataan-pernyataan timbal balik seperti tersebut diatas suatu pertanda bahwa di Sidenreng Rappang sejak dahulu sudah dikenal Sistem Pemerintahan yang bersifat Demokrasi . Dalam bahasa Bugis pemerintahan seperti ini dikenal dengan istilah Mangolo Pasang, maksudnya ada komunikasi timbal balik dari raja kepada rakyat dan dari rakyat kepada raja.

Dari uraian-uraian seperti tersebut diatas jelas terlihat bahwa sistem nilai adat mempunyai peranan penting dalam interaksi rakyat dengan pimpinannya dan sebaliknya. Juga dapat dilihat bahwa seluruh kegiatan pemerintahan/politik didasarkan pada sistem masyarakat mufakat.

Keputusan-keputusan yang harus dilaksanakan terlebih dahulu melalui musyawarah. Hal ini jelas dilihat pada ikrar raja seperti yang telah disebutkan diatas yang berbunyi " Assama iyyako mu abbulo sipeppa mupenrikengak nanre manasu " yang maksudnya bermusyawarahlah untuk mengambil keputusan, karena keputusan itulah yang akan aku laksanakan .

Disamping itu juga dapat dilihat bahwa, sejak masuknya Islam di Sidenreng Rappang yaitu kira-kira tahun 1908/1909 maka nilai-nilai Islampun mulai berbaur dengan nilai-nilai adat untuk dijadikan pedoman hidup bermasyarakat. Ini dibuktikan dengan ikrar raja seperti tersebut diatas, setelah masuknya Islam disempurnakan dengan menambahkan nilai-nilai Islam sehingga berbunyi sebagai berikut :

" Pura taro marang teppura taro Syarak "

Maksudnya : Keputusan bersama dapat dirobah, Keputusan agama tidak dapat dirobah .

Di Kerajaan Sidenreng dan Rappang jabatan pemimpin (Arung) tidak merupakan warisan atau turunan saja. Tetapi ia merupakan jabatan yang tersedia bagi siapa saja yang memenuhi persyaratan dan terpilih dalam musyawarah pemilihan. Hal ini terbukti bahwa dalam sejarah kedua kerajaan tersebut ada beberapa orang raja yang merangkap sebagai Arung pada dua kerajaan dalam waktu yang bersamaan, bahkan dengan kerajaan Sawittopun pernah terjadi Arung Rappang merangkap sebagai Arung Sawitto. Dalam hal ini bukan berarti bahwa salah satu diantara kerajaan itu yang menjadi daerah takluk. Tetapi raja yang telah memangku jabatan di Rappang itu terpilih pula untuk menjadi raja di Sawitto. Hal tersebut sudah menjadi tradisi yang berlaku sejak dahulu kala . Ini mungkin terjadi karena kerajaan-kerajaan tersebut sub - sub sistem dari suatu sistem yang lebih besar yang terkenal dengan istilah : Lima Ajattappareng . Lima Ajattappareng ini meliputi wilayah-wilayah Barru, Pare-pare, Pinrang, Sidenreng dan Rappang .

Eratnya hubungan antara kerajaan Sidenreng dan Rappang dapat dilihat pernyataan dalam lontarak yang maksudnya sebagai berikut :

1. Tidak ada batas antara Sidenreng dan Rappang. Hanya dapat diketahui pada musim panen. Yang mengangkut padinya ke utara itulah rakyat Rappang, yang mengangkut padinya ke selatan itulah rakyat Sidenreng.
2. Apabila Rappang menghadapi bahaya pada sore harinya maka selambat-lambatnya Sidenreng akan memberikan bantuan e sok paginya, demikian pula sebaliknya.
3. Apabila kursi kerajaan Rappang lowong dan tidak ada yang mendudukinya, maka pemangku adat dapat memilih salah satu tenaga dari Sidenreng.

Dari uraian seperti tersebut diatas jelaslah eratnya hubungan antara Rappang dan Sidenreng, sehingga dari segi pimpinan namun pun seolah-olah tidak ada batas antara keduanya.

Yang membedakannya hanyalah istilah kerajaan dan addatuang. Kerajaan Rappang Addatuang Sidenreng .

Kedua kerajaan pada zaman pemerintahan Belanda masing-masing menjadi Swapraja Sidenreng dan Swapraja Rappang. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 keduanya digabungkan menjadi satu daerah tingkat II dengan nama Kabupaten Siden

reng Rappang disingkat Kab. Sidrap. Pembentukannya menjadi Dati II didasarkan pada Peraturan No. 29/1959.

Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu maka nilai-nilai dan aturan-aturan Nasional Indonesia yang berdasar kan Pancasila dan UUD 45 mulai memasuki wilayah pedesaan Dati II Sidenreng Rappang.

Telah disinggung pada bab II bahwa wilayah Dati II Sidenreng Rappang dibagi atas 7 buah kecamatan, 32 buah Desa.

Dengan masuknya nilai-nilai dan aturan-aturan Nasional keseluruh wilayah Desa-desa maka mulai pula terjadi pembauran antara ketiga nilai tersebut yaitu adat, Islam dan Nasional Indonesia atau Pancasila dan UUD 45.

Dari hasil persentuhan ketiga sistem nilai tersebut terjadilah perubahan-perubahan dan pergeseran nilai dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat pedesaan. Khususnya dibidang kepemimpinan pergeseran-pergeseran dapat dilihat misalnya dalam hal persyaratan seorang calon pimpinan seperti yang telah disebutkan pada permulaan uraian ini. Ada diantara persyaratan itu mengalami pergeseran dan ada pula yang sama sekali dihilangkan.

Setelah masuknya nilai Pancasila dan UUD 45 maka persyaratan-persyaratan itu menjadi lebih sederhana seperti yang berlaku sekarang di kedua Desa lokasi penelitian sebagai berikut :

1. To Malebbi artinya orang mulia, terutama dilihat dari akhlak budi pekertinya. Jadi tidak lagi dari segi keturunan.
2. To Acca artinya orang pintar atau mampu.
3. To riatepperi artinya orang dipercaya. Ini biasanya dibuktikan dari adanya dukungan dari golongan tertentu atau instansi tertentu.

Jadi dengan demikian dapat dilihat bahwa persyaratan-persyaratan itu lebih disederhanakan atau dengan kata lain telah mengalami pergeseran-pergeseran.

Hal ini mungkin pula disebabkan oleh perkembangan-perkembangan yang telah dicapai terutama dibidang pendidikan.

Namun demikian dapat dilihat bahwa persyaratan-persyaratan resmi yang didasarkan pada nilai-nilai Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam UU No. 5 tahun 1979 lebih diperinci lagi persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang calon pimpinan. Hal ini mungkin disebabkan karena persyaratan-persyaratan administratif sudah termasuk didalamnya sehingga point-point persyaratan itu lebih banyak. (lihat uraian pada

bab II tentang persyaratan untuk seorang pemimpin formal).

Dalam aspek yang menyangkut hak, kewajiban dan tanggung jawab seorang pimpinanpun telah mengalami pengembangan. Sehingga perlu diatur dengan Undang-Undang yaitu Undang-Undang No. 5 tahun 1979.

Pada zaman dahulu, bila terjadi sengketa atau konflik antar warga masyarakat, penyelesaiannya selalu diusahakan melalui musyawarah dan mufakat bersama. Penyelesaian tersebut didasarkan pada prinsip yang diterima turun temurun yang disebut "Sitaro Riale" artinya penyelesaian dengan perdamaian kedua belah pihak .

Pada saat ini penyelesaian masalah-masalah seperti itu lebih banyak dilakukan melalui prosedur hukum yang berlaku. Sehingga seolah-olah tugas-tugas pemimpin masyarakat itu sebahagiannya dialihkan kepada pemimpin-pemimpin yang diatur berdasarkan nilai-nilai Nasional Indonesia. Dengan kata lain bahwa nilai-nilai adat dan agama telah mengalami kemerosotan sedangkan nilai Nasional Indonesia semakin mantap. Walaupun demikian besar dan luasnya perubahan-perubahan yang terjadi itu pada setiap bidang kehidupan masyarakat itu tidak sama. Maksudnya perubahan dibidang sosial, ekonomi, politik, pendidikan tidaklah sama luas dan besarnya.

Perubahan-perubahan dimaksud kelihatannya lebih besar dibidang politik (kepemimpinan)dibanding dengan bidang-bidang lainnya.

Dengan kestabilan keamanan dan hasil pembangunan yang dicapai pada saat ini khususnya di wilayah Dati II Sidrap mempunyai dampak positif terutama dibidang komunikasi Desa dan kota kecamatan dan kabupaten bahkan dengan ibukota propinsi. Pengaruh keterbukaan desa-desa sekarang ini mempunyai dampak yang besar terhadap sistem kepemimpinan baik tugas maupun jenis-jenis pemimpin.

Makin terbukanya desa makin banyak pemimpin dan jenis pemimpin, tertutupnya Desa makin besar kecenderungan bahwa wewenang hanyalah hanyalah ditangan orang saja (Astrid.S.Susanto) .

Keadaan seperti ini dapat dilihat di Desa Batu dan Lancirang. Jenis pemimpin di Desa Lancirang lebih banyakmacamnya bila dibanding dengan yang dijumpai di Desa Batu. Karena Dsa Lancirang lebih dahulu terbuka (lancar) komunikasinya dengan kota dari pada desa Batu yang praktis baru terbuka setelah berakhirnya kekacauan yaitu pada tahun 1965.

Sejak proklamasi kemerdekaan sampai saat ini tidak adalagi Desa di wilayah Sulawesi Selatan yang tidak dicapai atau dijangkau oleh nilai dan norma-norma Nasional Indonesia.

Dengan demikian praktis diseluruh Desa-desanya di Sulawesi Selatan sekurang-kurangnya ada tiga macam sumber nilai atau aturan yang menjadi sumber pola tingkah laku masyarakat sehari-hari.

Adanya tiga macam sistem nilai yang menjadi pola tingkah laku masyarakat pedesaan sekarang ini, dalam kenyataannya menjadi penyebab terjadinya konflik dikalangan masyarakat. Konflik dalam diri sendiri dan konflik dalam interaksi antar warga masyarakat termasuk dengan pimpinannya. Konflik dalam dirinya timbul terutama dalam mengambil keputusan tentang nilai apa yang ia pakai sesuai dengan masalah yang dihadapi. Sedangkan konflik dengan rakyat terjadi bila dalam menghadapi suatu masalah masing-masing menggunakan nilai yang berbeda. Seperti contohnya dalam masalah Keluarga Berencana (KB) di Desa Batu .

Program KB ini pada umumnya oleh rakyat ditanggapi dengan dasar nilai adat dan agama. Dalam adat dan agama anak adalah merupakan pembawa rezeki. Jadi banyak anak itu berarti banyak rezeki, bahkan menurut keyakinan Islam bahwa anak itu lahir bersama rezekinya sendiri.

Dari pihak pemerintah (Kepala Desa) membawa KB itu ke Desanya dengan dasar nilai Nasional. KB adalah merupakan program Nasional yang harus dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia termasuk yang ada di pedesaan. Dengan demikian terjadilah gap dalam komunikasi.

Bila telah ada informasi melalui kepala-kepala lingkungan bahwa petugas KB akan datang ke Desa, maka serentak rakyat meninggalkan rumahnya pergi bekerja di kebun atau masuk hutan untuk mencari rotan atau kayu. Mereka baru pulang setelah petugas KB pulang ke Kecamatan. Hal ini bisa terjadi karena masih tetap berpegang pada nilai adat dan agama. Untuk mengetahui hal ini maka oleh Kepala Desa sebagai penguasa tunggal di Desanya, mencari jalan untuk mengatasinya. Yaitu dengan mengadakan pendekatan melalui pemuka-pemuka masyarakat yang terdiri dari Kepala-Kepala Dusun/Kampung, Ketua RK dan RT

Sejak proklamasi kemerdekaan sampai saat ini tidak ada lagi Desa diwilayah Sulawesi Selatan yang tidak dicapai atau dijangkau oleh nilai dan norma-norma Nasional Indonesia.

Dengan demikian praktis diseluruh Desa-desa di Sulawesi Selatan sekurang-kurangnya ada tiga macam sumber nilai atau aturan yang menjadi sumber pola tingkah laku masyarakat sehari-hari.

Adanya tiga macam sistem nilai yang menjadi pola tingkah laku masyarakat pedesaan sekarang ini, dalam kenyataannya menjadi penyebab terjadinya konflik dikalangan masyarakat. Konflik dalam diri sendiri dan konflik dalam interaksi antar warga masyarakat termasuk dengan pimpinannya.

Konflik dalam diri sendiri dan konflik dalam interaksi antar warga masyarakat termasuk dengan pimpinannya. Konflik dalam diri nya timbul terutama dalam mengambil keputusan tentang nilai apa yang ia pakai sesuai dengan masalah yang dihadapi. Sedangkan konflik dengan rakyat terjadi bila dalam menghadapi suatu masalah masing-masing menggunakan nilai yang berbeda. Seperti contoh dalam masalah Keluarga Berencana (KB) di Desa Batu.

Program KB ini pada umumnya oleh rakyat ditanggapi dengan dasar nilai adat dan agama. Dalam adat dan agama anak adalah merupakan pembawa rezeki. Jadi banyak anak itu berarti banyak rezeki, bahkan menurut keyakinan Islam bahwa anak itu lahir bersama rezekinya sendiri.

Dari pihak pemerintah (Kepala Desa) membawa KB itu ke Desanya dengan dasar nilai Nasional. KB adalah program Nasional yang harus dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia termasuk yang ada di pedesaan. Dengan demikian terjadilah gap dalam komunikasi.

Bila telah ada informasi melalui kepala-kepala lingkungan bahwa petugas KB akan datang ke Desa, maka serentak rakyat meninggalkan rumahnya pergi bekerja di kebun atau masuk hutan untuk mencari rotan atau kayu. Mereka baru pulang setelah tugas KB pulang ke Kecamatan. Hal ini bisa terjadi karena mereka masih tetap berpegang pada nilai adat dan agama. Untuk mengatasi hal ini maka oleh Kepala Desa sebagai penguasa tunggal di Desanya, mencari jalan untuk mengatasinya. Yaitu dengan mengadakan pendekatan melalui pemuka-pemuka masyarakat yang terdiri dari Kepala-Kepala Dusun/Kampung, Ketua RK

dan RT, serta pemimpin-pemimpin dibidang agama yang terdiri dari Imam Desa dan Imam Kampung.

Dengan menggunakan tenaga-tenaga pemuka masyarakat dan pemuka agama diadakanlah penjelasan-penjelasan kepada seluruh rakyat melalui mesjid-mesjid pada waktu sembahyang berjamaah atau sembahyang jumat. Melalui cara ini barulah timbul saling pengertian.

Jadi jelas dapat dilihat bahwa kekuasaan di Desa lebih banyak ditangan Kepala Desa, tetapi pengaruh sebahagian besar ditangan pemimpin informal.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka seorang pemimpin utamanya Kepala Desa sekarang ini memikul tanggung jawab yang jauh lebih besar dibanding dengan tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin pada masa lalu. Karena pada masa dahulu pemimpin dengan rakyatnya masing-masing hanya berpegang pada adat saja. Sedangkan sekarang sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa di Desa Batu dan Lancirang sudah ada tiga macam nilai sekaligus yang menjadi pedoman atau pegangan. Oleh karena itu pemimpin formal dipedesaan termasuk Kepala Desa, harus taat melaksanakan instruksi dan perintah Bupati dan Camat tetapi disamping itu pula dia harus tetap menghormati pemuka-pemuka masyarakat setempat.

2. SISTEM KEPEMIMPINAN PEDESAAN SEHUBUNGAN DENGAN SISTEM ADMINISTRASI POLITIK NASIONAL .

Secara teoritis dapat dikatakan bahwa sejak setelah proklamasi kemerdekaan 17 - 8 - 1945 seluruh wilayah Republik Indonesia sudah terjangkau oleh nilai-nilai dan aturan-aturan Nasional melalui jaringan-jaringan administrasi pemerintah. Karena sejak itulah berakhirnya pengaruh kolonial secara resmi.

Secara praktis dapat diduga bahwa pengaruh nilai-nilai Nasional di Desa-desa diwilayah Dati II Sidenreng Rappang sudah mantap sejak pembentukan Dati II tersebut pada tahun 1959. Karena diduga pada saat itulah mulainya pengaruh pemerintah (pejabat) negara akan lebih intensif keseluruh wilayah kekuasaan nya sesuai dengan wewenang otonomi yang diterimanya. Tetapi dalam kenyataannya tidak demikian di Desa-desa wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Hal ini disebabkan antara lain ialah karena hambatan komunikasi desa-desa terpencil dan ditambah pula dengan kekacauan yang melanda daerah tersebut yang berlangsung kurang lebih 15 tahun. Yaitu kekacauan yang disebabkan oleh gerombolan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang berlangsung dari tahun 1951 s/d 1965. Sedangkan kekacauan yang disebabkan oleh pemberontakan G 30 S/PKI berlangsung dari tahun 1965 s/d 1966.

Akibat dari kedua macam hambatan diatas maka dalam kenyataannya bahwa pengaruh nilai-nilai dan aturan-aturan Nasional Indonesia barulah mulai mantap pada kira-kira tahun 1966. Pada tahun inilah dimulainya fungsionalisasi semua aparat pemerintahan Dati II Sidenreng Rappang secara maksimal merata keseluruh Desa dan kampung-kampung yang ada di wilayahnya. Walaupun sebelumnya secara administratif resmi semua kampung/lingkungan dan desa-desa itu telah mempunyai pimpinan masing-masing. Tapi karena faktor gangguan keamanan belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Untuk Desa Batu hubungannya dengan kota barulah mulai normal kembali setelah berakhirnya kekacauan yang melanda daerah tersebut pada tahun 1965. Sedangkan Desa Lancirang hubungan dengan kota tetap lancar karena letaknya diporos jalan yang menghubungkan ibukota kecamatan dengan ibukota kabupaten. Sebagai akibat dari perbedaan waktu mulainya komunikasi kedua desa tersebut dengan kota maka desa Lancirang kelihatan lebih maju dan lebih terbuka dibanding dengan Desa Batu. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa hal antara lain, dibidang ekonomi, Sosial, Politik dan Budaya.

Dibidang ekonomi, ternyata pranata ekonomi di Desa Lancirang lebih komplek dibanding dengan di Desa Batu. Di Desa Lancirang pada saat ini kita sudah menjumpai pranata-pranata ekonomi moderen seperti BRI, Koperasi, BUUD, KUD, Toko-toko dan warung-warung kopi dan es. Demikian pula dibidang pertanian sudah ada jaringan-jaringan pengairan teknis yang teratur baik.

Dibidang pengangkutan/Jasa sudah menggunakan bus, bus mini, truk dan motor serta bendi. Sedangkan di Desa Batu pranata-pranata seperti itu kita belum menjumpainya.

Dibidang Sosial di Desa Lancirang pada saat ini kita menjumpai organisasi-organisasi sosial masyarakat yang bergerak

didalam kegiatan kemasyarakatan tertentu seperti : Tudang Si pulung yang sudah dilembagakan dan dikoordinir langsung oleh Kepala Desa dan aparatnya, Kelompok Usaha Tani, Panitia pe makaman. Di Desa Batu kegiatan dibidang kemasyarakatan se perti tersebut diatas belum terkoordinir dengan baik.

Dibidang Politik, dapat dilihat bahwa di Desa Lancirang se karang ini selain dari pada Golkar masih kita jumpai Partai Per satuan Pembangunan (PPP) yang menguasai sebahagian rakyat Dengan masih adanya PPP disamping Golkar yang merupakan wadah masyarakat dalam menyalurkan aspirasi politiknya, ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan pengertian rakyat tentang kandungan isi UUD 45 sudah lebih mendalam dibanding- kan dengan di desa Batu. Karena pengertian rakyat tentang ni lai-nilai dan norma-norma politik yang terkandung dalam UUD 45 di Desa Batu belum begitu mendalam menyebabkan mereka dapat menerima dengan relah wadah politik satu-satunya ialah Golkar sehingga pada pemilu tahun 1982 yang baru lalu Golkar di Desa Batu menang mutlak.

Dibidang Budaya juga dapat kita lihat bahwa orientasi nilai hidup bermasyarakat dikedua Desa tersebut berbeda. Di desa Ba tu yang mengalami akibat kekacauan lebih parah dan masa iso lasi yang lebih lama dibanding dengan Desa Lancirang, menye - babkan orientasi hidup rakyat terlalu banyak kepada orang - o rang (pemimpin) yang dianggap dapat memberikan manfaat ke pada mereka. Terutama dalam pemberian bukti kerja yang nya ta pada masyarakat.

Kepada pemimpin-pemimpin seperti inilah mereka menumpah kan segala harapan untuk menuju masa depan yang baik.

Akibatnya semua gagasannya dapat diterima tanpa reserve de ngan istilah Bugisnya " Polo pang polo panni " artinya kalau pe rintah dari atasan itulah mutlak dilaksanakan. Hal inilah juga mungkin penyebab utama sehingga Golkar menjadi partai tung gal di Desa Batu.

Dari uraian singkat seperti diatas ini dapat kita simpulkan bahwa pengaruh nilai-nilai Nasional Indonesia dikedua desa ini berbeda. Di Desa Lancirang lebih mendalam dan lebihluas diban ding dengan di Desa Batu. Di Desa Lancirang dapat dilihat bah wa hampir semua unit administrasi yang ada di kecamatan su - dah punya jaringan sampai ke desa. Sedangkan di Desa Batu ma sih banyak jaringan-jaringan administrasi di kecamatan yang be lum ada jaringannya sampai ke desa.

Administrasi politik Nasional yang merupakan salah satu unsur dari administrasi Nasional Indonesia berpusat di ibukota negara Jakarta, jaringan-jaringannya bermuara di Desa yang merupakan unit pemerintahan terendah dibawah camat. jadi dengan demikian Desa adalah merupakan titik akhir dari semua jaringan administrasi Nasional Indonesia. Dengan kata lain Desa adalah merupakan lapangan garapan dari semua unit pemerintahan yang ada di Indonesia. Apa yang dilaksanakan di Desa harus sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan dari pusat pemerintahan. Kepala Desa adalah aparat pelaksana administrasi terdepan dari negara Republik Indonesia.

Struktur pemerintahan Negara Republik Indonesia terdiri dari pada pusat pemerintahan negara, Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II, kecamatan dan desa/kelurahan.

Dalam pembagian jaringan administrasi wilayah kegiatan kerja maka dapat kita lihat bahwa secara struktural unit-unit administrasi itu hanya sampai di kecamatan saja. Hal ini dapat kita lihat bahwa pada setiap kecamatan termasuk kecamatan Dua Pitu Datu II Sidrap dijumpai : Camat dengan aparatnya, Koramil, Dansek, Jawatan Vertikal yang terdiri dari : Agraria, Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Penerangan, PMD dan sensus Statistik, Dinas-dinas terdiri dari : Pertanian, Perikanan, perindustrian, kesehatan, Dipenda, Kehutanan dan PUK. Jadi dengan demikian secara administratif unit-unit tersebut hanya sampai di kecamatan-kecamatan tetapi secara operasionalnya semuanya sampai ke desa-desa. Dengan kata lain seorang Kepala Desa/Kelurahan harus mampu melayani/melaksanakan semua program yang berasal dari unit-unit administrasi yang ada di kecamatan. Walaupun pada prakteknya seolah-olah Kepala Desa itu hanya merupakan pelaksana perintah/program-program dari camat saja .

Kekuasaan camat kelihatannya memang melebihi semua kepala-kepala Dinas jawatan tingkat kecamatan . Hal ini disebabkan karena ia berfungsi sebagai koordinator kegiatan . Fungsi camat sebagai Kepala Wilayah pemerintahan kecamatan dalam Undang-Undang No. 5/1974 tentang Poko-Pokok Pemerintah di Daerah, pasal 81 yang sebagaimana juga dikutip oleh Hasan Walinono dalam bukunya Tanete, halaman 138, ditegaskan bahwa camat adalah Kepala Wilayah yang wewenang tugas dan

kewajibannya adalah :

- a. Membina ketenteraman dan ketertiban diwilayahnya sesuai dengan kebijaksanaan ketentuan dan ketertiban yang ditetapkan oleh pemerintah .
- b. Melaksanakan segala kegiatan dibidang pembinaan ideologi - Negara dan politik dalam negeri serta pembinaan kesatuan - bangsa sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah .
- c. Menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan-kegiatan Instansi instansi Vertikal dengan Dinas-dinas daerah baik dalam perencanaan dalam pelaksanaan untuk mencapai daya guna yang sebesar-besarnya .
- d. Membimbing dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah daerah .
- e. Mengusahakan secara terus menerus agar segala peraturan - perundang-undangan dan peraturan daerah dijalankan oleh instansi-instansi pemerintah dan pemerintah daerah serta pejabat-pejabat yang ditugaskan untuk itu serta mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan .
- f. Melaksanakan segala tugas pemerintah yang dengan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepadanya .
- g. Melaksanakan segala tugas pemerintahan yang tidak termasuk dalam tugas suatu instansi lainnya .

Dengan dasar peraturan inilah maka dalam pelaksanaan tugas, Camat memiliki wewenang yang melebihi dari kepala-kepala jawatan dan Dinas yang ada di tingkat kecamatan .

Sebagai pelaksana tugas unit pemerintah terendah dibawah Camat maka Kepala Desa juga merupakan koordinator kegiatan pemerintahan Desa . Kedudukan, tugas dan fungsi Kepala Desa telah ditegaskan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1981 bagian II pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Kepala Desa berkedudukan sebagai alat Pemerintah, alat pemerintah Daerah dan alat pemerintah Desa yang memimpin-penyelenggaraan Pemerintahan Desa .
2. Kepala Desa mempunyai tugas :
 - a. Menjalankan urusan rumah tangganya sendiri .
 - b. Menjalankan urusan Pemerintahan, pembangunan baik dari

pemerintah maupu pemerintah daerah dan kemasayarakatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk pembinaan ketenteraman dan ketertiban di wilayah desanya . . .

- c. Menumbuhkan serta mengembangkan semangat gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala Desa mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga desanya sendiri .
 - b. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam wilayah desanya .
 - c. Melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah
 - d. Melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa .
 - e. Melaksanakan koordinasi jalannya pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat desa .
 - f. Melaksanakan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga desanya sendiri .

Dari tugas dan fungsi seorang Kepala Desa seperti tersebut diatas maka secara garis besarnya dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa adalah sebagai :

1. Administrator pemerintahan Desa, termasuk kegiatan pembangunan .
2. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam desanya.
3. Pelaksana Instruksi-instruksi dari Kepala Daerah dan Camat.
4. Pengawas terhadap pelaksanaan instruksi-instruksi dan peraturan-peraturan dalam wilayah desanya.

Tetapi disamping tugas dan fungsi Kepala Desa seperti tersebut diatas yang resmi dan formal dari pejabat atasan yang mengangkatnya. Juga masih banyak tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan statusnya pemimpin dari masyarakat Desa yang langsung memilihnya untuk menduduki jabatan Kepala Desa. Sehubungan dengan peranannya wakil rakyat maka dia harus peka terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat, dia harus gesit untuk mencari cara pemecahan dari semua masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat. Disamping itu dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari maka dia harus memperhatikan

kan semua saran-saran/keritikan-keritikan dari masyarakat. Begitu pula dalam mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut kepentingan desanya ia harus mengikut sertakan pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desanya.

Tugas-tugas yang merupakan keharusan bagi seorang Kepala Desa merupakan tugas-tugas yang tak tertulis. Disinilah letak perbedaannya penugasan dari pejabat atasannya pada umumnya merupakan tugas-tugas tertulis.

Dalam pelaksanaan tugas kedua Kepala Desa di lokasi penelitian banyak mempunyai persamaan disamping juga perbedaan-perbedaan. Hal ini mungkin disebabkan karena keduanya mempunyai latar belakang profesi yang sama sebelum jadi Kepala Desa yaitu : dari ABRI. AD.

Kepala Desa Batu karier militernya lebih banyak di pasukan atau dilapangan, sedangkan Kepala Desa Lancirang lebih banyak di bidang administrasi dan keuangan .

Menurut pengamatan bahwa Kepala Desa Batu dalam melaksanakan tugasnya selalu tegas, terbuka dan ramah. Karena dia selalu berprinsip bahwa kalau program ini sukses bukan untuk saya saja tetapi untuk rakyat seluruhnya.

Dalam menerima perintah/instruksi dari bupati dan Camat maka sebelum diteruskan kepada rakyat melalui struktur kepemimpinan Desa yang lebih rendah yang terdiri dari Kepala Lingkungan/dusun, RK dan RT, terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan pemuka-pemuka masyarakat yang tergabung dalam LKMD tentang cara-cara pelaksanaannya.

Kalau memang menurut pertimbangan pemuka-pemuka masyarakat itu berat maka dicarikan jalan pelaksanaan sesuai dengan kemampuan rakyat. Hal ini dapat dilihat seperti pelaksanaan pembangunan pertanian khususnya pembukaan sawah-sawah baru di desa Batu. Kalau program ini hanya diinstruksikan kepada rakyat akan terasa berat melaksanakannya karena peralatan masih sukar didapat. Untuk mempermudah pelaksanaan tersebut maka atas inisiatif Kepala Desa diusahakan pengadaan sebuah buldozer, walaupun tentunya secara ekonomis dia lebih dahulu akan menikmati hasilnya, karena sistemnya dipersewakan kepada rakyat .

Demikian juga halnya dengan pengembangan perkebunan cengkeh dan coklat. Soal tanah tidak ada masalah karena tanah-tanah perkebunan masih cukup luas. Yang menjadi masalah ialah

lah bibit. Untuk pengadaan bibit oleh beliau diambil inisiatif untuk menghubungi dinas pertanian untuk mempermudah memperoleh bibit .

Bibit-bibit tersebut oleh rakyat dapat dibeli dengan sistem kredit melalui Kepala Desa .

Bagi rakyat yang mengusahakan kebun dapat mengurus sertifikat tanah seluas tanah yang ia garap. Sedangkan rakyat yang tidak punya kebun tidak akan diladeni permohonan sertifikat tanahnya. Penegasan ini dikemukakan pada rapat LKMD tanggal 3 Desember 1983 di balai desa Batu yang dihadiri pula oleh penulis. Dengan tegas dikatakan bahwa kalau tokh masih ada rakyat yang tidak mau bekerja untuk kepentingannya sendiri maka lebih baik minta pindah saja ke Desa lain .

Kepala Desa Lancirang dalam melaksanakan tugas sehari-hari kurang tegas tetapi disiplin, terbuka dan ramah. Dalam menerima instruksi/perintah dari Bupati atau Camat sebelum diteruskan kepada rakyat terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan pemuka masyarakat untuk mencarikan tehnik pelaksanaannya . Setelah itu barulah diteruskan kepada rakyat. Namun demikian dalam pelaksanaannya sering diperlukan kontrol yang berulang kali, Menurut beliau tugas yang paling sukar ditepati target dan waktunya ialah penagihan IPEDA .

Disamping itu satu hal yang perlu pula diperhatikan ialah : bahwa sikap dan mental rakyat di kedua desa ini berbeda. Ini terutama disebabkan oleh akibat kekacauan yang pernah dialami. Akibat kekacauan lebih parah di Desa Batu dibandingkan Desa Lancirang. Karena Lancirang pada masa kekacauan masih mendapat kontrol pengamanan dari ibukota kecamatan dan kabupaten.

Karena Desa Batu betul-betul mengalami kehancuran total maka rakyat betul-betul dituntut oleh keadaan untuk bekerja keras membangun disegala bidang. Jadi memang bekerja untuk membangun merupakan niat seluruh rakyat di desa Batu, ditambah pula bahwa Kepala Desanya adalah bekas pasukan yang pernah berkuasa didaerah itu semasa kacau.

Lain halnya di Desa Lancirang dimana pembangunan berjalan terus, hal ini menyebabkan mereka merasakan bahwa tanpa didorong atau diperintah untuk bekerja, kita sudah lama membangun.

Sikap mental rakyat Lancirang sudah mengarah kepada bekerja

setelah ada instruksi/perintah tanpa ada inisiatif. Hal ini terbukti dari daya saingnya dalam berlomba menurun sekali sejak tahun 1977. Pada tahun 1968 Desa Lancirang keluar sebagai juara I Lomba Desa sedangkan pada tahun 1977 kejuaraannya menurun menjadi juara III.

Jadi dengan kenyataan ini berarti bahwa dalam masa 9 tahun itu sudah tidak dapat meningkatkan diri dalam pembangunan.

Dari uraian singkat seperti tersebut diatas dapatlah diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kepala Desa sebagai Top Management di Desa adalah merupakan titik temu antara sistem administrasi Nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 dari atas dengan sistem kepemimpinan yang lebih banyak berdasarkan nilai-nilai adat dari rakyat.

Titik temu ini lebih dipertajam oleh adanya LKMD pada setiap desa. Karena pada Kepala Desa bersama LKMD nya sehingga segala sesuatunya yang datang dari penguasaan dari rakyat dimatangkan sebelum diteruskan kebawah atau keatas. Seperti misalnya rencana pembangunan yang dituangkan dalam repelita. Pertama-tama bahannya itu harus dimatangkan di desa dalam musyawarah LKMD, kemudian ke kecamatan, ke kabupaten (Bappeda Tk.II) , ke propinsi (Bappeda Tk. I) dan seterusnya ke pusat (Bappenas) .

Setelah matang di pusat (Bappenas) kemudian dikembalikan ke propinsi, untuk diteruskan ke kabupaten, kecamatan dan desa - desa .

Kemudian oleh Kepala Desa program tersebut dimusyawarahkan kembali melalui LKMD. Untuk mencarikan teknis pelaksanaannya di lingkungan-lingkungan/dusun-dusun yang ada di wilayahnya masing-masing .

2. Kepala Desa Batu dalam melaksanakan tugas, tegas dan berinisiatif mencarikan cara-cara sesuai dengan kondisi Desa dan rakyatnya.

Sedangkan Kepala Desa Lancirang dalam pelaksanaan tugasnya, disiplin tetapi kurang inisiatif sehingga lebih cenderung sebagai pelaksana instruksi/ perintah saja.

3. Kepala Desa bersama dengan LKMD, perangkat Desa yang terdiri dari Sekertariat desa dan Kepala-kepala Dusun, Ketua ketua RK dan Ketua-ketua RT nya merupakan sub sistem yang lebih kecil dari satu sistem yang lebih besar yaitu Pemerintahan Nasional Indonesia .

3. SISTEM KEPEMIMPINAN PEDESAAN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL .

Desa-desanya Sulawesi Selatan pada mulanya disebut Wanua, kepala desanya disebut Kepala Wanua. Keadaan ini berlangsung sampai kira-kira tahun 1965, karena pada tahun ini keluar SK Gubernur Sulawesi Selatan No. 450/XII/1965 tanggal 20 Desember 1965 tentang pembentukan Desa-desanya gaya baru diwilayah Propinsi Sulawesi Selatan .

Ini dimaksudkan untuk menertibkan batas-batas wilayah dan mengetahui jumlah Desa secara pasti. Namun beberapa Desa masih diperbolehkan menggunakan nama yang lazim di daerah setempat. Sehingga pada saat itu sudah banyak yang menggunakan nama Desa tetapi masih ada pula yang tetap memakai nama wanua .

Untuk Desa Batu dan Lancirang masih tetap menggunakan istilah wanua. Jadi ada wanua Batu dan ada pula wanua Lancirang. Nanti pada tahun 1969 barulah kedua Desa tersebut diatas memakai nama Desa dan Kepala pemerintahannya disebut Kepala Desa .

Dahulu sebelum proklamasi Kemerdekaan disetiap Desa di Sulawesi Selatan ini dikenal kelompok kepemimpinan Parewa Wanua yaitu Kepala Wanua beserta semua aparat pembantunya dan Parewa Syarak yaitu Imam wanua bersama dengan pembantu-pembantunya. Golongan dari kedua kelompok pimpinan Desa seperti tersebut diatas disebut Parewa tana atau aparat penguasa Negeri (Mattulada, 1978) .

Aparat Parewa wanua inilah yang merupakan kelompok pemimpin ditingkat Desa yang mengatur dan menjalankan pemerintahan disetiap desa masing-masing.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dimulailah mengatur seluruh wilayah Indonesia ini termasuk Sulawesi Selatan dengan sistem administrasi Nasional Indonesia.

Dengan sistem administrasi Nasional ini maka wanua - wanua yang tadinya merupakan kerajaan-kerajaan kecil diangkat dan dijadikan sebagai unit pemerintahan terendah langsung dibawah camat.

Dengan demikian pemerintahan Desa adalah merupakan sub sistem dari pemerintahan Nasional Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 .

Sebagai satu sistem, maka apabila salah satu unsurnya atau sub sistemnya mandek maka akan mempengaruhi keseluruhan sistem yang lebih besar yaitu Sistem Nasional Indonesia. Untuk mencapai tujuan pembangunan Nasional yaitu masyarakat adil dan makmur maka pembangunan pedesaan perlu mendapatkan prioritas pertama.

Secara geografis 81,2 % wilayah Indonesia merupakan Desa (Bintarto, 1983) oleh karena itu menurut sensus penduduk dikatakan bahwa 80 % penduduk Indonesia bermukim di Desa. Berdasarkan hal ini bahwa pembangunan Indonesia ini harus ditekankan pada wilayah pedesaan. Karena pembangunan pada hakekatnya adalah oleh manusia dan untuk manusia. Sebagian besar rakyat Indonesia berdiam di desa maka wajar apabila pembangunan dimulai di desa.

Dewasa ini terdapat paling sedikit 63.058 buah desa yang tersebar pada 3.329 buah kecamatan, 295 buah kabupaten /kota madya di dalam 27 buah propinsi diseluruh Nusantara Indonesia (Bintarto, 1983).

Berdasarkan kenyataan seperti tersebut diatas itulah maka dalam GBHN menyangkut bidang pembangunan daerah ditegaskan bahwa perhatian sebesar-besarnya perlu diberikan kepada peningkatan pembangunan pedesaan terutama melalui peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat Desa serta memanfaatkan secara maksimal dana-dana yang langsung maupun tidak langsung diperuntukkan bagi pembangunan pedesaan seperti: Inpres, bantuan desa dan lain-lain. Jadi jelas bahwa Desa adalah merupakan obyek pembangunan yang paling penting dalam rangka mewujudkan negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 45 .

Hal ini disadari oleh pemerintah karena Desa mempunyai fungsi yang sangat penting sebagai berikut :

1. Desa merupakan hinterland atau daerah dukung pemberi bahan makanan pokok baik dari nabati maupun hewani .
2. Desa merupakan lumbung bahan mentah dan tenaga kerja .
3. Dari segi kegiatan kerja (occupation) desa dapat merupakan desa agraris, manufaktur, industri dan nelayan (Bintarto , 1983) .

Dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 42 tahun 1969 ditetapkan bahwa di Indonesia ada tiga tingkatan Desa yaitu:

1. Desa Swadaya atau desa tradisional .
2. Desa Swakarya atau desa peralihan .
3. Desa Swasembada atau desa maju .

Menurut kualifikasi seperti tersebut diatas maka desa swadaya adalah Desa yang masih memerlukan pembinaan untuk menuju ketingkat desa Swakarya. Desa Swakarya yaitu Desa peralihan dari Swadaya untuk menuju Swasembada. Jadi perkembangannya sudah melampaui keadaan Desa Swadaya. Sedangkan Desa Swasembada adalah desa yang telah berkembang, artinya keadaan masyarakatnya tanpa bimbingan sudah mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan pembanguann untuk menuju terwujudnya desa dan masyarakat Pancasila .

Di Sulawesi Selatan yang wilayahnya meliputi 21 buah kabupaten , 2 buah kotamadya, 169 buah kecamatan, 1.169 buah Desa oleh pemerintah telah diusahakan pembangunan Desa-desa untuk menuju terciptanya Desa Swasembada. Namun demikian akibat kekacauan yang melanda daerah ini kurang lebih 15 tahun maka usaha-usaha tersebut barulah mulai nampak hasilnya setelah pulihnya keamanan pada kira-kira tahun 1965 .

Sejak tahun 1965 mulailah diintensifkan pembangunan Desa melalui pelaksanaan perlombaan desa untuk mengejar ketinggalan-ketinggalan yang disebabkan oleh akibat kekacauan . Usaha pembangunan seperti tersebut diatas bukan hanya diadakan ditingkat Desa saja tetapi juga ditingkat kecamatan, dengan adanya perlombaan pembangunan kecamatan. Kesemua kegiatan - kegiatan perlombaan seperti tersebut diatas bertujuan agar desa-desa itu dapat terdorong dan timbul semangatnya untuk membangun agar potensi yang dimilikinya dapat bermanfaat bagi dirinya dan untuk masyarakat secara keseluruhan .

Pembangunan Pedesaan lebih bersifat bimbingan dan pembinaan. Ada dua faktor yang perlu dibina dalam sebuah Desa yaitu : Masyarakat Desa termasuk lingkungannya dan Pamong Desa. Sedangkan yang menjadi pembina ialah semua jawatan, instansi dan Dinas, dengan koordinasi oleh Bupati, camat dan Kepala Desa . Kepala Desa sebagai penguasa tunggal di Desanya merupakan eselon terbawah dari sistem administrasi Nasional . Dengan demikian nyata bahwa pusat dari segala kegiatan adalah Kepala Desa itu sendiri. Ini sesuai dengan kedudukannya sebagai unit pemerintahan terendah dari sistem Nasional Indonesia . Semua ujung jaringan kekuasaan dan administrasi terpusat kepa-

danya. Hal ini diperkuat pula oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 th 1981 pasal 3 yang berbunyi :

1. Kepala Desa berkedudukan sebagai alat pemerintah, alat pemerintah daerah dan alat pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa .
2. Kepala Desa mempunyai tugas :
 - a. Menjalankan urusan rumah tangganya sendiri .
 - b. Menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan , baik dari pemerintah maupun pemerintah daerah dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa termasuk pembinaan ketenteraman dan ketertiban diwilayah desanya
 - c. Menumbuhkan serta mengembangkan semangat gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa .
3. Untuk melaksanakan tuga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala Desa mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga desanya sendiri .
 - b. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam wilayah Desanya .
 - c. Melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah .
 - d. Melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa .
 - e. Melaksanakan koordinasi jalannya pemerintahan pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat desa .
 - f. Melaksanakan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk urusan rumah tangga desanya sendiri .

Dari tugas dan fungsi Kepala Desa seperti tersebut diatas nyata bahwa Kepala Desa adalah merupakan Top Manajemen dan pengusaha tertinggi di desanya . Hal inipulalah yang menyebabkan sehingga dalam kenyataannya kekuasaan Kepala Desa itu melebihi kekuasaan dari semua pemimpin unit yang ada di Tingkat Desa . Oleh karena itulah daris'egi administrasi / pemerintahan Nasional dapat dikatakan bahwa sukses atau tidaknya pembangunan di suatu Desa adalah sangat ditentukan oleh keuletan dari Kepala Desa bersangkutan. Karena secara formal semua kekuasaan ada ditangannya namun demikian penerapan kekuasaan oleh Kepala Desa sering mengalami hambatan .

Suatu hal yang perlu diperhatikan sekarang ialah kebanyakan

an Desa sekarang walaupun formalnya kekuasaan ada pada Camat dan Kepala Desa tetapi pengaruh terhadap masyarakat masih sebahagian besar berada pada pemuka-pemuka masyarakat setempat. Hal ini berlaku pula pada kedua Desa lokasi penelitian bahwa melaksanakan program pembangunan desa kalau hanya didasarkan pada kekuasaan dan wewenang yang ada pada Pak Desa saja maka pelaksanaannya akan banyak mengalami hambatan. Terlebih-lebih lagi bila program itu menyangkut langsung dengan sistem kekerabatan/kekeluargaan atau kepercayaan masyarakat seperti halnya masalah keluarga Berencana (KB) .

Pelaksanaan program KB ini sangat memerlukan pendekatan pada pemuka-pemuka masyarakat utamanya pemuka masyarakat di bidang agama. Karena di kedua Desa ini nilai adat dan nilai agama masih tetap dijadikan pegangan dalam bidang-bidang tertentu seperti dalam hal kekeluargaan, dan kepercayaan, walaupun dalam bidang politik, ekonomi dan pendidikan sudah didominasi oleh nilai-nilai Nasional Indonesia Pancasila dan UUD 45 .

Bila pendekatan terhadap pemimpin-pemimpin informal sukses maka ini merupakan salah satu jaminan akan suksesnya pembangunan di pedesaan . Di Desa lokasi penelitian utamanya di Desa Batu rakyat pada umumnya masih banyak yang berorientasi pada pemimpin-pemimpin informalnya utamanya yang sudah termasuk kategori orang tua kempung . Dalam beberapa masalah tidak adan tawar menawar. Hal ini mungkin karena keadaan-masyarakatnya masih serba tertutup dibanding dengan desa-desa lainnya seperti Desa Lancirang yang sudah pernah menjuarai lomba desa dua kali yaitu tahun 1968 dan 1977, masyarakatnya sudah lebih banyak berfikir rasional sehingga cenderung kepada hal-hal yang lebih bermanfaat saja. Oleh karena itulah Desa Batu sangat memerlukan seorang Kepala Desa yang betul-betul dapat mengetahui secara mendalam keadaan dan kondisi masyarakat dan potensi Desa tersebut termasuk potensi budayanya agar betul-betul dapat menjadi pelopor pembangunan yang kreatif.

Sebenarnya rakyat di Desa itu kuat dan ingin bekerja untuk melaksanakan pembangunan, asalkan terlebih dahulu diberikan pengertian tentang tujuan dan manfaat dari pada pembangunan tersebut melalui pendekatan adat dan tradisi setempat . Oleh karena itu kita harus melihat budaya mana yang paling menonjol disuatu masyarakat (Astrid Sutanto, 1980) .

Ada suatu keyakinan dari rakyat di Desa lokasi penelitian bahwa semua pekerjaan itu akan diridhoi oleh Tuhan asalkan ti-

tidak merusak, utamanya adat dan tradisi masyarakat yang merupakan warisan turun temurun. Karena bila suatu pekerjaan di laksanakan tetapi merusak adat atau tradisi maka itu akan berakibat turunnya bencana yang menimpa seluruh rakyat. Seperti misalnya tanaman tidak jadi, ternak tidak berkembang, wabah penyakit berjangkit dan sebagainya.

Bekerja memenag kita punya warisan dari nenek moyang, karena itu siapa yang malas itu akan dilaknat oleh Tuhan. Menurut mereka orang yang dilaknat oleh Tuhan karena malasnya maka dia akan menjadi monyet, istilah bugis setempat Mancaji lancengngi yaitu orang yang tinggal di hutan maka tanpa kerja. Di daerah ini ada suatu perinsip yang dijadikan pegangan turun temurun sejak dahulu kala, bahkan sekarang ini oleh pemerintah daerah tingkat II Sidenreng Rappang sudah dilembagakan yaitu berupa pesan orang tua yang berbunyi : " Resopa Temmangingngi Naletei Pammase Dewata ", artinya : Hanya dengan kerja keras dengan niat yang baik akan di berkahi oleh Tuhan. Prinsip inilah yang menjadi pegangan rakyat Dati II Sidrap sehingga berhasil - mewujudkan daerahnya menjadi daerah lumbung pangan untuk Indonesia bahagian timur.

Salah satu usaha yang perlu diintensifkan dalam rangka mensukseskan pembangunan di desa ialah : mengfungsikan LKMD yang ada disetiap desa sebagaimana mestinya. Karena melalui - LKMD inilah dapat dicapai kata sepakat antara pimpinan formal atau dalam hal ini Kepala Desa dengan aparatnya, dengan pemimpin informal (Pemuka-pemuka masyarakat setempat).

BAB IX

P E N U T U P .

A. KESIMPULAN .

1. Masyarakat Desa Lancirang lebih terbuka dibanding dengan masyarakat Desa Batu . Hal ini disebabkan karena komunikasi Desa Lancirang lebih dahulu terbuka dan lancardengan kota dan daerah sekitarnya . Oleh karena itu jumlah dan jenis kepemimpinan di Desa Lancirang lebih beragam di banding dengan Desa Batu .
2. Karena masyarakat Desa Batu masih bersifat tertutup maka kegiatan -kegiatan pembangunan di Desa tersebut lebih banyak memerlukan inisiatif Kepala Desa di bandingdengan Desa Lancirang . Hal inilah mungkin yang menyebabkan sehingga Kepala Desa Batu lebih banyak berinisiatif dalam menerima perintah atau instruksi dari camat dibanding dengan Kepala Desa Lancirang .
3. Jabatan Kepala Desa dikedua Desa lokasi penelitian, terbuka bagi siapa saja yang memenuhi syarat dan mempunyai kemampuan. Ini terbukti bahwa Kepala Desa dikedua Desa tersebut semuanya orang pendatang.
4. Kepala Desa adalah merupakan titik temu dari sistemkepemimpinan lokal yang didasari nilai-nilai adat dan agama Islam . Dengan sistem kepemimpinan Nasional yang didasari oleh nilai-nilai dan aturan-aturan Pancasila dan UUD 45. Namun dalam kenyataanya kepemimpinan Nasional sering mendominasi kepemimpinan lokal melalui kekuasaan formal .
5. Walaupun prosedur pengangkatan kedua Kepala Desa tersebut sama. Namun kenyataannya bahwa rakyat Desa Lancirang lebih rajin menggunakan Hak kontrol sosialnya di banding dengan rakyat Desa Batu . Hal ini mungkin disebabkan oleh sifat masyarakatnya atau watak Kepala Desanya yang berbeda .
7. Sesuai dengan hasil pengamatan dikedua Desa lokasi penelitian . Disimpulkan bahwa dalam masalah-masalah tertentu sistem politik lokal dan sistem politik Nasional dapat berjalan bersama dan saling menunjang .

Tetapi dalam masalah-masalah tertentu terutama me-
nyangkut keluarga dan agama sering muncul pertentangan.

B. S A R A N _ S A R A N .

Untuk kegiatan inventarisasi dan dokumentasi ke-
budayaan daerah selanjutnya, perlu dipertimbangkan ten-
tang penelitian kepemimpinan dalam masyarakat pedesaan
dari aspek tertentu, misalnya dari aspek pembangunan dan
sebagainya .

I N D E K S .

Halaman.

1 . Arung	16, 38, 65, 84, 86
2 . A d e k	54
3 . Bicara	54
4 . Bilalak	74
5 . Bisesa	65
6 . Camma	41
7 . Dua Pitue	17
8 . D o j a	75
9 . Gurunna Andi	78
10. Gurutta/Anregurutta	81
11. Gurue	82
12. Iyye Puang	27
13. Imam Desa	73
14. Jasek tutuk	27
15. Khalawatiah	35, 80
16. Kalifah	80,35
17. Khatib	74
18. Lipak Garusuk	27
19. Lima Ajattappareng	88
20. M a d o	34, 64
21. Magglok	58
22. Maddaga	58
23. M a t o a	64
24. Mangolo Pasang	87
25. Pitu Riase	17
26. P e t t a	17, 27, 45
27. P u a n g	21, 27
28. Panrita	24, 71, 80
29. Punggawa/Ponggawa	34, 64, 66, 71
30. Parewa Wanua	38, 102
31. Parewa Syarak	38, 102

32. Parewa Tana	38, 102
33. Panggaderang	54, 92
34. Pappananrang	64
35. Pallontarak	64
36. Patteks	66
37. Panre Bola	71
38. Panrita Bola	71
39. Puang Lompo	78
40. R a t e	35
41. Rapang	54
42. Sullewatang	17
43. Songkok Uwwe	27
44. Saoraja	34
45. Sitaro Riale	49
46. Syarak	54
47. Sanro	64, 71, 78
48. To Manurung	84
49. Tudang Sipulung	95
50. Tari Majjaga	37
51. Ulu-Ulu	34
52. W a n u a	20, 21, 38, 102
53. W a r i	54

DAFTAR KEPUSTAKAAN .

1. A S T R I D .S. SUSANTO, DR.PHIL , Kepemimpinan Pemuda dan Komunikasi Sosial Bina Cipta, 1976 .
2. ----- , Komunikasi Sosial di Indonesia, Bina Cipta , jakarta 1980 .
3. A. HASAN WALINONO, Prof. DR , Tanete suatu Studu Sosiologis Politik, Desertasi Doktor, UjungPandang 1976.
4. Abd. Razak DG. Patunru , Sekelumit tentang sejarah Kerajaan Sidenreng Rappang, Bingkisan Yayasan - Kebudayaan Sulawesi Selatan, No.3,4 Tahun 1968
5. B.N. M A R B U N , SH , Proses Pembangunan Desa menyongsong Tahun 2000, Erlangga, Tahun 1980.
6. JAMALUDDIN EFFENDY, Kolonel , Pembangunan Pedesaan Sulawesi Selatan Tenggara, Yayasan Makassar Press, Ujung Pandang tahun 1973 .
7. HILDRED GEERTZ , Aneka Budaya dan Komunitas di Indonesia, Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial FIS UI Jakarta, 1981 .
8. KOENTJARA NINGRAT, Prof. DR , Masyarakat Pedesaan di Indonesia, Masalah Pembangunan, Antropologi - Terapan, Jakarta, LP3ES . 1982 .
9. ----- , Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan, PT. Gramedia , Jakarta 1974 .
10. MATTULADA , Prof. DR , Masyarakat Desa di Sulawesi Selatan, Lephass, Ujung Pandang, 1978 .
11. ----- , La Toa Suatu Lukisan analisis terhadap Atnropologi Politik orang Bugis UI Jakarta, 1975 .
12. ----- , Beberapa Aspek Struktural Kerajaan Bugis makassar di Sulawesi Selatan abad XVI, Bingkisan Budaya Sulawesi Selatan , I , 1977 .
13. MOCHTAR MASOED , DR , dkk , Perbandingan sistem Politik, Gajah Mada University Press, Yogyakarta , tahun 1981 .

14. MOEKIJAT , Drs , Prinsip-Prinsip Adminis - trasi, Manejemen dan Kepemimpinan, Alumni, Bandung, tahun 1977 .
15. M. CHOLIL MASYUR, SH , Sosiologi Masyarakat Ko - ta dan Desa, Usaha Nasional Surabaya tanpa tahun.
16. RASYID MAPPILING , Drs , Monografi Sulawesi Sela - tan , Media Kebudayaan Dirjen Kebudayaan Dep. P & K . Jakarta tanpa tahun .
17. SOKANDAR WIRIATMAJA , MA , Pokok-Pokok Sosiologi Pedesaan, C.V. Yasa Guna, Jakarta th.1973 .
18. SARITA PAWILOY, dkk, Drs , Sejarah Pendidikan Daerah Sulawesi Selatan DEPDIKBUD, Proyek IDKD 1980 / 1981 .
19. SOEDIONO. M.P. TJONDRONEGORO, Modernisasi Pedesaan, Pilihan Strategis Dasar menuju Fase Lepas Landas, Perisma, April 1978 .
20. SANAFIAH FAISAL , Menggalang Gerakan ba - ngun diri masyarakat Desa, Usaha Nasional, Sura - baya. Tahun 1981 .
21. THEODORE M. SMITH , Kepala Desa Pelopor Pem bangunan, Dalam Bungai Rampainya Antropologi - Terapan oleh Koentjara Ningrat (Penyunting) LP- 3ES .
22. WINARDI , DR, SE , Pengantar tentang Sistem dan Analisa Sistem, PT Karya Nusantara, Jakarta, tahun 1980 .
23. U.U No.5 Tahun 1979 , Tentang Pemerintahan De - sa dan Kelurahan .
24. SK. Gubernur SULSEL No.450/X!!/1965 , Tentang Pembentukan Desa-Desa Gaya baru .
 SK. Gubernur SULSEL No. 309/1973 .
 SK. Bupati SIDRAP No. 842/1961 . Tentang Pembentukan - Desa di Wilayah DATL.II SIDRAP .
 SK. Bupati SIDRAP No. 271/1961 , Tentang Pembubaran - Distrik-Distrik yang ada di wilayah Sidrap .
 SK. Gubernur SULSEL NO. 2067A/1961, Tentang pembentukan Kecamatan .

DAFTAR INFORMAN .

1. N a m a : H. Wa' Duha .
Umur : 65 tahun .
Agama : I s l a m .
Pekerjaan : Pensiunan Polisi/bekas Kepala Wanua
Pendidikan : SD
B a h a s a : Bugis, Camma, Indonesia .
Alamat : Kampung Barukku .
2. N a m a : H. M. MALAYANG .
Umur : 50 tahun .
Agama : Islam .
Pekerjaan : Imam Desa Batu .
Pendidikan : Madrasah Islam .
B a h a s a : Bugis , Camma , Indonesia .
A l a m a t : Kampung Barukku .
3. N a m a : H. M Saleh .
U m u r : 50 tahun .
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Kepala Desa Batu .
Pendidikan : SMP .
B a h a s a : Bugis , Indonesia .
A l a m a t : Kampung Barukku .
4. N a m a : M. Sibole .
U m u r : 40 tahun .
A g a m a : I s l a m .
Pekerjaan : Kepala SD. V. Batu .
Pendidikan : S P G .
B a h a s a : Camma, Bugis, Indonesia .
A l a m a t : Kampung Tana Toro .
5. N a m a : Abd. Pakkana .
U m u r : 65 tahun .
A g a m a : I s l a m .
Pekerjaan : Bekas Kepala Kampung .
Pendidikan : SD .
B a h a s a : Bugis, Camma, Indonesia .
A l a m a t : Kampung Barukku .

6. Nama : Maju Datu .
 Umur : 60 tahun .
 Agama : Islam .
 Pekerjaan : Bekas Kepala Kampung .
 Pendidikan : SD .
 Bahasa : Bugis, Camma, Indonesia .
 Alamat : Kampung Barukku .
7. Nama : La Nungke .
 Umur : 45 tahun .
 Agama : Islam .
 Pekerjaan : Kepala SD 1 Batu .
 Pendidikan : S P G .
 Bahasa : Bugis, Indonesia .
 Alamat : Kampung Barukku/Lancirang.
8. Nama : Mahmud Mide .
 Umur : 50 tahun .
 Agama : Islam .
 Pekerjaan : Guru Agama SD 1 Batu .
 Pendidikan : P G A .
 Bahasa : Bugis, Indonesia .
 Alamat : Kampung Barukku .
9. Nama : Muslimin. SR.
 Umur : 35 tahun .
 Agama : Islam .
 Pekerjaan : Kepala SD IV Batu .
 Pendidikan : S P G .
 Bahasa : Bugis, Camma, Indonesia .
 Alamat : Kampung Barukku .
10. Nama : M. Arif .
 Umur : 40 tahun .
 Agama : Islam .
 Pekerjaan : Kepala Lingkungan II Batu .
 Pendidikan : SD .
 Bahasa : Bugis, Camma, Indonesia .
 Alamat : Kampung Barukku .

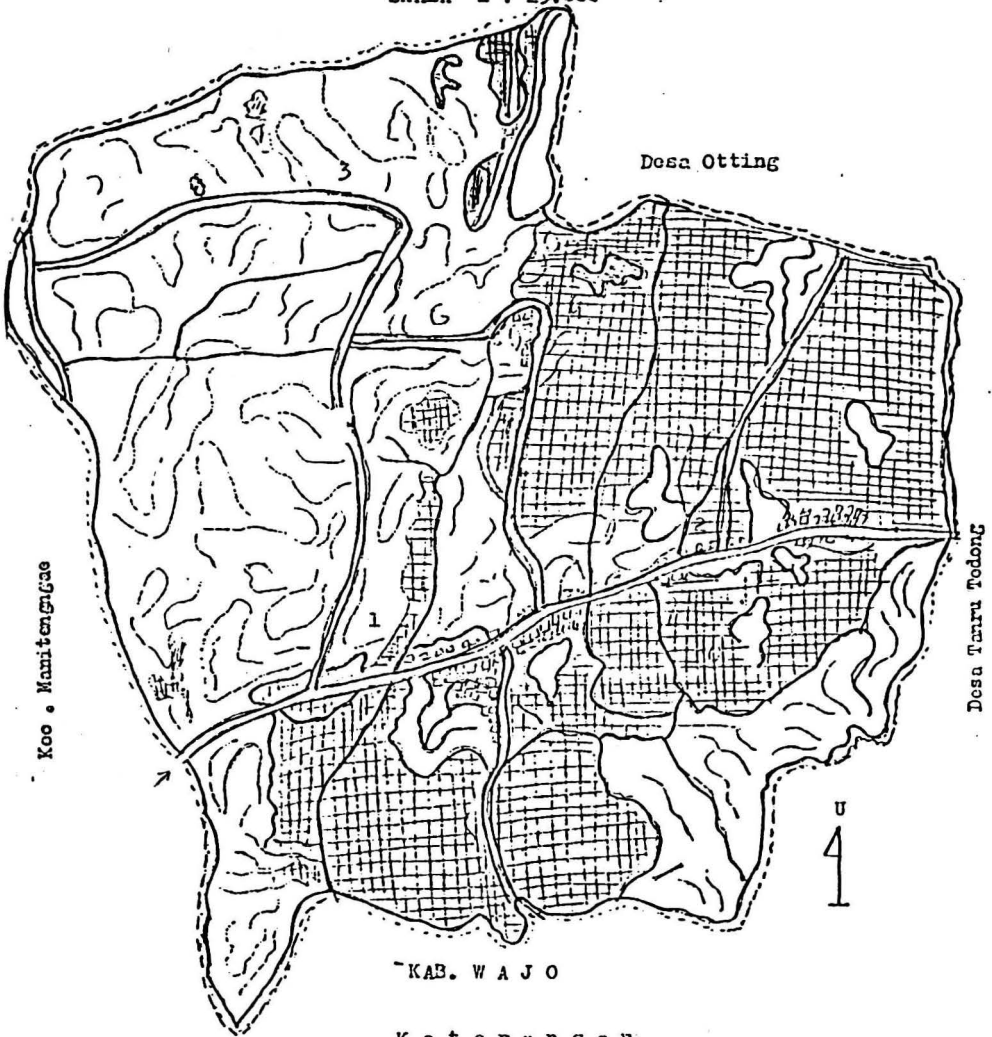
11. N a m a : Abd. Kadir .
U m u r : 30 tahun .
A g a m a : I s l a m .
Pekerjaan : Sekertaris Desa .
Pendidikan : S M P .
B a h a s a : Bugis, Indonesia .
A l a m a t : Kampung Barukku .
12. N a m a : M. Nur .
U m u r : 40 tahun .
A g a m a : I s l a m .
Pekerjaan : Kepala SD VI Batu .
Pendidikan : S P G .
B a h a s a : Bugis, Indonesia .
A l a m a t : Tanru Tedong .
13. N a m a : Umar Mangile, BA .
U m u r : 40 tahun .
A g a m a : I s l a m .
Pekerjaan : Penilik Kebudayaan Dua Pitue .
Pendidikan : Sarjana Muda .
B a h a s a : Bugis, Indonesia .
A l a m a t : Tanru Tedong .
14. N a m a : Drs. muh. Mawi .
U m u r : 40 tahun .
A g a m a : I s l a m .
Pekerjaan : Penilik SD Dua Pitue .
Pendidikan : Sarjana Pendidikan .
B a h a s a : Bugis, Indonesia .
A l a m a t : Tanru Tedong .
15. N a m a : Abd. Hafid. K.
U m u r : 45 tahun .
A g a m a : I s l a m .
Pekerjaan : Ketua LKMD Lancirang .
Pendidikan : S P G .
B a h a s a : Bugis, Indonesia .
A l a m a t : Lancirang .

16. N a m a : M. B a k r i .
 U m u r : 30 tahun .
 A g a m a : I s l a m .
 Pekerjaan : Sekertaris Desa Lancirang .
 Pendidikan : S M P .
 B a h a s a : Bugis, Indonesia .
 A l a m a t : Lancirang .
17. N a m a : Jannong Tappa .
 U m u r : 45 tahun .
 A g a m a : I s l a m .
 Pekerjaan : Kepala Kantor kecamatan Dua Pitue .
 Pendidikan : S M P .
 B a h a s a : Bugis, Indonesia .
 A l a m a t : Desa Bila .
18. N a m a : Andi Baharuddin .
 U m u r : 50 tahun .
 A g a m a : I s l a m .
 Pekerjaan : Kepala Kampung IV Desa Bila .
 Pendidikan : S M P .
 B a h a s a : Bugis, Indonesia .
 A l a m a t : Desa Bila .
19. N a m a : Andi Panynyiwi, BA .
 U m u r : 25 tahun .
 A g a m a : I s l a m .
 Pekerjaan : Wakil Camat Dua Pitue .
 Pendidikan : A P D N .
 B a h a s a : Bugis, Indonesia .
 A l a m a t : Tanru Tedong .
20. N a m a : M. Jafar Pasarai .
 U m u r : 50 tahun .
 A g a m a : I s l a m .
 Pekerjaan : T a n i (Pallontarak) .
 Pendidikan : B H .
 B a h a s a : Bugis, Indonesia .
 A l a m a t : Tanru Tedong .

21. Nama : M. Tahir. M.
Umur : 37 tahun .
Agama : Islam .
Pekerjaan : Pegawai Negeri/Tani.
Pendidikan : S L A .
Bahasa : Bugis, Indonesia.
Alamat : Lancirang .
22. Nama : M. Bakri .
Umur : 35 tahun .
Agama : Islam .
Pekerjaan : Sekertaris Desa Lancirang .
Pendidikan : S L A
Bahasa : Bugis, Indonesia .
Alamat : Lancirang .
23. Nama : H. Abd. Kadir. M .
Umur : 45 tahun .
Agama : Islam .
Pekerjaan : Kepala Desa Lancirang .
Pendidikan : S M P .
Bahasa : Bugis, Indonesia .
Alamat : Lancirang .

PETA DESA LANCIRANG

SKALA 1 : 25.000



KAB. W A J O

K e t e r a n g a n

- | | |
|---------------|-------------------------|
| Batas Desa | Pemukiman (Perumahan) |
| Batas Kampung | Persawahan. |
| Jalan Raya | Perbukitan . |
| Jalan Desa | R a w a . |
| s u n g a i . | 1.2.3. Honor Kampung . |

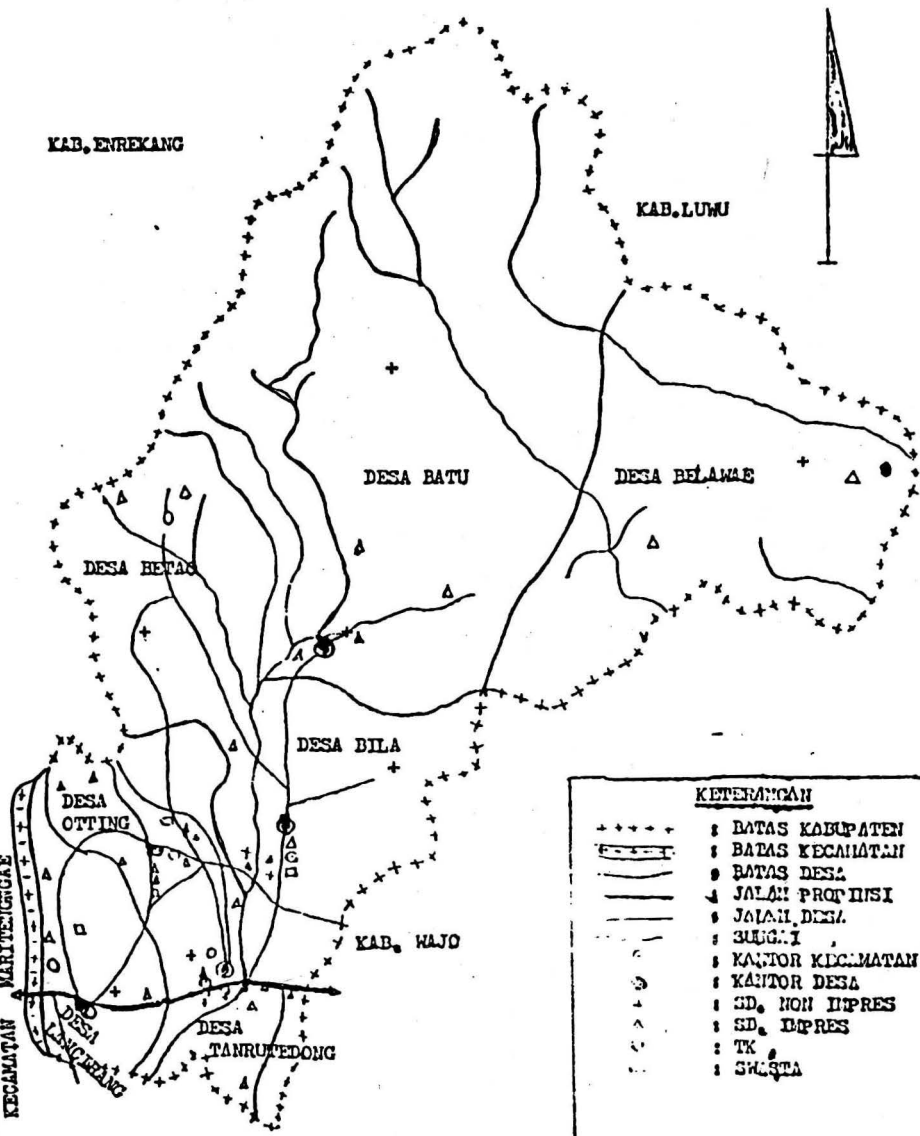
PETA KECAMATAN DUA PITUE

SKALA = 1 : 180,000.



KAB. ENREKANG

KAB. LUWU

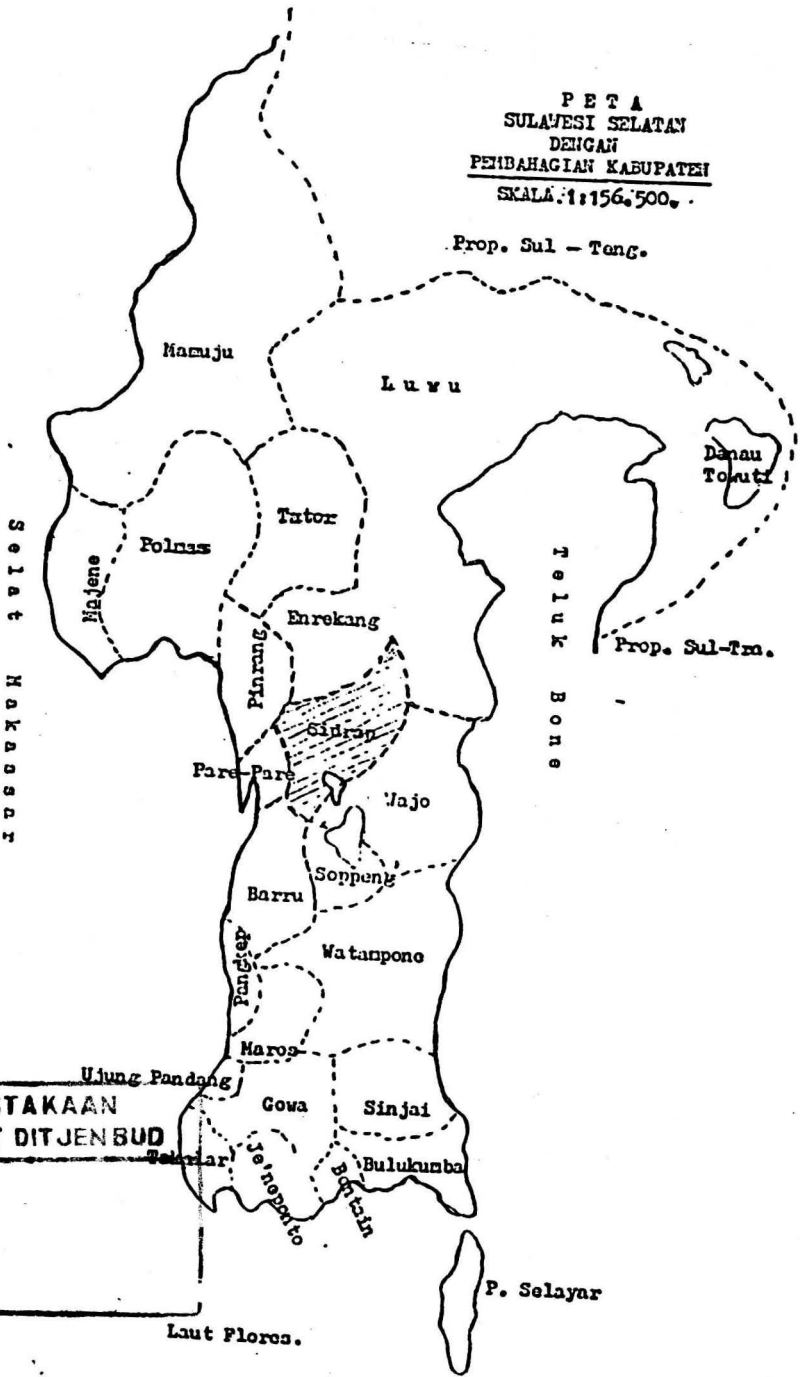


KETERANGAN

- +++++ : BATAS KABUPATEN
- : BATAS KECAMATAN
- : BATAS DESA
- ▲— : JALAN PROPINSI
- ▲— : JALAN DESA
- : SUNGAI
- : KANTOR KECAMATAN
- ⊙ : KANTOR DESA
- ⊕ : SD. NON ITPRES
- △ : SD. ITPRES
- ⋄ : TK
- : SWASTA

PETA
SULAWESI SELATAN
DENGAN
PEMBAHAGIAN KABUPATEN
SKALA: 1:156.500.

Prop. Sul - Tang.



Selat Makassar

Teluk Bone

Prop. Sul-Tan.

PERPUSTAKAAN
SEKRETARIAT DJENBUD
YOGYAKARTA.

Laut Flores.

P. Selayar

Perpustakaan
Jendera

30